

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

**BIOGRAFI PAHLAWAN NASIONAL
MARTHIN INDEY DAN SILAS PAPARE**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997**

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

**BIOGRAFI PAHLAWAN NASIONAL
MARTHIN INDEY DAN SILAS PAPARE**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997**

BIOGRAFI PAHLAWAN NASIONAL MARTHIN INDEY DAN SILAS PAPARE

Penulis : Onnie Lumintang
P. Suryo Haryono
Restu Gunawan
Dwi Ratna Nurhajarini

Penyunting : R.Z. Leirissa

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan

Jakarta 1997

Edisi 1997

Dicetak oleh : CV. PUTRA SEJATI RAYA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Projek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Projek IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses peristiwa. Di samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik yang mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Projek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin meyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas, kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Projek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan karya-karya projek ini di kemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Edi Sedyawati
NIP. 130 202 962

PENGANTAR

Biografi *Pahlawan Nasional Marthen Indey dan Silas Papare* satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian Penulisan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun 1994/1995.

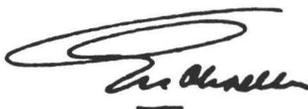
Penulisan Biografi Pahlawan Nasional ini merupakan salah satu upaya untuk menyampaikan embaran mengenai pahlawan-pahlawan nasional yang berasal dari Irian Jaya yang meliputi sosok perjuangan serta sumbangan maupun peran mereka dalam mempertahankan kemerdekaan tanah air Indonesia.

Dasar pemikiran penulisan biografi pahlawan ini ialah untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa, membangkitkan patriotisme kebangsaan, serta melestarikan Jiwa dan semangat kepahlawanan dalam kehidupan bangsa dan negara.

Penulisan ini diharapkan akan menjadi semacam jembatan untuk memahami kehidupan kebudayaan di suatu lingkungan masyarakat budaya, serta dapat membangkitkan kesadaran sejarah bagi generasi penerus terhadap gagasan-gagasan dan karya-karya yang pernah diciptakan oleh para pendahulunya.

Dengan diterbitkannya buku biografi pahlawan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kesejahteraan dan memberikan embaran yang memadai bagi masyarakat serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya. Kepada berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya penerbitan buku ini kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, Oktober 1997
**Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Sejarah Nasional**



G.A. Ohorella
NIP. 130370094

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	v
Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Biografi Marthin Indey	
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	5
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Metode Penulisan	6
1.5 Sistematika laporan	7
Bab II Latar Belakang Budaya	
2.1 Letak dan Keadaan Geografi	9
2.2 Sistem Kekerabatan	11
Bab III Marthin Indey Pendidikan, Pekerjaan dan Keluarga	
3.1 Pendidikan	13
3.2 Pekerjaan	17
3.3 Keluarga	23
Bab IV Marthin Indey Menyambut Kemerdekaan	25

Bab V	Peran Marthin Indey Dalam Sejarah	35
Biografi Silas Papare		
Bab VI	Pendahuluan	
6.1	Latar Belakang.....	47
6.2	Tujuan Penelitian	51
6.3	Ruang Lingkup	52
6.4	Metode Penelitian	52
6.5	Sistematika Laporan	53
Bab VII	Latar Sosial Budaya	
7.1	Letak dan Keadaan Geografi	55
7.2	Sistem Kekerabatan	57
Bab VIII	Silas Papare Pendidikan dan Pekerjaan	
8.1	Pendidikan.....	61
8.2	Pekerjaan	63
8.3	Keluarga	65
Bab IX	Silas Papare Dalam Menyambut Kemerdekaan .	67
Bab X	Peran Silas Papare Dalam Arus Sejarah	77
Bab XI	Penutup	93
	Daftar Pustaka	99
	Lampiran-lampiran	101

Biografi Marthin Indey



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Hal ini dapat terwujud karena adanya persatuan dan kesatuan dari seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemerdekaan itu dapat dinikmati setelah melalui perjuangan yang panjang dan tanpa pamrih dari seluruh bangsa Indonesia dengan mengorbankan jiwa, harta benda yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu bangsa Indonesia setelah proklamasi, telah bertekad untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Kemerdekaan yang telah dicapai itu belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh seluruh rakyat, karena pemerintah kolonial Belanda masih berusaha untuk menguasai kembali wilayah Indonesia, sehingga setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia masih harus mempertahankan keutuhan wilayahnya dari Sabang sampai Merauke.

Kenyataan menunjukkan bahwa sebelum proklamasi diumumkan, Irian Barat (baca: Irian jaya) telah dibebaskan oleh tentara Sekutu

dari kekuasaan bala tentara Jepang. Pada saat tentara Sekutu melakukan pembebasan Irian Barat, ikut pulalah Netherland Indies Civil Administration (NICA) beserta aparatnya.

Dalam gerak majunya, tentara Sekutu berhasil menguasai Irian Barat, dengan demikian setahun sebelum proklamasi kemerdekaan, daerah Irian Barat telah dikuasai oleh NICA. Meskipun demikian rakyat Irian Barat tetap mendengar berita proklamasi kemerdekaan melalui radio dan pamflet-pamflet yang dikirim oleh orang-orang Indonesia di Australia, yang tergabung dalam *Political Axile Association (TPFA)*.

Berita proklamasi tersebut telah mendorong rakyat Irian Barat untuk mempertahankan proklamasi tersebut di daerahnya. Ini terbukti dengan munculnya perlawanan yang dilakukan rakyat Irian Barat, yaitu dengan mendirikan organisasi-organisasi seperti Komite Indonesia Merdeka (KIM), Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII), (Gerakan Merah Putih (GMP) dan lain-lain.

Konflik antara Indonesia dan Belanda tentang Republik Indonesia baru berakhir setelah ditandatangani Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Dalam isi persetujuan KMB ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa setahun setelah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), masalah Irian Barat baru akan diselesaikan dengan jalan perundingan.

Kedatangan NICA di Irian Barat juga mengikutsertakan orang-orang Indonesia yang telah dibawa mengungsi ke Australia. Salah satunya adalah Sugoro, seorang bekas tahanan Digul yang diserahi tugas sebagai penasehat pada Direktur Pendidikan dan Agama (*adviseur Directeur Onderwijs en Eredienst*) dan untuk selanjutnya memimpin suatu Sekolah Bestuur (Pamong Praja) di Kampung Harapan (semula bernama Kotanica).

Sugoro yang setia kepada perjuangannya selalu menanamkan sikap nasional kepada siswa-siswa sekolah kursus pamong praja. "Diantara orang-orang Irian yang menjadi siswa kursus tersebut adalah Markus Kaisiepo, Frans Kaisiepo, Nicolas Youwe, Lukas

Rumkorem, Silas Papare, dilain pihak pada batalyon Papua terdapat Marthin Indey".¹ Mereka sering mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan perjuangan bangsa Indonesia. Dari pertemuan itu munculah usaha-usaha untuk melakukan perlawanan.

Rencana perlawanan itu akan dilakukan pada tanggal 25 Desember 1945 yang melibatkan anggota batalyon Papua, polisi serta orang sipil. Tujuan perlawanan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia di Irian Barat. Perlawanan itu sudah disepakati oleh beberapa pejuang antara lain Silas Papare, Marthin Indey, dan Lukas Rumkorem. Namun sebelum rencana itu terlaksana, Pemerintah Kolonial Belanda (PKB) telah mengetahuinya, sehingga mereka menangkap dan menjatuhkan hukuman penjara bagi orang-orang yang terlibat dalam rencana itu, termasuk Sugoro, Marthin Indey, Silas Papare, dan Lukas Rumkorem.

Penjara bukanlah hal baru bagi para tokoh, pemuka masyarakat dan patriot-patriot bangsa yang heroik, mereka tetap merencanakan, untuk melakukan perlawanan selanjutnya. Sebagai pemimpin maka ditunjuklah Panggongcang Alam, pejuang asal Minangkabau. Perlawanan itu ditetapkan pada tanggal 17 Juli 1946.

"Tujuannya ialah untuk melucuti KNIL, menangkap pembesar-pembesar, menduduki stasiun radio dan alat-alat vital lainnya".² Namun sebelum hari yang ditetapkan tiba, pemerintah kolonial Belanda telah mencium adanya rencana, sehingga perlawanan itu kembali mengalami kegagalan. Kegagalan itu merupakan cambuk, langkah yang mereka tempuh selanjutnya adalah dengan mendirikan organisasi-organisasi. Organisasi pertama yang didirikan di Irian Barat adalah Komite Indonesia Merdeka (KIM), organisasi ini berdiri di Jayapura pada bulan Oktober tahun 1946 diketuai oleh Dr. J.A. Tumangken Gerungan seorang dokter perempuan asal Minahasa yang mengepalai sebuah Rumah Sakit di Abepura sedangkan Marthin Indey anggota biasa. Sebenarnya KIM ini di

1. Bondan Soedharto MP. 1994. Gerakan Bawah Tanah : Cara Rakyat Irian Jawa Menentang Kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda. (Makalah pada Mukernas Sejarah XII). Medan : Penyelenggara Jurusan Sejarah. Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara. Hlm. 3.

2. Supardi Raponai, Samsuar Said dan H. Hutasuhut (peny). 1971. Praja Cshupa Vira (Ksatria Pelindung masyarakat): Irian Barat dari masa ke masa. Djayapura. Sejarah Militer Kodam XVII / Tjendrawasih. hlm. 33.

dirikan oleh anggota IPEA di Melbourne (Australia) pada tanggal 29 September 1945, sebulan setelah kemerdekaan. Adapun tujuan dari organisasi ini adalah membela dan mempertahankan proklamasi '45, dan juga bertugas memulangkan orang-orang Indonesia ke tanah airnya dengan menolak campur tangan Belanda".³ Dengan demikian KIM yang didirikan di Jayapura merupakan lanjutan dari KIM di Australia. Dalam perkembangannya KIM di Jayapura diketuai putra daerah setempat ialah Marthin Indey. Perlawanan rakyat lainnya juga sering dilakukan dalam bentuk kargo atau kebatinan (gerakan sosial), misalnya gerakan koreri, gerakan Kasyep, gerakan Simson dan lain-lain. Berdirinya KIM di Jayapura diikuti oleh organisasi Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) yang didirikan di Serui pada tanggal 29 November 1946 dan diketuai oleh Silas Papare. Dan Golongan politik inilah yang paling besar dan paling aktif di Irian Barat.⁴

Di Manokwari berdiri organisasi Gerakan Merah Putih (GMP) yang diketuai oleh Petrus Wattedosy. Di Sorong berdiri organisasi Perintis Kemerdekaan yang diketuai oleh Sangaji Malam. Di Biak berdiri cabang KIM yang kemudian berubah namanya Partai Indonesia Merdeka (PIM) dibawah pimpinan Lukas Runkorem dan masih banyak lagi organisasi lainnya.

Dalam situasi yang demikian muncullah patriot-patriot bangsa, akhirnya tercatatlah sederetan nama-nama yang dalam hal ini oleh Pemerintah Republik Indonesia telah diangkat sebagai Pahlawan Nasional, dan salah satunya adalah Marthin Indey, seorang putera terbaik bangsa Indonesia yang berasal dari Irian Jaya.

Marthin Indey adalah seorang yang berjiwa pejuang yang terus memperjuangkan keutuhan wilayah Republik Indonesia yang tercinta. Kedatangannya di Ambon pada tanggal 7 Januari 1947 dalam rangka memperjuangkan daerah, melalui pertemuannya dengan para tokoh Maluku yang pro Indonesia. Ternyata pada tanggal 23 Maret 1947 Marthin Indey ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda

3. Bondan Soedharto MP. *op. cit.* him. 39.

4. Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat. 1986. *Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat*. Jakarta. him.69

kemudian dijatuhi hukuman penjara 4,5 tahun bersama-sama dengan rekan seperjuangan lainnya.⁵

Marthin Indey adalah seorang pejuang handal dan tanpa pamrih. Sikap patriotisme dengan kerelaan berkorban menjadi ciri khas perjuangan Marthin Indey.

1.2 Tujuan Penelitian

Berangkat dari kriteria kepahlawanan seperti yang telah ditentukan, yang didalamnya terkandung semangat dan nilai-nilai edukatif dan inspiratif, maka tidak dapat disangkal betapa pentingnya penulisan Biografi Pahlawan Nasional Marthin Indey. Hal ini karena Marthin Indey telah berjasa besar kepada nusa dan bangsanya. Tindakan serta sikap yang diperankannya mencerminkan pribadi yang harus menjadi suri tauladan yang penting untuk disajikan serta disebarakan secara luas, terutama dikalangan generasi penerus.

Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa di dalam penulisan Biografi Pahlawan Nasional Marthin Indey sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun, dan dalam upaya mengisi kemerdekaan. Hal ini juga karena seluruh aktivitas Marthin Indey tidaklah terlepas kaitannya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa di tingkat lokal atau daerah. Karenanya penulisan ini kiranya merupakan upaya mengisi muatan lokal khususnya tentang perjuangan Marthin Indey dan rakyat Irian Barat.

Dengan kata lain penulisan Biografi Pahlawan Nasional Marthin Indey dapat diharapkan mengisi muatan lokal. Selain itu kiranya dapat menjadi kebanggaan daerah sekaligus nasional, karena integritas Marthin Indey telah tercurah untuk nusa dan bangsa.

1.3 Ruang Lingkup

Mengikuti akan kelaziman penulisan sebuah biografi, maka ada keinginan supaya ruang lingkup kajian penulisan Biografi Pahlawan Nasional Marthin Indey akan disajikan secara utuh dan sesempurna

5. Ny. M.A. Indey. Wawancara tanggal 4 September 1995.

mungkin. Akan tetapi berhubung karena adanya berbagai kendala yang tak terhindarkan, maka kajian ini dibatasi hanya pada uraian-uraian yang kurang memadai yang meliputi tentang asal-usul, pendidikan, riwayat pekerjaan, sepak terjang dalam perjuangan dan keadaan di masa akhir hidupnya. Sedangkan tuntutan uraian yang mencerminkan karakter seorang tokoh yang utuh belum dapat disajikan secara sempurna.

Namun demikian untuk dapat sedikit menghidupkan suasana dan alur kehidupan Marthin Indey, uraian ini tidak akan lupa menengok tanah tempat kelahiran serta gambaran mengenai adat tradisi masyarakat tempat Marthin Indey dilahirkan dan dibesarkan. Juga untuk membangun hubungan dengan situasi Zaman uraian akan menyinggung usaha-usaha Pemerintah republik Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat. Karena di dalam aktivitas ini Marthin Indey turut memberikan andil yang besar dalam menentang Kolonialisme dan Imperialisme Belanda.

1.4 Metode Penulisan

Dengan berpegang pada kaidah ilmu sejarah, maka penulisan Biografi Pahlawan Nasional Marthin Indey dilakukan dengan metode pengumpulan, penyeleksian, penganalisaan dan penulisan. Dalam usaha mengumpulkan data telah dilakukan antara lain Studi Kepustakaan:

- Untuk pengumpulan data kepustakaan ini dilakukan penelitian pada buku-buku, majalah, koran, brosur, dokumen (dokumen resmi atau pribadi) yang disimpan oleh keluarga (saudara, anak dan isteri).

Wawancara:

- Untuk kegiatan ini dilakukan wawancara dengan isteri dan anak. Dan data-data yang telah terkumpul dilakukan pengujian (seleksi) dan selanjutnya dilakukanlah penulisan.

1.5. Sistematika Laporan

Laporan hasil penelitian ini disajikan dalam lima bab, yaitu :

- BAB I : Pendahuluan
Bab ini memuat uraian tentang Latar Belakang Masalah dan Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian/ Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Laporan.
- BAB II : Latar Belakang Budaya
Bab ini menguraikan tentang Letak dan Keadaan Geografis, dan Sistem Kekerabatan.
- BAB III : Marthin Indey dalam Mengikuti Pendidikan dan Pekerjaan. Bab ini menguraikan tentang Pendidikan dalam Keluarga, Pendidikan Formal, serta Meniti Pekerjaan dan Membina Keluarga
- BAB IV : Marthin Indey menyambut Kemerdekaan
- BAB V : Peran-peran Marthin Indey dalam arus sejarah



BAB II

LATAR BELAKANG BUDAYA

2.1 Letak dan Keadaan Geografi

Marthin Indey lahir di kampung Doromena, di kaki pegunungan Cycloop Jayapura pada tanggal 16 Maret 1912. Ia adalah putera dari seorang Ondoafi bernama Indey. Nama sebenarnya adalah Soroway Indey, namun ia mendapat nama baptis “Marthin” dan lebih dikenal dengan nama Marthin Indey.

Secara administratif kampung Doromena termasuk dalam wilayah kecamatan Depapre kabupaten Jayapura. Kecamatan Depapre terletak kurang lebih 70 kilometer di sebelah utara kota Jayapura. Hubungan antara kota Jayapura dengan kecamatan Depapre dapat ditempuh dalam waktu 2 (dua) jam untuk kendaraan bermotor sedangkan dengan kapal laut ditempuh dalam waktu 3 (tiga) jam.

Panorama daerah Depapre sangat indah. Daerah Depapre terletak di Teluk Tanah Merah serta di apit oleh dua pegunungan yaitu pegunungan Cycloop dan pegunungan Dafonsoro. Dalam Teluk Tanah Merah terdapat kampung-kampung yang di diami oleh penduduk dari orang Mungkei (kampung Kendate), orang Tabla (di kampung Tablanusu; kampung Tabla Waunu; kampung Tablasupa), orang *Yewena* (kampung Yapase; kampung Wambena;

kampung Dornmena). Demikian kampung Doromena terletak di Teluk Tanah Merah di kaki pegunungan Cycloop.

Kampung-kampung seperti yang telah di uraikan di atas terdapat di sepanjang pinggiran pantai Anapie. Ibukota kecamatan Depapre terletak juga di tepi pantai Teluk Waiya.

Kecamatan Depapre dengan batas wilayah sebagai berikut : sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sentani, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Demta, sebelah utara berbatasan dengan Kota Jayapura. Kecamatan Depapre berada pada posisi 02^o,28' Lintang Selatan dan 140^o,22' Bujur Timur dengan 2 luas wilayah seluruhnya 680 km. Beberapa data dari Meteorologi Jayapura menunjukkan bahwa daerah Depapre beriklim tropis dengan keadaan suhu maksimum pada siang hari 32,2°C dan suhu minimum pada siang hari 23,0°C sehingga temperatur rata-rata untuk daerah Depapre dan sekitarnya 27,6°C. Seperti daerah-daerah lain di Irian Jaya, maka di daerah Depapre pun tidak terdapat musim yang tetap. Walaupun demikian, di antara bulan Desember sampai April angin sering bertiup ke arah darat sedangkan pada bulan Mei sampai November berangin bertiup dari arah Tenggara. Dengan bertiupnya angin ke arah darat menyebabkan banyak turun hujan dari bertiupnya angin dari arah tenggara sehingga keadaan musim di daerah Depapre dan sekitarnya beriklim tropis basah yang rata-rata curah hujan setiap bulan lebih besar dari 200 milimeter.

Pegunungan Cycloop dan pegunungan Dafonsoro yang terletak di sebelah Timur daerah Depapre merupakan sumber penyebab curah hujan di daerah ini. Sebab pada musim angin bertiup dari arah Barat Laut yang terjadi antara bulan Desember dan April, luapan di bawah dari Samudera pasifik di daerah pegunungan berubah menjadi hujan. Curah hujan rata-rata pertahun adalah 3276 mm. Daerah Depapre di apit oleh dua pegunungan yaitu pegunungan Cycloop dan pegunungan Dafonsoro, dan secara geografis daerah ini berada pada Zone utara Irian Jaya, dengan demikian topografinya bergunung-gunung. Keadaan demikian menyebabkan pemukiman penduduk selalu terdapat di dataran teluk di tepi pantai Tanah Merah.

Daerah Depapre merupakan daerah hutan lebat dengan mempunyai pohon-pohon besar dan kecil. Di hutan-hutan lebat terdapat pohon-pohon kayu seperti kayu jati (*Tectona grandis*), kayu matoa (*Prometia*), kayu besi (*Intsia bijuga*) dan lain-lain dan ada pula tumbuhan seperti pohon kelapa, nangka dan mangga.

2.2 Sistem Kekeabatan

Seperti halnya kebanyakan suku bangsa di Irian Jaya, masyarakat Depapre mempunyai susunan kekeabatan berdasarkan asas keturunan melalui garis laki-laki (asas patrilineal), merupakan kelompok penting dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat. Tetapi di samping itu tiap individu juga mempunyai sangkut paut dengan kaum kerabatnya dari pihak ibu mengenai bermacam-macam hal tertentu.

Kesatuan sosial terkecil adalah berbentuk keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum kawin, ditambah dengan kaum kerabat lain seperti orang tua laki-laki atau orang tua dari pihak ibu, termasuk saudara baik dari pihak Ayah maupun dari pihak Ibu yang belum kawin. Demikian satu rumah di diami oleh tujuh atau delapan orang.

Seperti apa yang diuraikan di atas orang Depapre juga mengenal dua fungsi hubungan kekeabatan dalam masyarakat yaitu: (1) keluarga inti merupakan kelompok dimana si individu pada dasarnya dapat menikmati bantuan utamanya dari sesamanya serta kesamaan dalam hidup, (2) keluarga inti merupakan kelompok dimana si individu itu waktu ia sebagai kanak-kanak masih belum berdaya, mendapat pengasuhan dan permulaan dari pendidikannya.

Kesatuan sosial yang lebih besar dari kesatuan keluarga (lebih) batih yang dikenal yang dalam masyarakat Depapre adalah marga. Anggota-anggota dari marga yang sama biasanya merasa bersatu dan saling bantu membantu dalam menghadapi berbagai persoalan baik yang berhubungan dengan marganya sendiri maupun dengan marga lain. Selain uraian tersebut hubungan adapula kekeabatan dari aktivitas yang berpusat di sekitar rumah tangga

seperti upacara perkawinan, kematian, membangun rumah dan sebagainya dimana semua kerabat Ibu dan Ayah turut hadir dan berpartisipasi ikut membantu dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekitar rumah tangga.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, perlu dijelaskan istilah kekerabatan dalam bahasa Depapre yang mengandung banyak klasifikasi.

Apabila di perhatikan istilah-istilah yang digunakan untuk menyapa seseorang kerabat tertentu, maka nampak bahwa di dalam sistem pengklasifikasian kerabat adalah sebagai berikut: Sebutan untuk ayah-ayah (kakek) adalah Sese, sama dengan sebutan yang digunakan untuk ayah Ibu.

Sebutan untuk Ibu-ibu dan ibu ayah (nenek) adalah Kemen. Sebutan untuk ayah adalah Mamai, sebutan untuk Ibu adalah Namen. Sebutan untuk saudara laki-laki ayah maupun saudara laki-laki ibu adalah Mayalese, sedangkan untuk anak-anak dari saudara baik dari pihak ayah maupun saudara dari pihak ibu dengan istilah yang sama yaitu Matona.

Sebutan untuk isteri adalah Yarse Miro, sedangkan untuk adik kakak baik perempuan maupun laki-laki dengan istilah yang sama yaitu Yeyarse, sedangkan sebutan untuk suami dari saudara perempuan adalah Norodo.

Sebutan untuk anak laki-laki dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan sebutannya sama yaitu Do Yeyarse, untuk anak perempuan dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan yaitu Yeyarse. Untuk anak laki-laki Doyei, sedangkan anak perempuan Yemire. Sebutan untuk cucu laki-laki adalah Sese, untuk cucu perempuan Kemen.

Sistem klasifikasi kerabat yang di anut oleh orang Depapre seperti yang diuraikan di atas ini oleh Koentjaraningrat di kelompokkan menurut pembagian Murdock adalah termasuk tipe Eskimo.

BAB III

MARTHIN INDEY PENDIDIKAN, PEKERJAAN DAN KELUARGA

3.1 Pendidikan

Kaum cendekiawan Irian Jaya umumnya mempunyai kebanggaan tersendiri terhadap peranan nenek moyangnya dalam membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain dan dalam memajukan Irian Jaya. Hidup yang terpencil menyebabkan suku Irian sampai tidak dapat menikmati kemajuan-kemajuan teknik di dunia, kecuali yang hidup di pantai-pantai dimana mereka sudah mempunyai hubungan dengan dunia luar dan dalam kehidupan sehari-hari mengenakan pakaian dan bekerja pada perusahaan-perusahaan modern seperti bangsa-bangsa lain di tempat lain di dunia. Suku Irian yang hidup di pedalaman terutama yang tinggal di Pegunungan Sentral masih memakai alat-alat sederhana seperti kapak batu, pisau dari bambu, jarum dari tulang burung kasuari dan rumah siput sebagai alat tajam. Mereka dalam keadaan terpencil dapat, mengetahui kesukaran-kesukaran yang disebabkan oleh lingkungan alam yang tidak memudahkan kehidupan manusia.

Di kampung Doromena di kaki pegunungan nafonsoro (Cyclops) Jayapura kampung yang masih sangat sederhana lahirlah seorang pejuang yang gigih dalam membebaskan Irian Jaya dari penjajah Belanda. Ia adalah Marthin Indey. Marthin Indey lahir pada

16 Maret 1912. Marthin Indey dilahirkan dari keluarga yang cukup mampu (golongan sura). Si kecil Marthin sejak kecil telah memperlihatkan kecerdasannya dan keberaniannya. Bila bermain dengan kawan-kawannya selalu menjadi panutan, sehingga jiwa kepemimpinannya sudah nampak sejak kecil.

Nama Indey diberikan oleh keluarganya sejak di lahirkan, sedang nama Marthin Indey ada kaitannya dengan datangnya misionaris yang datang ke Doromena. Johannes Bremer laki-laki Ambon asli dari kampung Calalar Ambon yang banyak mempengaruhi kepribadian Marthin Indey. Johannes Bremer adalah bapak angkat Marthin Indey. Ia adalah guru yang ditunjuk oleh zending Belanda untuk menyebarkan agama Kristen di Doromena. Johannes Bremer bersama isterinya atau (nyora: dalam logat Melayu Ternate Tidore) tiba di Doromena pada 12 Juni 1906. Mereka ditampung di rumah *ondoaft* Indey yang kemudian berhasil membaptis keluarga Indey dengan nama Habel. Dalam keluarga Habel Indey inilah pendidikan baca tulis dan kitab suci untuk murid-murid yang umumnya sudah dewasa diajarkan, begitu juga ibadah mingguan. Berkat usaha yang gigih dari Johannes Bremer akhirnya masyarakat di Doromena berhasil membangun sebuah gereja sederhana di tanah Marga Ofide.

Johannes Bremer dan istrinya lebih dari sepuluh tahun lamanya tinggal di Doromena dan pada pertengahan tahun 1920-an ia pulang ke Calala, Ambon untuk digantikan oleh A. Nanuilata. Namun sebelum pulang, pada waktu cuti Nyora Bremer sudah membawa beberapa orang anak Doromena ke Ambon untuk dididik sebagai anak angkatnya. Anak-anak yang dibawa adalah bocah Sorowai, Indey yang kemudian dibaptis menjadi Marthin Indey, Karel Indey, Ruban Mentanawai, Inkas Abisay dan seorang nona kecil Naomi Apiserai. Di Ambon inilah masa kecil Marthin Indey dihabiskan.

Hidup dalam lingkungan keluarga Kristen yang kuat telah membentuk jiwanya untuk selalu taat dan patuh untuk menjalankan ajaran agama, meskipun demikian kehidupan beragama yang diterapkan masih bersifat tradisional dan diliputi oleh kebekuan dan kekolotan. Ajaran agama belum dirasakan sebagai sumber dinamika dan kemajuan dalam hidup dan kehidupan masyarakat. Sumber

dinamika dan kemajuan dirasanya terletak pada faktor interaksi dan budaya dengan masyarakat bangsa lain. Itulah sebabnya yang menjadi dasar motivasi untuk lebih maju baik di kalangan pria maupun wanitanya yang secara moral sangat membantu dan bermanfaat bagi generasi mudanya disamping rasa keagamaan juga duniawinya.

Pendidikan berdasarkan sistem Barat yang pertama kali di laksanakan di Kepulauan Maluku Tengah, terutama dikaitkan dengan penyebaran agama Kristen. Sekolah yang pertama didirikan oleh orang-orang Portugis adalah di negeri-negeri yang penduduknya memeluk agama Kristen. Ketika orang-orang Belanda mengambil alih kekuasaan orang-orang Portugis diperkirakan jumlah sekolah-sekolah yang ada di Ambon sebanyak 31 sekolah dan di Kepulauan Lease 26 sekolah.

Selama dua dekade orang-orang Belanda meneruskan saja apa yang telah berjalan di sekolah-sekolah, karena sebagai kongsi dagang VOC kurang melibatkan diri dalam kegiatan pendidikan dan menyerahkannya saja kepada gereja. Baru kemudian disesuaikan dengan tujuan, isi, proses dan pihak-pihak yang terlibat didalam kepentingan VOC misalnya pengembangan agama Kristen Protestan melalui pendidikan sebagai sarana untuk membina dan meningkatkan loyalitas penduduk pribumi kepada penguasa baru yaitu orang Belanda.

Anak-anak umumnya masuk sekolah, ketika ujung jari kanan sudah mencapai telinga kiri bila lengan kanannya dilengkungkan di atas kepalanya, ketika itu dianggap sudah mencapai usia sekolah. Sebagai anak yang berasal dari kalangan rakyat biasa Marthin Indey memasuki *Volkschool* (Sekolah Distrik). Begitu juga keponakannya Karel. Karel adalah anak yang patuh dan ingin mengikuti profesi ayah angkatnya dan ingin melanjutkan sekolahnya ke Depok untuk menjadi guru. Setamat dari Depok ia masih meneruskan pendidikan lagi di ODO (*Opleiding Voor Dorpzonderwijzen*) di Mieï, Wandormen Irian Barat. Berkat ketekunannya, Karel berhasil menjadi guru di Hollandia, Kawanua. Hal ini lain sekali dengan Marthin Indey. Ia adalah anak yang nakal dan suka berpetualang, sehingga ia tidak betah tinggal di ruangan

(kelas). Marthin Indey tidak senang proses belajar mengajar dengan penekanan pada pengajaran agama, misalnya pelajaran membaca, menulis dan bernyanyi selalu dikaitkan dengan ajaran agama. Sebagian besar murid telah berhasil menyelesaikan pelajarannya yaitu tentang *catechismus* dan dapat membaca dan menulis secara sederhana. Namun demikian akhirnya Marthin Indey berhasil menyelesaikan Sekolah Distriknya pada tahun 1926.

Kondisi pendidikan di Ambon pada waktu itu sangat besar pengaruhnya. Masyarakat pribumi yang beragama Kristen sehari-hari menggunakan bahasa daerah, bukan bahasa Melayu sehingga pengertian mereka tentang materi kurikulum sangat terbatas. Mereka di sekolah lebih banyak menghafal daripada mendapatkan pengertian. Walaupun demikian ternyata bahwa sekolah merupakan suatu saluran yang sangat penting untuk menggantikan bahasa-bahasa daerah dengan bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa pergaulan bagi orang-orang Ambon yang beragama Kristen.

Jiwa petualang dan kondisi alam berupa pulau-pulau merupakan tantangan bagi Marthin Indey untuk menjadi seorang pelaut. Setamat dari Sekolah Distrik, ia sering mengikuti pelayaran-pelayaran ke luar kota Ambon, maka bersama sejumlah pemuda Ambon, Marthin Indey yang pada waktu itu masih menggunakan nama family angkatnya Bremer, mendaftar dan diterima disekolah Pelaut Pribumi atau *Kweekschool voor Inlandshe Schepelingen*, (KTS) di Makassar. Marthin Indey mengikuti pelajaran teori sampai akhir 1932, sesuai kurikulum sekolah pelayaran setelah selesai teori maka pelajaran praktek dengan mengadakan pelayaran dengan kapal pelatih *De Zeven Provineien* yang berpangkalan di Surabaya. Kawan-kawan Marthin Indey di sekolah pelayaran sebanyak 80 siswa.

Karena banyak berkumpul dengan kawan-kawannya sehingga terbukalah pikirannya, setamat dari Sekolah Pelayaran Pribumi, Marthin Indey tertarik untuk menjadi Polisi. Pada bulan Juni 1934, dengan tekad bulat ditinggalkannya kampung halaman dan kedua orang tuanya untuk menuntut ilmu di Pulau Jawa. Marthin Indey mendaftarkan diri di Sekolah Polisi Sukabumi, Jawa Barat dan

diterima. Pendidikan polisi diikuti sampai tamat dan selesai pada tahun 1935. Melihat kondisi alam yang masih berupa hutan lebat Marthin Indey mengambil pengkhususan bidang spionase yang kelak membuatnya banyak berjasa bagi Sekutu dan Belanda sebelum dan pada saat perang dunia ke II berkecamuk di Irian Barat.

Pendidikan pelayaran di Makasar dan Surabaya dan ditunjang dengan Sekolah Polisi di Sukabumi telah membuat Marthin Indey menjadi prajurit yang tangguh dan tanggap terhadap lingkungannya sehingga ia disegani dan dihormati. Van Der Plas bekas Gubernur Jawa Timur mengirim Marthin Indey ke Australia bersama kawan-kawannya sebanyak 32 orang. Bulan Juli 1943 rombongan diberangkatkan dari Tanah Merah, Digul, ke Brisbane Australia dan kemudian ke Cans. Selama di Australia statusnya adalah tentara Sekutu, sehingga hasil dari latihan ini digunakan untuk kepentingan Sekutu. Bersama-sama tentara Sekutu di Australia Marthin Indey dan kawan-kawan dilatih terjun payung antara lain di Cans, Portmoresby, Einshaven, Bogaiville dan Goodenaf. Dari Goodenaf mereka didrop ke Kotabaru, Biak, Numfor dan Wandamen, dan bersama-sama tentara Sekutu mengadakan pendaratan di Admiralty.

Pada tanggal 20 April 1944 Marthin Indey diterjunkan di Kotabaru dan dilanjutkan pendaratan di Biak, Numfor, Sansufor, Morotai dan terus ke Philipina. Pendidikan di Australia dan Philipina diselesaikan sampai tahun 1944 kemudian kembali ke Kotabaru. Pangkat militernya dinaikkan menjadi koprал.

3.2 Pekerjaan

Pandangan-pandangan dan pernyataan-pernyataan mengenai kepribadian suku Irian bersimpang siur. Bagi orang Eropa yang menilai keadaan seseorang dengan ukuran-ukuran sosial yang berlaku di negerinya, dimana terdapat gedung-gedung batu, pesawat terbang, kereta api dan lain-lainnya yang merupakan hasil peradapan modern, suku Irian dalam pandangannya merupakan contoh dari suku bangsa yang terbelakang, yang kadang dianggap sebagai suku yang terbelakang tidak mempunyai kesopanan bahkan ada yang menganggap mereka masih biadab karena mereka tidak mengenakan

pakaian seperti mereka sendiri. Pandangan berdasarkan sikap di atas telah dianggap salah dalam pandangan ilmu Antropologi Budaya karena sikap itu hanya didasarkan pada prasangka-prasangka yang timbul karena manusia hanya dapat berpikir menurut ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakatnya. Kemajuan budaya suku Irian dibuktikannya dengan adanya hasil karya yang sangat tinggi nilainya.

Kepribadian dan tingkah laku bisa juga dipengaruhi oleh kondisi alam dan kehidupan sehari-hari dalam keluarganya. Keluarga Marthin Indey adalah termasuk keluarga yang sederhana. Hal ini membuat Marthin Indey harus hidup dalam kondisi yang sederhana bersama ayah angkatnya. Sejak kecil sambil bersekolah ia sering membantu ayah angkatnya bekerja di rumah. Ketekunan dan rajin dalam membantu orang tuanya telah membawa manfaat yang besar bagi hidupnya. Marthin Indey bisa menjadi tukang kayu dan batu. Dengan kondisi kehidupan yang sederhana maka cita-cita untuk menjadi pegawai tidak ada sejak kecil. Untuk mengisi waktu senggang setelah sekolah Marthin Indey bekerja sebagai tukang di Dinas Pekerjaan Umum (Burgerlyk Openbaar Werken (BOW)) di Ambon. Setelah menamatkan pendidikan di Sekolah Standard, ia konsentrasikan pikirannya pada pekerjaannya di BOW. Selama bekerja Marthin Indey sering ikut membangun rumah-rumah dan perkantoran, sampai kota-kota lain seperti di Ambon, Saumlahi, Banda Neire dan Fak-fak, Irian Barat yang berada di bawah residen Ambon waktu itu. Bekerja di BOW ditekuni sampai tahun 1932.

Setelah lulus dari Sekolah Pelayaran di Makassar dan Surabaya, Marthin Indey bekerja sebagai awak kapal dari Kapal *Zeven Propintie* (Kapal Tujuh) dari Angkatan laut Hindia Belanda. Profesi sebagai awak kapal dijalani dari Januari 1933 sampai dengan Maret 1933. Pada bulan Pebruari 1933 Marthin Indey dan kawan-kawan mengadakan pemogokan total menuntut kenaikan gaji dan membawa lari kapal *Zeven Propintie* pada tanggal 3/4 Pebruari 1933 dari Surabaya ke Selat Sunda. Akhir terjadi kejar-kejaran dengan kapal pemburu Belanda Kapal Piet Hein dan Kortemaar. Kapal Tujuh mendapat serangan bom pada 10 Pebruari 1933 diantara laut Indonesia dan laut Jepang tepat mengenai dek kapal tempat berkumpulnya para kepala-kepala yang sedang berunding.

Diantaranya 21 orang kena bom dan 6 mati. Orang-orang yang mati dibuang di Pulau Onrust dalam satu lubang dan lainnya dibawa ke Surabaya, termasuk Marthin Indey. Dari yang tertangkap para kelasi mendapat hukuman bervariasi dari 6 -- 18 tahun sedangkan para siswa hanya dihukum dari 5--6 tahun. Dalam drama ini Marthin Indey hanyalah ikut-ikutan saja sehingga pada waktu masuk sekolah polisi di Sukabumi dapat diterima.

Marthin Indey setelah menyelesaikan pendidikan Polisi di Sukabumi Jawa Barat pada bulan Desember 1934 diangkat sebagai Agen Polisi Klas II dan ditempatkan di Ambon yang meliputi daerah Mimika, Irian Barat sebelah selatan dan Banda Neira, Maluku. Bekal petualang sejak kecil membuatnya terbiasa untuk turne di daerah yang sulit dan penuh tantangan. Untuk itulah maka Marthin Indey mendapat kepercayaan untuk memimpin anak buahnya sewaktu mengadakan turne-turne ke daerah.

Selama bertugas yang membuat terkesan adalah sewaktu ia dan kawan-kawannya berhasil menaklukkan perkampungan suku Asmat yang terbesar. Suku Ayam yang merupakan bagian dari suku Asmat berpenduduk kurang lebih 2000 jiwa, ini termasuk perkampungan terbesar di Irian. Pada waktu itu polisi-polisi Ambon berusaha menaklukkan orang-orang Ayam yang selalu menyerang Mimika. Polisi-polisi Ambon berusaha untuk mengadakan serangan balasan ke suku Ayam dengan peralatan yang cukup lengkap seperti senapan. Usaha tersebut tidak berhasil mematahkan perlawanan orang-orang Ayam yang telah menguasai daerah tersebut. Orang-orang Ayam dengan penuh semangat menyerang polisi-polisi Ambon.

Kegagalan-kegagalan yang selalu ditemui akhirnya Marthin Indey menemukan strategi bagaimana agar antara suku Asmat (Ayam) dengan polisi-polisi yang ada dapat hidup saling berdampingan dan tidak timbul peperangan yang lebih parah. Marthin Indey menyelinap masuk ke daerah suku Asmat masuk ke perkampungan Ayam dengan telanjang seperti mereka. Setelah berhasil masuk Marthin Indey berunding dengan kepala-kepala perang mereka. Hasil pertemuan itu akhirnya suku Asmat bersedia hidup berdampingan dan tidak akan menyerang Kakanao (Mimika).

Keberhasilan menaklukkan suku Asmat pada akhir 1935, Marthin Indey dipindahkan tugasnya ke Manokwari. Manokwari terdiri dari daerah yang terletak di antara Tanjung harapan Biak dan Sungai Wapoga yang dibawah seorang Gezaghebber Pemerintahan Dalam Negeri dengan kedudukan di Manokwari. Manokwari merupakan daerah *Onderafdeiling* Residensi Ternate, residensi Ternate sendiri terdiri dari 12 onderafdelling yaitu: Ternate, Jailolo, Weda, Tobelo, Bacan, Pulau Sula-sula, Sorong, Pulau-pulau biak, Gugusan pulau-pulau Yapen, Jayapura (Hollandia), Irian Barat, dan Manokwari.

Pada bulan Desember 1935, Marthin Indey mulai bertugas di Manokwari, ibarat pulang kampung. Selama bertugas di Manokwari melakukan turne sebanyak dua kali dan berhasil membuka daerah pemukiman baru di daerah Waropen Atas, Memberamo Tengah dan Waropenkai (Demba). Saat membuka Bivak Pionier di Memberamo merupakan kenangan yang tidak dapat dilupakan oleh Marthin Indey. Pada bulan Maret 1936 Marthin Indey telah melangsungkan pernikahan dengan gadis idamannya yaitu Agustina Heumasse seorang puteri asal Negeri Kamarian, P. Seram (Maluku). Pernikahan dilangsungkan di Manokwari. Baru sebulan menikah sang polisi harus berangkat lagi ke Demba, Waropenkei.

Tanggal 10 Januari 1937 baru setahun dinas di Manokwari, Marthin Indey pindah kerja di Serui. Dengan menggunakan kapal motor Reger Patrouville, Marthin Indey mengadakan ekspedisi. Beruntung sekali Marthin Indey telah mengikuti pendidikan pelayaran di Makassar dan Surabaya, sehingga dalam ekspedisi ini berhasil membuka pos Bivak Pionier Memberamo. Keahliannya dibidang pertukangan sangat membantu dalam ekspedisi, karena sangat membantu dalam membangun rumah-rumah baru di Memberamo. Daerah yang tadinya masih berupa hutan-hutan telah diubahnya menjadi perkampungan sederhana. Pembangunan kampung di Memberamo dikerjakan sampai April 1938.

Antara tahun 1938--1940, Marthin Indey sibuk melakukan perjalanan "memotong leher burung" dari pantai utara di daerah Napan (dekat Nabire, ibukota kabupaten Paniai sekarang ini) ke pantai

selatan di Mimika dan sebaliknya. Ekspedisi melintas danau-danau Paniai di ketinggian 1.600 meter itu dibuatnya sampai tiga kali, mengawal tiga kali ekspedisi Belanda yang mencoba merintis jalan dari pantai ke pegunungan untuk membuka isolasi daerah pedalaman Paniai yang dihuni suku Ekagi. Ekspedisi pertama dilakukan tahun 1938, mengawal Komisaris Polisi J.P.K van Feehoud. Atas jasanya mengikuti ekspedisi selama 8 bulan melintasi medan Pegunungan Tengah yang berat. Atas jasa-jasanya dalam mengikuti ekspedisi selama 8 bulan maka pada Oktober 1939 Marthin Indey menerima jasa *Trouw en Verdienste* dari pemerintah Belanda.

Ekspedisia kedua pada tahun 1939 juga dilakukan di daerah pedalaman Paniai, mengawal komisaris Polisi Van Krieken dan Inspektur Kepala CA. Harzen. Selanjutnya diawal tahun 1940 dia ditugaskan melanjutkan ekspedisi ke pedalaman Paniai bersama seorang insinyur Belanda dari Makasar untuk mengadakan studi kelayakan untuk pembangunan jalan dari Sungai Seruwo ke Wisselmer. Rombongan ekspedisi berangkat dari Ambon menuju Uta dengan kapal Motor Reger. Selanjutnya dari Uta naik kapal selama dua hari terus berjalan kaki sampai bivak oraya terus ke Enarotali (Paniai). Dari Paniai berjalan kaki menyusuri kali. Seruwo sampai keluar di Napan Wainame dan dilanjutkan dengan kapal laut menuju Ambon.

Menjelang meletusnya perang Pasifik, tepatnya dari bulan Juli 1940 sampai Januari 1941 Marthin Indey ditugaskan membantu Dinas Rahasia Belanda di Manokwari untuk mengamati gerak gerik Jepang di kawasan itu. Pada waktu itu tentara Jepang sudah mulai berkeliaran di bumi Irian Jaya dengan dalih bekerja di perkebunan kapas Jepang *Nanyo Kohatsu Kabushiki Kaisha* (NKKK) di daerah Ransiki Manokwari, Nabire, juga Semenanjung Wandamen serta pulau-pulau Room, Meoswar dan Rumberpon dan sekitarnya. banyak dibanjiri tentara Jepang yang menyamar sebagai nelayan. Ternyata Jepang telah menyiapkan Manokwari sebagai basis perang Asia Timur Raya. Ditengah-tengah perkebunan NKKK telah dibangun landasan pesawat terbang tempur dan ditanami kapal, untuk pakaian prajuritnya. Selain itu tentara Jepang sering secara diam-diam mengadakan upacara penguburan pada malam hari. Ternyata setelah digali kembali

pada waktu tentara Jepang pergi, lubang-lubang tersebut berisi amunisi, granat, meriam kecil, senapan mesin, peluru berbagai jenis. Marthin Indey dan kawan-kawan berhasil menggali dan menyita senjata-senjata itu untuk melawan Belanda nantinya.

Pada bulan Maret 1941 Marthin Indey pindah tugasnya ke Ambon dan terus ke Tanah Merah, Digul karena pada waktu itu pekerjaan militer di Digul diganti dengan Polisi Lapangan (*Vedpolitie*). Marthin Indey bekerja di Ambon sampai pecah Perang Dunia ke II. Ditempat tugasnya yang baru ini, Marthin Indey ditugaskan sebagai wakil komandan polisi jaga (*Tweede Posthuiscommandant*) yang mengepalai 31 orang polisi jaga asal Indonesia dari berbagai suku bangsa. Maksud penarikan militernya ke Ambon karena Belanda ingin mengkonsentrasikan pasukannya untuk menghadapi Jepang dan mengalihkan penjagaan para tahanan politik kepada Polisi Lapangan.

Selama menjalankan tugasnya sebagai spionase di daerah perbatasan, pemerintah Belanda mengangkat Marthin Indey menjadi kepala Distrik sekaligus atas tiga distrik perbatasan yaitu Arso, Yamasy dan Waris dimana dia sekaligus juga harus mengepalai pasukan tentara dan polisi. Jabatan rangkap setingkat camat, Dansek dan Danramil masa kini itu dipegangnya selama dua tahun yakni dari Januari 1945 sampai dengan Januari 1947. Walaupun bertugas jauh di daerah perbatasan yang hanya berhubungan dengan jalan setapak ke kota Hollandia, Marthin Indey tidak kehilangan hubungan dengan kawan-kawan seperjuangan di kota Nica, pusat pemerintahan, angkatan bersenjata, pendidikan dan politik pada waktu itu. Malah dia ikut mewarnai kubu politik di Nica meskipun tidak muncul sendiri sehingga Belanda belum mencurigai kegiatan politik Marthin Indey.

Karier terakhir Marthin Indey setelah Indonesia merdeka ialah diangkatnya Marthin Indey dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Propinsi Irian Barat, tertanggal 10 Agustus 1963 No. 06/1/1/TJP/63 sebagai Residen Kotabaru. Mulai bertugas dari 1 Agustus 1963 sampai dengan Agustus 1965. Selanjutnya mulai 1 Agustus 1965 diperbantukan di Kantor Gubernur KDH. Propinsi Irian Barat di Kota Baru. Selain itu dalam pangkat militernya pada tahun 1965 diangkat menjadi Mayor Tituler TNI-AD Kodam XVII Cendrawasih di Kotabaru.

3.3 Keluarga

Marthin Indey meskipun gigih dalam berjuang namun tidak lupa dengan kewajibannya dalam membina keluarga. Pada saat berjuang di daerah sekitar Paniai, Wandamen, dan Asmat pada bulan 30 Maret 1936, ia menikah dengan Agustina Heumasse. Pernikahan berlangsung di Manokwari. Pertemuan dengan gadis ini diawali ketika Marthin Indey mengantar saudaranya kembali ke Ambon setelah menghabiskan masa cutinya sebagai tentara di kampung Kamarian, Seram. Dari pertemuan inilah Marthin Indey tertarik untuk mengambil istri Agustina Heumasse. Berbekal surat jalan dan rekomendasi dari Kepolisian Ambon mereka berangkat menuju Manokwari dan melangsungkan pernikahannya.

Kebahagiaan sebagai pengantin baru tidak begitu lama dirasakan karena sang suami harus segera menjalankan tugas pada *Dienst Veld Politie* di Demba Waropenkai. Pengalaman ini ternyata merupakan pengalaman pertama dan terus dijalannya dengan tabah. Bahkan sampai istrinya keguguran dan hamil pertamapun Marthin Indey tidak sempat menengok. Baru pada waktu tugas ke Memberaino Marthin Indey menyempatkan diri untuk menengok istrinya yang sedang sakit.

Belum setahun tinggal di Demba Waropenkei Agustina harus menemani suaminya di tempat tugas barunya ke Serui sejak 1 Januari 1937. Selama menjalani tugasnya istrinya begitu tabah dan gigih mendukung perjuangan suaminya. Selama 14 bulan meninggalkan istrinya ternyata Agustina Heumasse telah melahirkan anaknya yang pertama. Namun anak pertama tersebut meninggal dunia sebelum diberi nama.

Keluarga yang dibina dengan onak dan duri perjuangan telah membuat mereka saling memahami. Ketika Marthin Indey mendapat tugas ke Australia pada tahun 1943 keluarga Marthin Indey dibawa semuanya. Agustina Heumasse memang seorang wanita biasa namun dia sebanarnya seorang tokoh yang ikut memainkan peranan dalam ketenaran suaminya. Selain sebagai ibu rumah tangga yang mengasuh kedua anaknya Frans Marcelino Charles Engelbert Indey dan Fikena Soroway Indey juga seorang yang aktif di berbagai kegiatan politik

antara lain Perwib (Persatuan Wanita Irian Barat) pada tahun 1963. Meskipun aktif dalam kegiatan politik namun tidak dilupakan pula kedudukannya sebagai ibu rumah tangga. Kejujuran dan cintanya yang utuh kepada almarhum Marthin Indey serta murah hatinya kepada semua orang yang berada dalam kesulitan dan keterjepitan membuatnya menjadi wanita yang cukup dinamis. Semenjak ditinggal suaminya Marthin Indey menghadap Tuhan, masa tuanya dihabiskan dari pensiunan di Jalan Pasar Baru, Polomo, Sentani. Meskipun hidupnya Marthin Indey selalu tidak lepas dari perjuangan dan keluar masuk penjara. Masuk penjara tidak hanya dialami ketika masa penjajahan Belanda saja tetapi pada saat Indonesia merdeka pun Marthin Indey terpaksa harus mendekam di dalam penjara karena dituduh terlibat dalam gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) pada tahun 1965, namun kasih sayang terhadap keluarganya masih terasa dan selalu diingat oleh anak-anaknya sebagai pegangan hidup. Untuk menghilangkan rasa sepi Agustina Heumasse hidup bersama cucunya yang masih sekolah. Untuk menambah biaya sekolah cucunya tersebut Agustina menyewakan rumahnya kepada pengusaha film.

BAB IV

MARTHIN INDEY MENYAMBUT KEMERDEKAAN

Kehadiran pemerintah kolonial Belanda di Irian Barat dari fakta yang ada pada tanggal 24 Agustus 1918 dan selanjutnya menggunakan kekuasaan dan pengaruh Sultan Tidore sebagai jalur untuk menanamkan pengaruhnya. Pada Juli 1828 penguasa kolonial Belanda pertama adalah A.J Van Delden yang dikirim oleh Gubernur Maluku dengan tugas membangun perbentengan bagi kesatuan militer Belanda di kaki gunung Lamanciri dengan bantuan penduduk asli. Penanaman kekuasaan Belanda di Irian Barat semakin nampak semenjak akhir abad XIX. Pada awalnya daerah Irian Barat diabaikan oleh pemerintah Belanda karena daerah ini tidak subur. Namun akhirnya Belanda pada tahun 1898 membagi daerah kekuasaan menjadi dua bagian kemudian menjadi tiga bagian. Perhatian Belanda di Irian Jaya tertuju pada daerah utara dan selatan yaitu Fak fak dan sekitarnya dan Merauke.

Bersamaan dengan perluasan jaringan Belanda maka terbuka kemungkinan bagi Belanda untuk mengamankan kepentingannya terutama yang bertalian dengan pembatasan kegiatan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Dijantung pulau Burung Raksasa, Irian Barat terletak Tanah Merah yang terisolasi dari dunia luar dan di tengah-tengahnya bersarang nyamuk-nyamuk malaria serta tantangan alam yang selalu mengancam setiap orang yang akan meninggalkan tempat ini atas inisiatif sendiri. Di Tanah Merah inilah diasingkan para perintis

kemerdekaan di kamp pengasingan (*interings kamp*) dengan maksud untuk meloyokan para pejuang.¹ Kita mengenal nama seperti Soekarno, Moh. Hatta, Sutan Syahrir, KM. Ahmad Chatib, R. Moh. Said dan kawan-kawan. Keterasingan dan siksaan yang dideritanya membuat fisik mereka lemah bahkan ada yang meninggal, namun semangat mereka tak kunjung padam. Mereka melanjutkan perjuangan secara lebih gigih setelah meninggalkan Tanah Merah sewaktu kembali ke Jawa. Digul dan Tanah Merahnya menunjukkan satu arti kesatuan perjuangan rakyat Indonesia, kesatuan wilayah dan ideologi perjuangan.

Kedatangan Belanda di Irian Barat dalam bentuk pemerintahannya sudah barang tentu hendak mewujudkan politik kolonial di daerah ini. Hal ini berarti pengembangan ide-ide pemerintah menurut citra mereka, penanaman norma-norma maupun pranata-pranata dalam masyarakat setempat. Kehidupan orang Belanda kurang memperhatikan kehidupan sekelilingnya, sehingga kehidupan mewah serta kemajuan dimonopoli orang Belanda. Sementara penduduk Irian Barat hidup dalam keadaan miskin dan kekurangan. Hal ini menimbulkan rasa kecemburuan sosial diantara warga Irian Jaya dengan orang Belanda.

Reaksi yang muncul akibat keadaan di atas berupa reaksi ekstrim dengan sikap agresif dan perbuatan yang tidak menentu ataupun reaksi ekstrim dengan sikap negatif yaitu menghindari kesengsaraan dalam dunia nyata dengan memusatkan perhatian kealam kebatinan.

Gerakan perlawanan terhadap orang Belanda di Irian Barat pada awalnya dimulai oleh adanya gerakan kebatinan yang ada. Gerakan-gerakan di sekitar kota Jayapura mulai sejak tahun 1925. Di daerah Nimboran, tepatnya di desa Genyem terjadi gerakan kebatinan *Kasyep*. Gerakan *kasyep* berintikan ajaran kemasukan roh nenek moyang yang mengajarkan tentang negara bahagia lengkap dengan tokohnya yaitu Johanis Gai dari desa Imeno. Selain itu ada gerakan Simson, Koreri yang intinya merupakan gerakan yang menginginkan datangnya ratu adil yang akan membawa kebahagiaan bagi rakyat Irian Barat.

Rasa memiliki dan nasionalisme bahwa Irian Barat adalah tanah tumpah darahnya dan tidak boleh dijajah oleh bangsa lain, tumbuh

pada saat Marthin Indey dan istrinya pada bulan Februari 1941 ketika dipindahkan dari Manokwari ke Tanah Merah. Marthin Indey ditugaskan sebagai komandan jaga, dimana ia sering memeriksa keadaan dan tindak tanduk para tahanan nasionalis dari Jawa yang dicap sebagai "komunis" oleh Belanda. Marthin Indey bebas keluar masuk kamp tahanan baik di Tanah Merah yang dihuni para tahanan dimana ia menerima bayaran untuk tugas-tugas dijalankannya, maupun di Tanah Tinggi yang dihuni para naturalis yang sama sekali tidak mau berurusan dengan penguasa Belanda dan hidup secara mandiri dengan alam bebas.

Pada saat itu polisi yang bertugas hanya boleh masuk dan bertemu dengan 1--2 tahanan sekaligus. Sebaliknya para tahanan dilarang berbicara dengan petugas keamanan. Kenyataannya Marthin Indey sering duduk bercerita dengan para tahanan. Sebagai wakil komandan jaga diaturnya tugas piketnya dengan anak buahnya, sehingga bisa selama seminggu berturut-turut tugas jaga malam kemudian minggu berikutnya tugas jaga siang. Pada awalnya tugas jaga itu dalam rangka memata-matai para tahanan, tetapi seringnya berkumpul membuat Marthin Indey tertarik dengan ide-ide dan cerita para tahanan. Dia mulai tidak setuju dengan perlakuan semena-mena dari penguasa Belanda terhadap dirinya dan saudara-saudaranya. Pertemuan dengan para tahanan telah membuka mata hati Marthin Indey tentang nasionalisme terhadap bumi pertiwi dan tumbuhnya kesadaran tentang negara yang berdaulat dan merdeka. Para tahanan Digul telah memberikan inspirasi yang luar biasa tidak hanya kepada Marthin Indey tetapi juga para pejuang Irian Jaya lainnya dalam rangka melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain.

Para tahanan itu antara lain Sukardjo seorang bekas Angkatan Laut asal Bandung, Sugoro Atmoprasodjo bekas guru Taman Siswa di Yogyakarta, serta seorang Tapanuli bernama Hamid Siregar bergelar Panggongcang Alam. Hamid Siregar ini akhirnya terlibat dalam pergerakan kemerdekaan di Jaya pura dan pernah dipenjarakan bersama-sama Marthin Indey dan pejuang lainnya.

Seiring dengan perjalanan waktu, Marthin Indey mengadakan rapat gelap dengan 31 anak buahnya untuk mengadakan penangkapan

terhadap orang-orang Belanda serta orang-orang Indonesia yang tidak setuju dengan rencananya. Yang menjadi sasarannya adalah Inspektur Polisi atasan Marthin Indey, kontroler Wagner dan seorang pastor Belanda. Menurut perhitungan Marthin Indey pasukan pendudukan Jepang pada tanggal 1 April 1942 sudah merebut kota Fak fak dan terus bergerak ke selatan dapat dimanfaatkan untuk menangkap orang-orang Belanda dan membebaskan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Sebab sejak awal Desember 1942 kapal-kapal, pembuatan torpedo Jepang sudah menuju Kokonao (Mimika) dimana pada awal 1943 ada 450 anggota marinir Jepang diterjunkan untuk membangun lapangan terbang. Tetapi sial karena diantara anak buahnya ada yang berkhianat sehingga rahasia terbongkar, sehingga terkena hukuman bersama-sama dengan para tahanan lainnya. Kolonialis Belanda tidak langsung mengasingkan Marthin Indey dan kawan-kawannya tetapi dengan cara licik mereka dikirim ke hutan Anida, Pesnamnam. Pada suatu hari ke-32 polisi termasuk Marthin Indey ditugaskan membangun bivak-bivak baru dengan membuka hutan di daerah Pesnamnam lebih ke hulu sungai Digul. Dinamakan Pesnamnam karena ditempat ini masih ada suku yang memakan manusia yaitu di Jair dan Mandobo. Tadinya tugas ini dikiranya, hanya sementara tetapi setelah istri dan anak Marthin Indey dikirim dengan perahu ke Pesnamnam sadarlah bahwa marthin Indey dan kawan-kawannya telah diasingkan secara halus.

Delapan bulan lamanya hidup di daerah pengasingan yang keras dan tidak bersahabat sehingga harus hidup berpindah-pindah (*nomaden*) dengan memakan umbut-umbut sagu, pinang hutan, kulit pohon ganemo dan memancing ikan bawon. Hidup yang tidak bersahabat akhirnya banyak juga para polisi yang masih bujang lainnya melarikan diri dengan menerobos hutan dan menyeberangi sungai. Mereka dapat bertemu dengan para misionaris Katholik asal Maluku Tenggara. Setelah 8 (delapan) bulan hidup dipengasingan, Marthin Indey ditugaskan lagi untuk memata-matai gerak maju tentara Jepang di daerah Asmat.

Jauh sebelum pecah Perang Pasifik orang-orang Jepang menyamar sebagai nelayan banyak berkeliaran di perairan Indonesia. Perahu-perahu yang digunakan Angkatan Laut Jepang untuk mengumpulkan

berbagai keterangan tentang kedalaman laut, arus air, keadaan pantai, teluk-teluk terlindung yang berguna bagi gerak-gerik Angkatan Laut Jepang. Setelah Jepang berhasil menduduki Manchuria dan Cina di kalangan Angkatan Laut Jepang timbul ide *nanshin road* gerak menuju selatan. Tujuannya untuk membebaskan dan menguasai daerah-daerah selatan agar kekayaan yang terkandung didalamnya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Gerakan *nanshin road* Jepang ternyata mendapat tantangan dari Amerika Serikat. Pada Mei 1940 Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Cordell Hull mengeluarkan pernyataan bahwa Amerika Serikat juga mempunyai kepentingan terhadap nasib kepulauan di Hindia Belanda. Setelah pangkalan Armada Pasifik di Pearl Harbour dilumpuhkan oleh serangan Jepang asal mula perang Pasifik maka bala tentara Jepang dengan mudah dapat menyerbu Hollandia (Irian Jaya) melalui teluk Yantefa pada 19 April 1942, mendarat di Pim dan Abe Pantai, boleh dikatakan tidak mendapat perlawanan berarti dari Belanda.

Menurut perkiraan Sekutu seluruh tentara Jepang di Hollandia berjumlah 2 regimen infantri ditambah satu regimen marinir. Di sekitar Sentani dibangun tiga buah lapangan terbang dan dipusatkan 300 buah pesawat terbang. Disekeliling lapangan terbang ditempatkan meriam-meriam penangkis serangan udara. Bivak-bivak, jembatan, pelabuhan seperti Hamadi, Apo dan Teluk Yantefa serta pelabuhan Hollandia dibangun. Hollandia merupakan tumpuhan pertahanan Jepang. Selain itu lapangan pertahanan juga dibangun di Manokwari dan Nabire.

Kerapuhan dan ketidaksiapan Belanda dalam pertahanan memudahkan Jepang menguasai daerah Irian Jaya. Hanya daerah pantai selatan (Merauke) kesatuan-kesatuan kecil Belanda dapat bertahan hingga akhir perang Pasifik. Selama Jepang menduduki Irian Jaya praktis daerah ini merupakan daerah perang, sehingga sendi-sendi kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya tidak menunjang perkembangan daerah ini. Jepang selama menduduki Irian Barat memfokuskan semua kegiatan penduduk Indonesia untuk kepentingan perangnya, maka dapat dimengerti kalau penduduk

pribumi Irian Barat kehilangan sebagian besar hasil kebunnya bahkan babi dan ayam piaraannya dibeli serdadu Jepang dengan paksa dan murah.

Akibat kehidupan yang semakin sengsara dan susah maka tergeraklah hati rakyat Irian Barat untuk melawan penjajahan Jepang. Meskipun perlawanan dilakukan dengan menjadi tentara Belanda atau Sekutu. Rakyat Irian Barat melakukan perang dengan sistem gerilya sehingga banyak merugikan Jepang. Tanggal 22--23 April 1944 tentara Sekutu mendarat secara serentak di Teluk Humboldt (sekarang Yos Sudarso) dan Teluk tanah Merah untuk menjepit pertahanan tentara Jepang di lapangan terbang Sentani sebelah selatan pegunungan Dafonsoro (Cyclops) Jayapura.

Marthin Indey yang waktu itu masih menjadi tentara Sekutu, bersama pasukannya berhasil merebut Wakde dekat Sarmi, Biak Sansofor, Morotai (Halmahera Utara) terus menyeberang ke Leyle, Philipina. Pada saat perang membantu Sekutu dari bulan Januari sampai Maret 1945 telah berhasil menghabiskan sisa-sisa tentara Jepang di Arso, Waris dan Sarmi. Sehingga hanya sampai tahun 1945 Jepang telah berhasil diusir oleh tentara Sekutu dengan dibantu oleh pasukan pribumi. Marthin Indey selama mengadakan pembersihan telah berkenalan dengan tokoh-tokoh asli Irian yang kemudian secara bersama-sama membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Mereka adalah Silas Papare, P. Corinus Marcellus Koreri Krey dari Pulau Biak, dan Samuel Kawab dari Bintuni Manokwari. Pertemuan dengan kawan seperjuangan telah menambah kesadaran untuk melepaskan negaranya dari penjajahan bangsa asing.

Karier Marthin Indey dalam lapangan politik sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1934, tetapi baru benar-benar dilaksanakan secara kontinu pada saat sesudah mendengar sayup-sayup sampai bahwa Indonesia termasuk juga Irian Jaya telah memproklamkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Kabar berita tentang kemerdekaan negaranya itu diterima seperti seorang petani yang sedang bermimpi digugah dewi dari Kahyangan. Marthin Indey segera meninggalkan pekerjaannya sebagai tentara Nica/Sekutu, terjun ke dalam masyarakat untuk merealisasikan cita-cita yang sudah sejak

bertahun-tahun terkandung di dalam khayalannya. menggerakkan masa untuk menentang politik kolonialisme Belanda yang sudah bercokol lebih dari 300 tahun di bumi Indonesia.

Perjuangan dilakukan dengan tidak memperhitungkan untung rugi bagi dirinya bahkan nasibnya sendiri termasuk keluarganya yang dibangun sejak menginjakkan kakinya di tangga rumah tangga di Manokwari. Kegiatannya telah menimbulkan sinyal-sinyal bagi pemerintah Belanda di daratan Irian Barat khususnya. Berbagai macam tuduhan yang dilemparkannya tiada mampu ketika menampar dada pejuang Marthin Indey ini tetapi sebagaimana biasa pemerintah kolonial di penjuru dunia, Belanda di Irian Baratpun menggunakan akal licik untuk mengasingkan dan menangkapnya kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Diasingkan dan dipenjarakan merupakan kawah candradimuka bagi Marthin Indey sehingga membuat dirinya matang dalam perjuangan dan matang dalam menyusun strategi. Tanah Merah yang begitu menakutkan merupakan markas pejuang-pejuang kemerdekaan tempat persemaian bibit serta arena untuk menguji ketabahan mental. Usaha pemerintah kolonial Belanda untuk memisahkan Marthin Indey beserta kawan-kawan seperjuangan tetapi tidak berhasil. Gagasan untuk menyempurnakan cara-cara berjuang dikonsolidir dengan pembentukan sebuah partai politik bersama-sama kawan-kawannya.

Sesudah Jepang berhasil diusir Sekutu dari Irian Barat maka Belanda kembali berkuasa. Puncak pemerintahan Belanda pada waktu itu tepatnya antara akhir 1944--1946 dipegang oleh seorang Jawa yang pro Belanda, Kol. R. Abdulkadir Widjoatmodjo. Ia adalah orang kepercayaan Gubernur Jenderal H.J van Mook. Meskipun sebagai tangan panjang Belanda tetapi Abdul Kadir berpikiran maju sehingga dibukalah suatu pusat pendidikan kilat di Nica untuk mengisi kekosongan pamong dan mantri di seluruh Irian Barat. Tanggal 1 Januari 1945 dibukalah sebuah *internaat* (asrama) khusus untuk pemuda-pemuda asli Irian yang direkrut dari berbagai daerah. Komplek kota Nica terdiri dari 12 barak dibuka kursus kilat pamong parja, kursus mantri dan sekolah sambungan untuk anak laki-laki (*Jongens Vervolgschool, JVS*). Kursus pamong praja yang diberi nama "sekolah bestuur" serta kursus mantri berlangsung 6 bulan.

Jabatan direktur internaat dipercayakan kepada seorang eks Digulis yang sudah lama dikenal oleh Marthin Indey yaitu Sugoro Atmoprasodjo. Sedangkan Corinus Crey disamping mengepalai poliklinik dan mengajar di kursus mantri juga ditugaskan mengajar di sekolah bestuur. Selain itu kemenakan Marthin Indey, Karel Indey diangkat sebagai guru JVS kota Nica. Meskipun tidak mendapat tugas mengajar masih ada tiga orang eks Digulis yang aktif dalam kegiatan ini, mereka adalah Hamid Siregar, Aron Panggoncang Alam dan Yusuf Nasution. Mereka semua terlibat dalam kegiatan bawah tanah untuk melawan Belanda dengan dipelopori oleh Sugoro Atmoprasodjo, Marthin Indey dan Corinus Crey. Mereka mengadakan kontak dengan anggota KNIL yang pro Indonesia dalam melakukan aksinya melalui Yusuf Nasution yang juga anggota KNIL.

Setiap malam setelah pukul 24.00 tengah malam Sugoro dan kawan-kawan secara diam-diam memantau siaran RRI Yogyakarta serta pemancar Komite Kemerdekaan Indonesia di Australia. Komite orang-orang Indonesia di Australia juga menerbitkan surat kabar "*Penyuluh*" yang diedarkan secara diam-diam oleh Sugoro, Marthin Indey dan Corinus Crey kepada siswa, guru dan pendukung-pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia di Nica dan sekitarnya. Untuk memudahkan kontak dan memperluas tentang ide Indonesia Merdeka dengan Sugoro dan siswa maka Frans Kasiepo, Lukas Rumkorem, Yan Waromi, Corinus Crey, Silas Papare, G. Saweri, Marthin Indey dan SD. Kawab membentuk Dewan Perwakilan Siswa.

Aksi terbuka dari kelompok Sugoro, Corinus Crey dan Marthin Indey direncanakan pada saat pergantian tahun 1945--1946. Hal ini dimaksudkan agar perencanaannya lebih matang dan berhasil. Rencana belum dijalankan ternyata sudah tercium oleh orang-orang Indonesia yang pro-Belanda, dan melaporkannya kepada komandan Batalyon Papua, Kapten JPK. van Eechoud. Dengan akal liciknya JPK. van Eechoud berusaha mengadu domba antara para pejuang dengan menghembuskan agitasi-agitasi yang berhubungan dengan agama. Dalam agitasinya diisukan bahwa orang Islam akan mengadakan penangkapan terhadap dan pembantaian semua orang Kristen pada hari Natal 25 Desember 1945. Agitasi tersebut termakan oleh laskar KNIL, yang sebagian besar tinggal di

Kloofkamp, Hollandia dan kebanyakan beragama Kristen datang mengadakan pembersihan di kota Nica yang jaraknya hampir 40 km dari tangsinya. Sasaran pembersihan adalah orang-orang Indonesia asal Jawa dan Sumatera. Mereka yang melawan langsung ditembak sehingga ada sekitar 9 orang gugur, 8 orang Indonesia dari luar Irian dan seorang putera daerah Irian.

Sementara itu pasukan Belanda juga melakukan operasi pada tengah malam 15 Desember 1945 dan menangkap Corinus Crey, Sugoro dan dibawa oleh Komandan KNIL, kapten Bloem langsung menghadap Van Eechoud. Setelah diperiksa secara ketat dan kejam akhirnya Sugoro dan Hamid Siregar ditahan sedangkan Corinus Crey dilepaskan lagi. Awal 1946 Sugoro dipindahkan dari tahanan Ifar Gunung ke Penjara Merauke dari sinilah akhirnya Sugoro berhasil meloloskan diri ke Papua Nugini dan Australia kemudian kembali ke Jawa. Hamid Siregar tetap tinggal mendekam dalam penjara-penjara di Hollandia.

Kematian anggota Batalyon Papua bekas anak didik Marthin Indey sewaktu masih menjadi anggota polisi menggugah kemarahan Marthin Indey dan segera datang dari Arso setelah mendengar peristiwa itu. Setelah mengetahui bahwa peristiwa ini didalangi oleh Belanda maka meningkatlah rasa nasionalisme Marthin Indey untuk segera melawan penjajah dengan perang maupun diplomasi.

BAB V

PERAN MARTHN INDEY DALAM SEJARAH

Berbicara tentang aktivitasnya dalam gerak langkah perjuangan, Martben Indey agaknya telah di lakukannya melalui jalan yang cukup panjang. Hal ini disebabkan oleh karena jauh sebelum Republik Indonesia, Marthen Indey sudah menunjukkan aktivitasnya dalam gerakan perjuangan Kebangsaan. Perjuangan yang dilakukannya bukanlah berupa tindakan mengangkat senjata melawan penjajah, akan tetapi perjuangan yang dilakukan adalah usahanya memajukan diri dengan melalui gerak-gerakan tentang kebangsaan yang kesemua itu disumbangkan untuk kepentingan negara dan bangsanya. Dan ini dibuktikannya dalam aktivitas-aktivitas yang diperankan oleh Marthin Indey terutama dalam memperjuangkan Irian Barat agar kembali kepangkuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Peran-peran Marthen Indey dalam arus sejarah telah dimulai jauh sebelum Indonesia Merdeka, di mana ia telah menunjukkan identitasnya bahwa ia adalah putra bangsa, bangsa Indonesia.

Perjuangan bangsa Indonesia mencapai puncaknya adalah ketika Soekarno-Hatta membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pernyataan atau Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang telah diucapkan oleh Soekarno-Hatta itu disambut seluruh rakyat dengan perasaan gembira dan berita tersebut kemudian menyebar luas keseluruh pelosok tanah air dan akhirnya didengar oleh rakyat Irian Barat. Berita ini bersumber dari

berita yang terus menerus disiarkan oleh putra-putra Indonesia melalui kantor berita Domei dan berita kemerdekaan ini ditangkap juga di Australia. Atas inisiatif dan usaha orang-orang Indonesia, khususnya para pejuang eks Digulis yang sudah berada di Australia, segera menerbitkan berita proklamasi tersebut ke dalam pamflet-pamflet. Selanjutnya pamflet itu disebarluaskan antara lain ke Brisbane, Kamp Kasino, Sidney, Melbourne, Merauke dan bahkan sampai ke ujung Pandang (dahulu Makassar) dan Balikpapan. Dari kota Merauke inilah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diketahui para pejuang kemerdekaan di Irian Barat.

Sementara itu pihak Kolonial untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari rakyat Irian Barat dan untuk menegakkan dominasi kolonialnya di Irian Barat, maka oleh Pemerintah Kolonial Belanda (PKB) para pejuang eks Digulis yang melarikan diri ke Australia pada masa pendudukan Jepang, ditarik kembali untuk bekerja di Irian Barat. Oleh karena Pemerintah Kolonial Belanda sangat membutuhkan tenaga mereka itu dalam bidang pemerintahan. Sehubungan dengan itu para pejuang eks Digulis ini disertai beberapa jabatan dalam bidang pemerintahan. Namun di sisi lain tanpa sepengetahuan Pemerintah Kolonial Belanda, para pejuang eks Digulis ini menggunakan kesempatan yang baik itu untuk menanamkan benih kebangsaan dalam jiwa para pejuang Irian Barat.

Salah satu eks pejuang Digulis adalah yang bernama Soegoro Atmoprasodjo. Ia adalah seorang bekas pemuka Taman Siswa yang diangkat oleh Pemerintah Kolonial sebagai Penasehat Direktur Pendidikan dan Agama untuk daerah-daerah yang dibebaskan. Di samping jabatan tersebut Soegoro Atmoprasodjo dipercayai juga untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan yaitu Sekolah *Bestuur* (Pamong Praja) di Kampung Harapan yang semula bernama Kotanika. Dalam kenyataannya penyelenggaraan pendidikan *Bestuur* ini justru dimanfaatkan oleh Soegoro Atmoprasodjo untuk menanamkan kepada murid-muridnya ajaran tentang kemerdekaan dan patriotisme dalam rangka Indonesia merdeka. Dalam usaha menyampaikan cita-citanya itu Soegoro Atmoprasodjo sering mengadakan pertemuan rahasia dengan pemuda Irian Barat seperti dengan Marthen indey, Frans Kaisiepo, Corinus Krey, Lukas Rumkorem, dan Silas Papare guna

membahas upaya penyatuan Nederlands Nieuw Guinea ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut para pemuda dilatih menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Hasil nyata dari kegiatan-kegiatan tersebut terlibat adanya tanggapan rakyat Irian Barat yang pertama ditandai dengan terjadinya insiden bendera pada tanggal 31 Agustus yang bertepatan dengan hari kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina. Ketika Senior officer Nica yaitu R. Abdul Kadir Widjoatmodjo mempersiapkan perayaan hari ulang tahun Ratu Belanda tersebut, seluruh rakyat diperintahkan untuk mengibarkan bendera Belanda, Merah Putih Biru. Akan tetapi didalam kenyataannya yang terjadi adalah rakyat di Irian Barat mengibarkan bendera. Sang Merah Putih secara penuh, sedangkan bendera Belanda dan bendera Amerika dikibarkan setengah tiang. Peristiwa atau insiden tersebut jelas mencerminkan manifestasi gejolak hati putra-putra Irian Barat untuk menghirup alam kemerdekaan Indonesia. Kegiatan-kegiatan tersebut terus diselenggarakan oleh para pejuang kemerdekaan di Irian Barat berupa rapat-rapat pertemuan di Jayapura.

Dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Marthen Indey bersama-sama teman, murid-murid Kursus Sekolah Bestuur, pimpinan Soegoro Atmoprasodjo, lepasan Digul telah menunjukkan dirinya bahwa mereka itu adalah aktivis pejuang yang militan. Murid-murid lepasan Sekolah ini telah berperan aktif karena telah tertempa menjadi manusia terdidik dan terpelajar dan yang peling penting bahwa mereka itu berperan sebagai eksponen dalam memperjuangkan kemerdekaan. Mereka itu telah aktif melakukan kegiatan teristimewa menyampaikan pesan-pesan kemerdekaan.

Untuk meraih cita-cita itu pemuda-pemuda telah mengikat tali rasa persatuan kebangsaan yang ditandai dengan terbentuknya Dewan Purwa Kelan Suku yang datang berbagai suku dari Irian Barat. Berdirinya badan ini bukan saja untuk kepentingan sekolah dalam arti kepentingan mereka dengan guru, melainkan juga telah dimanfaatkan sebagai forum kontak, tukar pikiran antara murid dan murid dan antara murid dengan guru, sehingga karenanya makin memperluas wawasan serta pemahaman tentang kemerdekaan. Kesemua itu telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan Marthen Indey bersama

Lukas Romkorem, Yan Waromi, Corinus Crey, Silas papare, G. Saweri, SD Kawab dalam upaya menyebarkan semangat kemerdekaan kepada seluruh lapisan rakyat Irian Barat untuk disambut dan ditegaskan.

Bertolak dari faham kebangsaan yang telah diserap dan dibangkitkan oleh Marthen Indey bersama kawan-kawan telah pula menusuk ke dalam tubuh Batalyon Papua yang telah dibentuk ketika pendaratan Sekutu. Dan dengan semangat Kemerdekaan putra-putra Irian Barat baik yang menjadi anggota Batalyon Papua, maupun Polisi serta orang Sipil telah dilancarkan ajakan untuk melakukan pemberontakan. Untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan maka diadakan kontak dengan para tokoh perjuangan seperti Marthen Indey, Silas papare dan Corinus Krey. Dengan memperoleh kata sepakat kemudian ditetapkanlah waktu yang tepat dan dari kesepakatan tersebut diputuskan bahwa pemberontakan akan dimulai pada tanggal 25 Desember 1945. Pemberontakan ini merupakan suatu aksi yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan di Irian Barat. Inti pemberontakan ini berpusat pada penduduk asli dan anggota pasukan Batalyon Papua. Akan tetapi pada malam hari tanggal 14 Desember 1945 Pemerintah Kolonial Belanda telah mencium rencana ini dan mengadakan penangkapan-penangkapan di Jayapura dengan bantuan pasukan dari Rabaul (Irian Timur) yang sekarang bernama Papua New Guinea dilakukan penangkapan terhadap 250 orang termasuk Soegoro Atmoprasodjo, Marthen Indey dan Silas Papare. Sebagai penanggungjawab dalam rencana pemberontakan ini, maka sebagai tertuduh adalah Marthen Indey, Silas Papare dan Soegoro Atmoprasodjo dijatuhi hukuman penjara, sedangkan anggota lainnya dibebaskan dari tuduhan.

Meskipun mereka itu ditahan dalam penjara, para pejuang ini tidak berhenti dan secara diam-diam merencanakan lagi untuk melakukan pemberontakan berikutnya dan pelaksanaannya ditetapkan pada tanggal 17 Juli 1946. Pemberontakan ini dipimpin oleh Panggoncang Alam pejuang asal Minangkabau. Yang menjadi sasaran pemberontakan adalah melucuti persenjataan tentara KNIL, menangkap pembesar-pembesar Belanda, menduduki stasion radio dan tempat vital lainnya. Akan tetapi rencana yang telah terinci dan

matang ini tercium lagi, karena ada yang membocorkan, maka sebelum tercapai tujuannya Pemerintah Kolonial Belanda telah mengadakan pembersihan. Sehubungan dengan hal ini Marthen Indey yang dianggap sebagai tokoh pemberontakan tersebut segera dipindahkan dari Jayapura ke Serui.

Melihat kenyataan yang demikian, bahwa setiap adanya usaha untuk menggerakkan pemberontakan selalu mengalami kegagalan, maka kemudian dibentuklah suatu organisasi yang tersusun rapi. Hal ini disadari bahwa untuk dapat mencapai tujuan haruslah menghimpun serta mengerahkan seluruh kekuatan rakyat dan untuk itu agaknya diperlukan suatu wadah organisasi politik. Tanpa wadah yang dapat menampung aspirasi rakyat serta mengatur gerak langkah perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan, maka akan sedikit sekali hasil yang dapat diperoleh.

Dalam hal ini dengan bimbingan para eks Digulis seperti Haryono dan Suprpto turut membentuk organisasi Komite Indonesia Merdeka (KIM). Komite Indonesia Merdeka ini sebenarnya berpusat di Melbourne yang didirikan pada tanggal 29 September 1945 dengan ketuanya Jamaluddin Tamin dan anggota-anggotanya antara lain Maskun, Kandur Maryono dan lain-lain. Di samping bertujuan membela dan mempertahankan proklamasi 1945, Komite Indonesia Merdeka juga bertugas dalam urusan repatriasi atas pemulangan orang-orang Indo ke tanah airnya dengan menolak campur tangan Belanda. Selanjutnya, Komite Indonesia yang didirikan di Jayapura pada bulan oktober 1946 diketuai oleh Dr. J.A. Gerungan, seorang dokter wanita yang mengepalai sebuah rumah sakit di Abepura Jayapura. Sebagai wakilnya ialah Latuperisa, sedangkan sekretaris I ialah Corinus Crey, sekretaris II ialah Subroto. Sedangkan Marthen Indey pada saat itu hanya sebagai anggota biasa. Dalam perkembangan selanjutnya pengurus Komite Indonesia Merdeka ini beralih kepada putra asli Irian dengan Ketuanya Marthen Indey, Corinus Crey sebagai wakilnya, dan Petrus Watebossy sebagai sekretaris.

Sementara itu di Biak kedatangan Lukas Rumkorem telah membantu perjuangan kemerdekaan yang diawali dengan kegiatan yang antara lain memberikan penerangan-penerangan kepada rakyat

Biak tentang kemerdekaan sehingga mereka sadar dan bangkit semangatnya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kegiatan ini dilakukan secara diam-diam dan sangat rahasia, hal ini dikhawatirkan karena adanya pengawasan yang ketat dari Pemerintah Kolonial Belanda. Akan tetapi meskipun demikian dalam suatu kesempatan yaitu ketika diadakan peringatan hari kelahiran Ratu Belanda, para pejuang kemerdekaan secara demonstratif telah mengadakan upacara pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran bendera Merah Putih ini diadakan di Bosnik Timur tepatnya di halaman rumah Lukas Rumkorem dan dihadiri oleh anggota teras Komite Indonesia Merdeka seperti Frans Kaisiepo, Corinus Crey, Marcus Kaisiepo dan M. Youwe serta rakyat dan para simpatisan. Dalam upacara tersebut dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh M. Rumkahu. Tindakan berani para pejuang di Biak ini tidak mendapat tanggapan dari pihak Pemerintah Kolonial Belanda. Karena itu sebagai tindak lanjut mereka mendirikan Partai Indonesia Merdeka (PIM) pada tanggal 10 Juli 1946 dengan diketuai oleh Lukas Rumkorem, dengan wakil ketuanya Corinus Crey, sedangkan sekretarisnya ialah Petrus Warikar.

Perlu diingatkan bahwa salah satu pencetus gagasan berdirinya Partai Indonesia Merdeka (PIM) adalah Frans Kaisiepo yang waktu itu menjadi Kepala Distrik Biak Utara di Warsa. Misi Organisasi ini seperti lainnya Komite Indonesia Merdeka yang telah didirikan di Jayapura bertujuan untuk memberi penerangan tentang arti dan tujuan Indonesia Merdeka. Selanjutnya kegiatan rutin partai ini diisi dengan mengadakan pertemuan anggota secara rahasia untuk membicarakan ataupun mengatur rencana-rencana yang akan dilaksanakan dalam usaha untuk mendukung terlaksananya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut di bumi Irian Barat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka segeralah disusun rencana yang matang untuk mengadakan pemberontakan bersenjata terhadap kedudukan kolonial Belanda yang tetap bercokol. Ternyata usaha perlawanan bersenjata yang telah direncanakan itu mengalami kegagalan. Hal ini karena telah diketahui oleh kaki tangan pihak Pemerintah Kolonial Belanda. Dan sebagai akibatnya Lukas Rumkorem ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan mendekam dalam penjara di Jayapura dari tahun 1947 sampai pada akhir tahun 1948.

Sementara itu pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 Juli 1946 di Ujung Pandang (dahulu namanya Makassar) diadakan Konperensi Malino. Konperensi ini dimaksudkan untuk mendukung gagasan Van Mook tentang pembentukan negara federal Indonesia. Bentuk negara federal ini di dalamnya akan bergabung satu Uni dengan Kerajaan Belanda. Di dalam konperensi tersebut, sebagai wakil dari Irian Barat yang ditunjuk oleh Pemerintah Kolonial Belanda (PKR) untuk menghadiri Konperensi Malino adalah Frans Kaisiepo. Sebelum keberangkatan Frans Kaisiepo ke Konperensi Malino, ia telah diberi bekal berupa fikiran-fikiran oleh teman-temannya yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan melalui pertemuan di Jayapura Frans Kaisiepo, Corinus M. Crey serta Marcus Kaisiepo bersama Soegoro Atmoprasodjo telah membicarakan masalah keberangkatan wakil-wakil Irian Barat dalam Konperensi Malino itu. Salah satu "bekal" itu ialah mengganti kata Papua dengan kata IRIAN. Hal ini merupakan suatu peringatan bersejarah. Karena di dalam kesempatan menyampaikan pidato dihadapan para peserta Konperensi Malino tanggal 19 Juli 1946, Frans Kaisiepo menyodorkan atau mengusulkan sebuah gagasan yang isinya sangat mengejutkan pihak Belanda, yaitu agar nama Papua dan Nederlands Nieuw Guinea yang dipakai selama ini ditiadakan dan diganti dengan kata atau nama IRIAN. Sedang pengertian IRIAN menurut Frans Kaisiepo adalah ikut Republik Indonesia Anti Nederlands. Pidato Frans Kaisiepo yang telah disampaikan tersebut pada malam harinya oleh Radio Makassar (Ujung Pandang) dalam siarannya, langsung menyiarkan berita tentang penggantian nama Papua dan Nederlands Nieuw Guinea menjadi IRIAN.

Penggantian kata Papua dengan kata IRIAN itu mempunyai makna tersendiri, karena dengan itu rakyat Irian Barat hendak menunjukkan identitas dan menjalankan aspirasinya terhadap budaya bangsanya. Kata IRIAN yang berarti : panas yang dikemukakan oleh Frans Kaisiepo berasal dari bahasa Biak, sedangkan kata Papua sebenarnya mula-mula digunakan oleh pelaut-pelaut Portugis dan Spanyol. Sejak itu Pemerintah Indonesia menggunakan kata IRIAN, sebaliknya Pemerintah Kolonial Belanda melarang penggunaan kata IRIAN dan tetap menggunakan kata Papua. Sedang kata IRIAN yang

diucapkan Frans Kaisiepo di depan sidang Konperensi Malino sebenarnya sudah diberitahukan lebih dahulu oleh Surat Kabar Penyuluh di Brisbane, Australia. Pengirim artikel tentang penggantian nama Papua menjadi IRIAN kepada surat kabar tersebut sebenarnya dilakukan oleh dua bersaudara yaitu Markus Kaisiepo dan Frans Kaisiepo. Gagasan untuk mengganti nama tersebut telah dicetuskan oleh Frans Kaisiepo. Sewaktu mengikuti Kursus Kilat Bestuur di Kota Nica Holandia. Ia tidak setuju dengan papan nama kursus/sekolah yang bertuliskan "PAPUA BESTUUR SCHOOL". Karena itu ia menyuruh saudaranya, Marcus Kasiepo untuk mengganti dengan nama "IRIAN 'BESTUUR SCHOOL". Tercetusnya gagasan dua bersaudara tersebut adalah atas saran Soegoro Atmoprasodjo.

Kehadiran Frans Kaisiepo dalam Konperensi Malino telah mengecewakan Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga diadakan lagi Konperensi Denpasar sebagai kelanjutan Konperensi Malino yang diselenggarakan pada tanggal 20-24 Desember 1946. Irian Barat tidak diperbolehkan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti Konperensi tersebut. Agaknya tanpa wakil dari Irian Barat dalam konperensi tersebut dimaksudkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda agar tidak merintangai niatnya untuk memisahkan Irian Barat dari Indonesia.

Berhubung dengan usaha Belanda untuk memisahkan wilayah Irian Barat dari Indonesia secara nyata dalam Konperensi Denpasar yang berlangsung pada tanggal 20 sampai 24 Desember 1946, para pejuang Irian Barat minta kepada Residen Van Eechoud agar ada wakil-wakil rakyat Irian Barat yang dikirim menghadiri konperensi tersebut. Akan tetapi permintaan itu ditolak, sehingga pada tanggal 12 Desember 1946 Marthen Indey, Corinus Crey dan Nicolas Youwe mengirim telegram kepada H.J. Van Mook di Denpasar. Adapun isi telegram itu menyatakan agar Irian Barat tidak dipisahkan dari wilayah Republik Indonesia. Dalam kaitan ini Marthen Indey termasuk orang yang menantang pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) sebab wilayah Irian Barat tidak dimasukan ke dalam Negara Indonesia Timur.

Pada tanggal 7 Januari 1947 Marthen Indey berangkat ke Ambon guna memperjuangkan daerah Irian Barat. Walaupun Marthen Indey

dapat menyampaikan ide-idenya melalui pertemuannya dengan tokoh Maluku yang pro Indonesia, ternyata pada tanggal 23 Maret 1947 Marthen Indey ditangkap oleh Pemerintah Kolonial Belanda, kemudian dikirim kembali ke Jayapura melalui Biak dan akhirnya dipenjarakan di Jayapura dan dijatuhi hukuman selama 4 tahun. Ketika Marthen Indey berada di Ambon, Corinus Crey dan Petrus Wattebossy ditangkap oleh Pemerintah Kolonial Belanda karena mendirikan Partai Irian Dalam Republik Indonesia Serikat (PIDRIS) di mana Marthen Indey juga duduk di dalamnya sebagai Wakil Ketua. Penangkapan tersebut oleh Pemerintah Kolonial Belanda dimaksudkan untuk dapat melunakkan jiwa para pejuang demi mendukung politiknya di Irian Barat, namun kenyataannya penangkapan ini justru mempertebal semangat rela berkorban dari para pejuang di Irian Barat. Bahkan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Jayapura menggugah para pejuang di luar Irian Barat untuk berjuang melawan Pemerintah Kolonial Belanda.¹

Pada tanggal 1 Mei 1950 Marthen Indey dan kawan-kawan dibebaskan dari penjara, kemudian bersama-sama Petrus Wattebossy menemui Komisi Indonesia - Belanda yakni Mr. J. Latuharhary, Mr. Muhammad Yamin, dan lain-lain untuk melaporkan bahwa Marthen Indey bertekad mempertahankan pendirian Partai Indonesia Merdeka yaitu seluruh rakyat Irian Barat sebagai bagian dari bangsa dan Negara Indonesia.²

Setelah mengetahui bahwa Belanda mengingkari perjanjian KMB, makin marah Marthin Indey dan kawan-kawan. Ia mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh yang mengadakan gerakan bawah tanah bersama-sama J. Teppy. Pada Januari 1962 Marthin Indey menyusun kekuatan di Irian Barat sambil menunggu kedatangan pendaratan tentara TNI/RPKAD dalam rangka Trikora. Dalam kesempatan ini Marthin Indey telah berhasil menyelamatkan 9 pasukan RPKAD yang terkepung oleh pasukan Belanda dalam pendaratannya di Tanah Merah dengan

1. Badan Pembina Pahlawan Daerah Tingkat I Irian Jaya. *Riwayat Perjuangan Marthen Indey*. (Naskah); Drs. Bondan Soedharto dkk. *Sejarah Perjuangan Rakyat Irian Jaya*, Kerjasama Universitas Cenderawasih dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Irian Jaya. Jayapura.. 1989. hal. 72--75, 89, 110, 177, 201--218.
2. Radan Pembina Pahlawan Daerah Tingkat I Irian Jaya. *Riwayat Perjuangan Marthen Indey* (Naskah)

melindungi pasukan RPKAD di hutan Sabron Dosai. Setelah terjadi persetujuan antara Republik Indonesia dengan UNTEA maka 9 orang tersebut dikembalikan ke Jakarta dalam keadaan selamat. Salah satu diantaranya adalah Tugiman yang baru kembali ke Jakarta pada bulan Mei 1963.

Pasukan Belanda ternyata mempertahankan wilayah Irian Barat dengan segala kekuatannya. Akhirnya Marthin Indey telah menampung sekitar 400 orang di gabron Dosai dengan mengadakan penjagaan ketat. Penjagaan didatangkan dari Kotabaru, dan Sentani.

Pada bulan September 1962 Marthin Indey mendapat tugas dari Menteri Luar Negeri Dr. Soebandrio untuk mengeluarkan para tahanan antara lain Sujarwo Tjondronegoro, SR, K.J Teppy dan pejuang lainnya dan berhasil.

Perjuangan secara diplomasi juga dilaksanakan oleh Marthin Indey. Pada bulan Desember 1962 bersama E.Y Bonay berangkat ke New York untuk berjuang di PBB, agar periode UNTEA di Irian Barat diperpendek dan segera memasukkan wilayah Irian Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia. Ikut dalam misi Marthin Indey adalah Ely Ujo, Kaleb Hamadi, Daniel Heumasse, Kelion Kriapan. Setelah berjuang di PBB, Marthin Indey berangkat ke Jakarta menyampaikan piagam yang berisi ketegasan penduduk Irian Barat untuk tetap setia kepada Republik Indonesia.

Perjuangan Marthin Indey tidak hanya berhenti setelah Irian Barat kembali kepangkuan Republik Indonesia dengan ditandai kedatangan Presiden Soekarno di Kotabaru pada 1 Mei 1962. Kiprah Marthin Indey dilibatkan dalam pembangunan material dan spritual rakyat Irian Barat khususnya Kotabaru. Selama 2 tahun dari 1 Agustus 1963 sampai Agustus 1965 Marthin Indey menjadi Residen Kotabaru dan pembantu Gubernur untuk wilayah Kotabaru. Sehingga praktis tidak ada hentinya dalam membesarkan dan mengelola Irian Barat. Selain itu juga aktif sebagai wakil rakyat yaitu sebagai anggota MPRS dengan mengikuti sidang di Jakarta maupun Bandung dalam rangka dasa warsa. Konferensi Asia Afrika tahun 1964.

Biografi Silas Papare

BAB VI

PENDAHULUAN

6.1 Latar Belakang

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Hal ini dapat terwujud karena adanya persatuan dan kesatuan dari seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemerdekaan itu dapat dinikmati setelah melalui perjuangan yang panjang dan tanpa pamrih dari seluruh bangsa Indonesia dengan mengorbankan jiwa, harta benda yang tak ternilai harganya, oleh karena itu bangsa Indonesia setelah proklamasi, telah bertekad untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Kemerdekaan yang telah dicapai itu belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh seluruh rakyat, karena pemerintah kolonial Belanda masih berusaha untuk menguasai kembali wilayah Indonesia, sehingga setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia masih harus mempertahankan keutuhan wilayahnya dari Sabang sampai Merauke.

Kenyataan menunjukkan bahwa sebelum proklamasi diumumkan, Irian Barat (baca: Irian jaya) telah dibebaskan oleh tentara Sekutu dari kekuasaan bala tentara Jepang. Pada saat tentara Sekutu melakukan pembebasan Irian Barat, ikut pulalah Netherland Indies Civil Administration (NICA) beserta aparatnya.

Dalam gerak majunya, tentara Sekutu berhasil menguasai Irian Barat, dengan demikian setahun sebelum proklamasi kemerdekaan, daerah Irian Barat telah dikuasai oleh NICA. Meskipun demikian rakyat Irian Barat tetap mendengar berita proklamasi kemerdekaan melalui radio dan pamflet-pamflet yang dikirim oleh orang-orang Indonesia di Australia, yang tergabung dalam Political Axile Association (IPEA).

Berita proklamasi tersebut telah mendorong rakyat Irian Barat untuk mempertahankan proklamasi tersebut di daerahnya. Ini terbukti dengan munculnya perlawanan yang dilakukan rakyat Irian Barat, yaitu dengan mendirikan organisasi-organisasi seperti Komite Indonesia Merdeka (KIM), Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII), Gerakan Merah Putih (GMP) dan lain-lain.

Konflik antara Indonesia dan Belanda tentang Republik Indonesia baru berakhir setelah ditandatangani Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Dalam isi persetujuan KMB ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa setahun setelah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), masalah Irian Barat baru akan diselesaikan dengan jalan perundingan.

Kedatangan NICA di Irian Barat juga mengikutsertakan orang-orang Indonesia yang telah dibawa mengungsi ke Australia. Salah satunya adalah Sugoro, seorang bekas tahanan Digul yang di serahi tugas sebagai penasehat pada Direktur Pendidikan dan Agama (Adviseur Directeur Onderwijs en Eredienst) dan untuk selanjutnya memimpin suatu sekolah Bestuur (Pamong Praja) di Kampung Harapan (semula bernama Kotanica).

Sugoro yang setia kepada perjuangannya selalu menanamkan sikap nasional kepada siswa-siswa sekolah kursus pamong praja. "Diantara orang-orang Irian yang menjadi siswa kursus tersebut adalah Markus Kaisiepo, Frans Kaisiepo, Nicolas Youwe, Lukas Rumkorem, Silas Papare, dilain pihak pada batalyon Papua terdapat Marthin Indey".¹ Mereka sering mengadakan pertemuan-pertemuan

1. Bondan Soedharto MP. 1994 Gerakan Bawah Tanah : Cara Rakyat Irian Jaya Menentang Kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda. (Makalah pada Mukernas sejarah XII). Medan : Penyelenggara Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universita Sumatera Utara. Hlm. 3.

untuk membicarakan perjuangan bangsa Indonesia. Dari pertemuan itu muncullah usaha-usaha untuk melakukan perlawanan.

Rencana perlawanan itu akan dilakukan pada tanggal 25 Desember 1945 yang melibatkan anggota batalyon Papua, polisi serta orang sipil. Tujuan perlawanan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia di Irian Barat. Perlawanan itu sudah disepakati oleh beberapa pejuang antara lain Silas Papare, Marthin Indey, dan Lukas Rumkorem. Namun sebelum rencana itu terlaksana, Pemerintah Kolonial Belanda (PKB) telah mengetahuinya, sehingga mereka menangkap dan menjatuhkan hukuman penjara orang-orang yang terlibat dalam rencana itu, termasuk Sugoro, Marthin Indey, Silas Papare, dan Lukas Rumkorem.

Penjara bukanlah hal baru bagi para tokoh, pemuka masyarakat dan patriot-patriot bangsa yang heroik, mereka tetap merencanakan untuk melakukan perlawanan selanjutnya. Sebagai pemimpin maka ditunjuklah Panggongcang Alam, pejuang asal Minangkabau. Perlawanan itu ditetapkan pada tanggal 17 Juli 1946.

“Tujuannya ialah untuk melucuti KNIL, menangkap pembesar-pembesar, menduduki stasiun radio dan alat-alat vital lainnya”.² Namun sebelum hari yang ditetapkan tiba, pemerintah kolonial Belanda telah mencium adanya rencana, sehingga perlawanan itu kembali mengalami kegagalan. Kegagalan itu merupakan cambuk, langkah yang mereka tempuh selanjutnya adalah dengan mendirikan organisasi-organisasi. Organisasi pertama yang didirikan di Irian Barat adalah Komite Indonesia Merdeka (KIM), organisasi ini berdiri di Jayapura pada bulan Oktober tahun 1946 diketuai oleh Dr. J.A. Tumangken Gerungan seorang dokter perempuan asal Minahasa yang mengepalai sebuah Rumah Sakit di Abepura sedangkan Marthin Indey anggota biasa. Sebenarnya KIM ini didirikan oleh anggota IPEA di Melbourne. (Australia) pada tanggal 29 September 1945, sebulan setelah kemerdekaan. Adapun tujuan dari organisasi ini adalah membela dan mempertahankan proklamasi '45, dan juga bertugas

2. Supardi Raponai, Sjamsuar Said dan H. Hutasuhut (peny). 1971. *Praja Ghupa Vira (Ksatria Pelindung Masyarakat) : Irian Barat dari masa ke masa. Djayapura. Sejarah Militer Kodam XVII / Tjendrawasih*. hlm. 33.

memulangkan orang-orang Indonesia ke tanah airnya dengan menolak campur tangan Belanda³ Dengan demikian KIM yang didirikan di Jayapura merupakan lanjutan dari KIM di Australia. Dalam perkembangannya KIM di Jayapura diketuai putra daerah setempat ialah Marthin Indey. Perlawanan rakyat lainnya juga sering dilakukan dalam bentuk kargo atau kebatinan (gerakan sosial), misalnya gerakan koreri, gerakan Kasyep, gerakan Simson dan lain-lain. Berdirinya KIM di Jayapura diikuti oleh organisasi Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) yang didirikan di Serui pada tanggal 29 November 1946 dan diketuai oleh Silas Papare. Dan Golongan politik inilah yang paling besar dan paling aktif di Irian Barat.⁴

Di Manokwari berdiri organisasi Gerakan Merah Putih (GMP) yang diketuai oleh Petrus Wattebosy. Di gorong berdiri organisasi Perintis Kemerdekaan yang diketuai oleh Sangaji Malan. Di Biak berdiri cabang KIM yang kemudian berubah namanya Partai Indonesia Merdeka (PIM) dibawah pimpinan Lukas Rumkorem dan masih banyak lagi organisasi lainnya.

Silas Papare yang dianggap berbahaya di Jayapura kemudian dipindahkan ke Serui, dimana tempat pembuangan Dr. Sam Ratulangie (sebagai gubernur pertama propinsi Sulawesi) sehingga tempat tersebut menjadi pusat-pusat gerakan dan perjuangan Nasional Irian Jaya.⁵ Dengan hadirnya Dr. Sam Ratulangie, Silas Papare tidak ragu-ragu memilih kemerdekaan Republik Indonesia melawan Belanda. Atas nasehat Sam Ratulangie, Silas Papare pada tanggal 29 November 1946 mengumumkan berdirinya Partai Politik yang diberi nama Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) Silas Papare dipilih menjadi ketua dan Sam Ratulangie sebagai penasehat umum,⁶ dan golongan politik inilah yang paling besar dan paling aktif di Irian Barat.⁷ Gema Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bukan saja telah menyeruak

3. Bondan Soedharto MP. *op. cit.* hlm. 39.

4. Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat. 1986. *Api Perjuangan pembebasan Irian Barat*. Jakarta. hlm 69.

5. Yayasan Badan Kontak Keluarga Perintis Irian Barat. 1986. *Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat*. Jakarta. hlm. 19.

6. *Pahlawan Silas Papare*. 1993. Stensilan. hlm. 3.

7. Yayasan Badan Kontak Keluarga Perintis Irian Barat. *op. cit* hlm. 69.

pantai Irian Jaya, tetapi bahkan telah mengorbankan api perjuangan di dada putera-puteranya.

Dalam situasi yang demikian muncullah patriot-patriot bangsa, akhirnya tercatatlah sederetan nama-nama yang dalam hal ini oleh Pemerintah Republik Indonesia telah diangkat sebagai Pahlawan Nasional, dan salah satunya adalah Silas Papare seorang putera terbaik bangsa Indonesia yang berasal dari Irian Barat.

Kepahlawanan Silas Papare harus dilihat sebagai kesatuan perjuangan bersama GSSJ Ratulangie.⁸ Silas Papare teguh pada patriotis yang sangat mencintai kemerdekaan, Persatuan dan Kesatuan dari Sabang hingga Merauke. Kecintaannya itu dipertaruhkannya seluruh jiwa raganya. Sekali merdeka tetap merdeka itulah prinsip Silas Papare. Ia merupakan pejuang Irian Jaya yang mengucapkan keinginan rakyat Irian Jaya agar tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di forum-forum internasional. Ketika berlangsungnya KMB tahun 1949 di Den Haag, Silas Papare ikut memperkuat delegasi pemerintah Indonesia sekaligus menyaksikan peristiwa penandatanganan persetujuan New York 15 Agustus 1962.

6.2 Tujuan Penelitian

Berangkat dari kriteria kepahlawanan seperti yang telah ditentukan, yang didalamnya terkandung semangat dan nilai-nilai edukatif dan inspiratif, maka tidak dapat disangkal betapa pentingnya penulisan Biografi Pahlawan Nasional Silas Papare. Hal ini karena Silas Papare telah berjasa besar kepada nusa dan bangsanya. Tindakan serta sikap yang diperankannya mencerminkan pribadi yang harus menjadi suri tauladan yang penting untuk disajikan serta disebarakan secara luas, terutama dikalangan generasi penerus.

Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa di dalam penulisan Biografi Pahlawan Nasional Silas Papare sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun, dan dalam upaya mengisi kemerdekaan. Hal ini juga karena seluruh aktivitas Silas Papare tidaklah terlepas kaitannya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa

8. Ny. Merry Papare. Wawancara tanggal 5 September 1995.

di tingkat lokal atau daerah. Karenanya penulisan ini kiranya merupakan upaya mengisi muatan lokal khususnya tentang perjuangan Silas Papare dan rakyat Irian Barat.

Dengan kata lain penulisan Biografi Pahlawan Nasional Silas Papare dapat diharapkan mengisi muatan lokal. Selain itu kiranya dapat menjadi kebanggaan daerah sekaligus nasional, karena integritas Silas Papare telah tercurah untuk nusa dan bangsa.

6.3 Ruang Lingkup

Mengikuti akan kelaziman penulisan sebuah biografi, maka ada keinginan supaya ruang lingkup kajian penulisan Biografi Pahlawan Nasional Silas Papare akan disajikan secara utuh dan sesempurna mungkin. Akan tetapi, berhubung karena adanya berbagai kendala yang tak terhindarkan, maka kajian ini dibatasi hanya pada uraian-uraian yang kurang memadai yang meliputi tentang asal-usul, pendidikan, riwayat pekerjaan, sepak terjang dalam perjuangan dan keadaan di masa akhir hidupnya. Sedangkan tuntutan uraian yang mencerminkan karakter seorang tokoh yang utuh belum dapat disajikan secara sempurna.

Namun demikian untuk dapat sedikit menghidupkan suasana dan alur kehidupan Silas Papare, uraian ini tidak akan lupa menengahkan tanah tempat kelahiran serta gambaran mengenai adat tradisi masyarakat tempat Silas papare dilahirkan dan dibesarkan. Juga untuk membangun hubungan dengan situasi zaman, uraian akan menyinggung usaha-usaha Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat. Karena di dalam aktivitas ini Silas Papare turut memberikan andil yang besar dalam menentang Kolonialisme dan Imperialisme Belanda.

6.4 Metode Penulisan

Dengan berpegang pada kaidah ilmu sejarah, maka penulisan Biografi Pahlawan Nasional Silas Papare dilakukan dengan metode pengumpulan, penyeleksian, penganalisaan dan penulisan. Dalam

usaha mengumpulkan data telah dilakukan antara lain Studi Kepustakaan:

Untuk pengumpulan data kepustakaan ini dilakukan penelitian pada buku-buku, majalah, koran, brosur, dokumen (dokumen resmi atau pribadi) yang disimpan oleh keluarga (saudara, anak dan isteri).

Wawancara:

Untuk kegiatan ini dilakukan wawancara dengan (isteri dan anak). Dan data-data yang telah terkumpul dilakukan pengujian (seleksi) dan selanjutnya dilakukanlah penulisan.

6.5 Sistematika Laporan

Laporan hasil penelitian ini disajikan dalam enam bab, yaitu:

- BAB VI** : Pendahuluan
Bab ini memuat uraian tentang Latar Belakang Masalah dan Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian/ Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Laporan.
- BAB VII** : Latar Sosial Budaya
Bab ini menguraikan tentang Letak dan Keadaan Geografis dan Sistem Kekerabatan.
- BAB VIII** : Silas Papare dalam Mengikuti Pendidikan dan Pekerjaan.
Bab ini menguraikan tentang Pendidikan dalam Keluarga, Pendidikan Formal, serta Meniti Pekerjaan.
- BAB IX** : Silas Papare menyambut Kemerdekaan
- BAB X** : Peran-Peran Silas Papare dalam arus sejarah
- BAB XI** : Penutup



BAB VII

LATAR SOSIAL BUDAYA

7.1 Letak dan Keadaan Geografi

Silas Papare lahir di kampung Ariepi (Serui) Yapen Waropen sekitar tahun 1918. Ia adalah anak dari pasangan suami isteri Musa Papare dan Dorkas Mangge. Nama lengkapnya Silas Ayari Donrai Papare.

Kabupaten Yapen Waropen mempunyai luas wilayah seluruhnya 18.994 km² dengan batas wilayah sebagai berikut sebelah Selatan berbatasan dengan pegunungan Van Rees, sebelah Timur berbatasan dengan sungai Mamberamo, sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Wagopa.

Yapen Waropen dipengaruhi oleh iklim tropis suhu udara pada ketinggian permukaan laut hampir seragam bagi seluruh propinsi yaitu rata-rata 26°C, curah hujan bagi sebagian besar Irian Jaya cukup tinggi, yaitu rata-rata 2.000-3.000 milimeter tiap tahun, kecuali terhadap pola curah hujan yang tinggi di daerah sebelah Selatan yaitu Merauke. Suatu ciri yang mencolok adalah iklim di daerah Waropen, yang secara klimatologi dikategorikan dalam tipe hujan tropik, dengan curah hujan rata-rata 3.000 milimeter setahun, atau 300 milimeter sebulan. Suhu udara berkisar 23,5°--30° dengan suhu rata-rata setinggi

Data dari meteorologi Jayapura menunjukkan bahwa kelembaban udara di daerah pesisir Waropen cukup tinggi, yaitu rata-rata 95%. Antara bulan April dan oktober bertiup angin Timur, dan laut di pantai Waropen pada waktu itu tenang, yang memungkinkan orang untuk berlayar ke Pulau Yapen atau ke daerah lain. Antara bulan November dan Maret angin Barat bertiup kencang yang menyebabkan gelombang-gelombang laut yang tinggi, dan karena itu penduduk tidak boleh berlayar pada waktu itu.

Ekologi daerah Yapen Waropen terdiri dari: (i) hutan bakau, (ii) hutan rawa, (iii) hutan rimba pegunungan. Daerahnya pada umumnya terdapat hutan-hutan bakau (*Rhizophora avicennia*) yang padat. Dari garis pantai hutan bakau tumbuh sampai ke arah pedalaman, yang terdiri dari berbagai jenis pohon yang sangat bermanfaat untuk membangun rumah atau membuat peralatan rumah tangga. Ekologi hutan bakau ini telah dinilai sangat potensial untuk pengembangan budidaya udang, dan merupakan lahan yang sangat subur untuk pembiakan berbagai jenis kerang dan kepiting. Pemanfaatan hutan bakau masih terbatas pada kebutuhan masyarakat setempat, untuk konsumsi kayu bakar dan pembangunan rumah.

Ekologi hutan rawa dari garis pantai, sesudah hutan bakau berhenti. Hutan rawa adalah daerah sebagian besar tergenang air rawa, dan terdiri dari hutan sagu (*metroxylon*) yang sangat luas. Di antara pohon-pohon sagu yang tumbuh hampir diseluruh daerah di belakang garis hutan bakau, tumbuh pula pakis, nibung, sejenis ilalang air, dan tumbuh-tumbuhan lain. Sagu merupakan makanan pokok bagi semua orang Yapen Waropen, dan sampai saat ini sagu masih dibutuhkan untuk konsumsi keluarga. Hampir seluruh hutan sagu di daerah Yapen Waropen telah dibagi-bagi secara hukum adat menjadi hak ulayat klen-klen yang menempati desa-desa.

Makin masuk ke daerah pedalaman Waropen, sampai kira-kira 10-25 kilometer dari garis pantai mulai tampak ekologi hutan pegunungan. Topografi daerah ini sudah mulai berbukit-bukit dan berbentuk lereng pegunungan. Hutan pegunungan di tumbuh berbagai jenis pohon, seperti kayu besi, kayu matoa (*Agathis*), damar (*Agathis alba*), dan berbagai jenis rotan. Apabila berbagai jenis kayu ini dapat

diusahakan dengan baik, maka daerah ini sangat potensial sebagai penghasil kayu untuk ekspor. Dalam hutan pegunungan yang masih perawan ini terdapat berbagai jenis binatang, seperti babi, kasuari, burung maleo, burung cenderawasih, kakatua, mambruk, berbagai macam jenis nuri, dan lain sebagainya.

Selain memiliki panorama hutan bakau, daerah pesisir merupakan daerah yang banyak dipotong oleh sungai-sungai besar maupun kecil. Sungai-sungai itu sebagian besar bersumber di Pegunungan Van Rees, yang berjarak sekitar 40-50 kilometer ke arah daerah pedalaman. Sungai-sungai yang bersumber di rawa-rawa pada umumnya merupakan sungai-sungai hujan.

7.2 Sistem Kekerabatan

Kelompok kekerabatan yang terpenting dalam masyarakat Yapen Waropen adalah keluarga inti, yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak, dan sering kali orang tua suami atau isteri. Usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti menokok sagu atau menangkap ikan, dikerjakan bersama-sama. Di masa yang lalu, beberapa keluarga inti yang satu keturunan berdasarkan asas patrilineal (asas keturunan melalui garis laki-laki) mengelompokkan menjadi satu dan membentuk klen patrilineal oleh Waropen menyebut *da*, yang terdiri dari 20-30 orang. Mereka bersama-sama menempati satu rumah besar (*ruma bawa*). Suatu *da* dipimpin oleh seorang kepala (*serabawa*) dan tiap desa (*nu*) biasanya terdiri dari 3-5 *da*. Anggota *da* ada yang tinggal mengelompok dalam satu *nu*, tetapi ada yang tersebar dalam beberapa desa.

Serabawa bertugas mengurus masalah-masalah adat dan mengatur upacara perkawinan maupun ritus-ritus sepanjang daur hidup lainnya, mempertahankan hak ulayat atas tanah butan berburu, hutan sagu, dan daerah penangkapan ikan, menyelesaikan pertengkaran antara warga klen, dan mengelola pemeliharaan serta jati diri *rumabawa*, yang selain sebagai rumah tempat tinggal para warganya, juga merupakan bangunan kebanggaan yang melambangkan jati diri *da*. Syarat untuk dapat dipilih menjadi *Serabawa* adalah memiliki keahlian dalam adat istiadat, berwibawa, bertanggung jawab, pandai

berbicara dan bergaul, dan dimasa lalu pandai dalam strategi perang dan serangan pengayauan. Serabawa biasanya dibantu suatu kelompok penasehat yang terdiri dari orang-orang tua (manobawa).

Kekuasaan serabawa sudah berkurang sejak Belanda masuk ke daerah Yapen Waropen pada akhir abad ke-19, yang di angkat Korano, yaitu seorang tokoh penghubung yang memiliki kemampuan berbahasa Melayu, sedikit menulis dan membaca. Korano inilah yang lambat-laun mengambil alih sebagian kekuasaan serabawa, yang oleh orang luar kemudian dianggap sebagai Kepala Desa. Keadaan seperti itu masih berlangsung hingga sekarang.

Di Waropen dan atau bagian dari daerah sering juga disebut fam, suatu istilah baru untuk mengacu kelompok kerabat yang masih saling mengenal dan mengetahui hubungan kekerabatannya. Dengan demikian secara teknikal kelompok ini merupakan klen kecil yang kadang-kadang bisa sama, dan kadang-kadang bisa lebih kecil daripada da.

Namun perlu diingat bahwa istilah itu baru muncul dalam masyarakat Yapen Waropen sejak masa berdirinya pemerintah Belanda di Teluk Cenderawasih dan awal penyebaran agama Kristen di daerah itu. Sebelumnya orang Yapen Waropen cenderung menyebut kesatuan kerabat yang sekarang disebut fam itu dengan nama tempat asal atau nama binatang atau tumbuh-tumbuhan yang melambangkan kesatuan mereka.

Sebutan untuk diri sendiri adalah ya (=saya). Untuk membedakan jenis kelamin, kata mano digunakan untuk laki-laki, dan bino untuk perempuan. Untuk membedakah umur dipakai bawa (=besar) bagi orang yang senior, dan kuboma (=kecil) bagi yang junior.

Istilah untuk semua kerabat tiga angkatan diatas dan dibawah ya adalah gori (semua kakek, nenek, dan saudara-saudara kandung mereka, serta semua cicit ya maupun cicit dari semua saudara kandung).

Istilah kekerabatan untuk kaum laki-laki dua angkatan di atas ya adalah fofō mano (yaitu semua kakek dan para saudara kandung laki-laki kakek dan nenek). Istilah kekerabatan untuk kaum kerabat

perempuan dua angkatan diatas ya disebut fofo bino (yaitu semua nenek dan para saudara sekandung wanita kakek dan nenek). Istilah kekerabatan untuk semua kerabat laki-laki dan perempuan dua generasi dibawah ya adalah fofo (yakni semua cucu yang maupun cucu dari para saudara sekandung).

Istilah kekerabatan untuk kaum kerabat para saudara kandung diatas ya adalah daida (ayah serta para saudara kandung pria ayah maupun ibu). Seperti telah disebut perbedaan umur dinyatakan dengan kata bawa bagi orang yang lebih senior, dan kuboma bagi orang wanita muda, istilah kekerabatan untuk kerabat-kerabat wanita satu angkatan diatas ya adalah naina (yaitu ibu dan para saudara perempuan ayah dan ibu). Istilah kekerabatan untuk kaum kerabat perempuan satu angkatan dibawah ya adalah waitea (anak laki-laki dan semua anak laki-laki para saudara pria dan perempuan), dan waima (anak perempuan).

Istilah kekerabatan satu angkatan dengan ya adalah bingga (yaitu para saudara kandung perempuan ya) dan mambo (para saudara laki-laki ya). Istilah untuk istri adalah bino, dan istilah untuk suami dan suami dari semua saudara perempuan adalah Yondagi atau Amay).



BAB VIII

SILAS PAPARE PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN

8.1 Pendidikan

Semasa kecil Silas Papare kampung Serui tempat lahirnya masih merupakan daerah yang sepi dan tertutup hubungan dengan daerah lain. Hubungan dengan dunia luar baru terbuka setelah Belanda masuk ke Irian Jaya. Rakyat Irian Jaya pada masa itu hidup dalam keadaan miskin dan tertekan. Meskipun rakyat tertekan kehidupannya mereka mengimbanginya dengan hidup sederhana dan menerima apa adanya.

Di kampung yang miskin dan sederhana ini terdapat satu keluarga yang sangat taat beragama dan harmonis. Keluarga itu adalah keluarga Musa Papare dan istrinya Dorkas Mangge.¹ Dari keluarga inilah lahir seorang pejuang Irian Jaya yang sangat gigih dan disegani musuhnya. Tepatnya pada 18 Desember 1919 di Serui Dorkas Mangge telah melahirkan bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Silas Papare.

Si kecil Silas Papare dididiknya dengan nilai-nilai agama Kristen yang dianggapnya sebagai norma tertinggi yang dianut oleh sebagian rakyat Irian Jaya. Jadi tidaklah begitu tepat apabila rakyat Serui dianggap berpegang teguh pada tata adat yang kaku, sebab

1. Biodata An. Silas Papare, arsip lepas tersimpan di Departemen Sosial RI.

nilai kristiani merupakan nilai universal yang didahulukan dan diberlakukan di Serui.

Berlatar belakang pandangan hidup keagamaan demikian maka seperti orang-orang Serui lainnya oleh orang tuanya sejak sebelum masuk bangku sekolah Silas Papare telah belajar agama Kristen melalui Zending-zending yang masuk ke Irian Jaya. Disitu ia mulai belajar tentang hakekat hidup melalui ajaran-ajaran Kristen. Pelajaran agama ditekankan pada membaca dan menulis kitab suci Injil. Pendidikan gereja dilakukan pada siang hari di rumah-rumah penduduk dan gereja-gereja. Belajar agama di Irian Jaya biasa dilakukan oleh anak-anak, sebagai langkah awal mendalami agama Kristen.

Pengetahuan dasar tentang Kristen yang diperoleh Silas Papare memang sangat penting selain untuk modal pribadi dalam ibadahnya, pengetahuan tadi telah memudahkannya dalam pergaulan dengan sesamanya dan merupakan bekal dalam perjuangannya.

Pada malam harinya orang tua Silas Papare, Musa Papare sebagai seorang petani sederhana senantiasa menyempatkan mendidik anaknya melalui dongeng sebelum tidur. Pendidikan kejiwaan yang ditanamkan secara tradisional sangat dirasakan sekali pengaruhnya oleh Silas Papare dalam menggeluti hidup. Melalui ibunya Dorkas Mangge, ia dapat memahami pandangan hidup orang-orang Serui dan dari saudara-saudaranya ia dapat pengalaman tata cara bergaul dengan sesamanya.

Di Serui Sekolah Desa (Volkschool) didirikan tahun 1907 atas perintah Gubernur Jenderal Van Heutz. Sekolah ini tidak diselenggarakan oleh gubernemen tetapi diselenggarakan oleh desa, guru-gurunya adalah pegawai desa sehingga perkembangan pendidikan dirasa masih sangat lamban. Hal ini disebabkan sebagian besar penduduk desa di Indonesia miskin dan belum tertarik pada pendidikan sistem barat.²

Silas Papare masuk Sekolah Desa ketika berumur 9 tahun di Serui dan tamat tahun 1930.³ Sekolah Desa lama belajarnya adalah 3 tahun

2. Makmur, Djohan dkk. *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: IDSN tahun 1993, hal. 78.

3. Biodata An Silas Papare, *op.cit.*

dengan bahasa pengantar adalah bahasa daerah. Sekolah Desa pada hakekatnya dimaksudkan untuk menghasilkan kaum tani dan kaum buruh terpelajar. Sekolah Desa merupakan sekolah baru yang berbeda dengan belajar di gereja yang sudah dikenal di Irian Jaya. Untuk sebagian besar orang tua bumi putera dari kalangan rendah tidak menghendaki anak-anaknya pergi ke sekolah dan lebih baik mereka membantu orang tuanya bekerja di sawah atau di kebun. Hal ini merupakan tradisi kehidupan sosial ekonomi bumi putera kalangan rendah.

Setamat dari Sekolah Desa, Silas Papare tidak langsung melanjutkan sekolah ketingkat yang lebih tinggi. Meskipun masih usia kanak-kanak waktunya tidak dihabiskan untuk bermain, tetapi selama 1 tahun ia telah membantu orang tuanya sebagai petani.

Musa Papare sebagai orang tua yang berpikiran maju menyarankan anaknya Silas Papare untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi agar nanti dapat menjadi pegawai negara (pamong praja), begitu pikiran Musa Papare. Kondisi kesehatan di Serui pada waktu itu sangat memprihatinkan banyak penyakit mewabah antara lain malaria, pes dan kolera. Melihat kondisi penduduk yang memprihatinkan maka Silas Papare pada tahun 1931 Silas Papare masuk sekolah juru rawat di Serui.

Pendidikan kedokteran di Indonesia baru dikenal pada tahun 1911 dimana beberapa orang dilatih sebagai juru cacar. Mengingat tuntutan kesehatan yang semakin kompleks akhirnya latihan kesehatan diperluas dengan pendidikan kesehatan secara umum. Lama pendidikan adalah 3 tahun. Silas Papare menempuh pendidikan juru rawat selama 3 tahun, sehingga ia telah mempunyai keahlian pembedahan ringan serta merawat pasien seperlunya. Pada masa itu di Serui masih sangat jarang orang yang mampu menjadi perawat kesehatan sehingga keahlian Silas Papare sangat dibutuhkan oleh orang-orang Serui maupun Belanda.

8.2 Pekerjaan

Irian Jaya yang terkenal ganas dengan nyamuk malaria merupakan tantangan tersendiri bagi Silas Papare sehingga sejak menyelesaikan

pendidikan juru rawat pada tahun 1935 Silas Papare langsung ditempatkan di Serui oleh Zending. Sebagai anak yang masih polos dan sederhana belum ada cita-cita menjadi dokter pada diri Silas Papare yang ada hanyalah apa yang dihadapi dikerjakan dan dijalannya. Kalau ia akhirnya menjadi juru rawat itu karena tuntutan keadaan dijajah Belanda dan alam yang ganas ini rumah sakit Serui Silas Papare menjadi juru rawat sampai tahun 1936.

Mengingat tenaga medis pada saat itu masih sangat terbatas maka ketika perusahaan minyak bumi NNGPM di Babo dibuka, Silas Papare dibawa sebagai tenaga medis di rumah sakit perusahaan minyak bumi di NNGPM. Di perusahaan minyak ini Silas Papare bukan tenaga medis satu-satunya tetapi banyak tenaga medis dari Jawa dan Belanda. Selama ditinggal Silas Papare maka rumah sakit Serui tenaga medisnya sangat kurang, sehingga pada tahun 1940 Silas Papare ditarik kembali ke rumah sakit Serui.

Semasa menjadi juru rawat Silas papare meskipun tidak didukung dengan pendidikan militer secara khusus, tetapi berkat penguasaan medan yang bagus telah dipercaya. Belanda sebagai tenaga inteljen. Prestasi yang pernah diraih pada masa Belanda adalah keberhasilannya bertugas melayani dan mengeluarkan rakyat Indonesia dari hutan semasa pendudukan Jepang antara lain di Serui, Biak dan Manokwari. Atas keberhasilannya pemerintah Belanda memberikan penghargaan berupa bintang perunggu yang diberikan oleh *Koningin Wilhelmina* di London pada 5 April 1945.

Pada masa pendudukan Sekutu dan Belanda sesudah perang dunia kedua, berkat pengabdianya dibidang inteljen, Silas Papare diangkat menjadi tentara Sekutu dengan pangkat sersan Persteklas. Karier dibidang militer ditekuni sampai tahun 1945. Berkat keberhasilannya membantu Sekutu melawan Jepang di Irian Jaya Silas Papare mendapat penghargaan dari bagian OPS Perang pasifik dari Biro Inteljen tentara Sekutu yang ditandatangani oleh G.A Willongby, Mayor Jenderal USA (US ARMY) pada 31 Oktober 1945.

Sejak Sekutu meninggalkan Irian Jaya dan digantikan oleh Belanda, Silas Papare tidak lagi sebagai tentara dan kembali sebagai

tenaga medis di Serui. Pada akhir tahun 1945 Silas Papare diangkat sebagai Kepala Rumah Sakit Zending di Serui.

Hubungan dengan kawan-kawannya di Jawa dan sambil berjuang untuk merdeka sehingga Silas Papare sering ke Jakarta. Sambil berjuang Silas Papare mengabdikan diri di kantor Kementerian Kesehatan Kota Praja, Jakarta Raya. Sebagai tenaga medis di jalani selama 3 tahun yaitu dari tahun 1951--1954.

Karier terakhir Silas Papare adalah sebagai anggota DPRS menggantikan almarhum Dr Radjiman Widiadinigrat dengan SK. Presiden RI No. 61 tahun 1954. Tahun 1956 Silas Papare diangkat sebagai anggota DPR wakil rakyat Irian Jaya dengan SK. Presiden RI No. 143 tanggal 1 Agustus 1956. Pada tahun yang sama diangkat sebagai anggota Dewan Perancang Nasional Sementara Republik Indonesia dan anggota MPRS. Sebagai wakil rakyat dijalaninya sampai pensiun sebagai anggota wakil rakyat tahun 1960.

8.3 Keluarga

Membina keluarga yang bahagia dan sejahtera adalah idamannya meskipun harus hidup dengan berjuang melawan penjajah tetapi Silas Papare selalu menyempatkan diri untuk membimbing anak-anaknya. Silas Papare bersama istrinya Regina Aibui dan 9 orang anaknya merupakan contoh keberhasilan dalam membina keluarga di Irian Jaya. Istrinya Regina Aibui adalah salah satu ibu rumah tangga yang patut dicontoh dalam mendidik anak-anaknya dalam kondisi perjuangan yang selalu diisi diliputi oleh rasa cemas dan diwarnai hidup dari satu penjara ke penjara lain. Namun kesetiaan dan pengorbanan kepada nusa dan bangsa merupakan prinsip utama yang selalu dipegang. Sampai meninggalnya pada tahun 1979 Regina Aibui selalu setia mendampingi suami tugas ke Jakarta dalam memperjuangkan Propinsi Irian Barat maupun ke luar negeri dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Irian Barat.

BAB IX

SILAS PAPARE DALAM MENYAMBUT KEMERDEKAAN

Keadaan hidup yang tertekan dan ditindas terus-menerus telah menimbulkan rasa keberanian. Meskipun keberanian itu masih sangat terbatas, namun dengan didukung oleh perasaan senasib maka akan menyala-nyala semangat untuk bertempur melawan sang penindas.

Di Irian Jaya perlawanan melawan penjajah dan ingin memerdekakan diri baru benar-benar dimulai pada masa penjajahan Jepang. Pada waktu sekitar tahun 1939 terjadi Gerakan Koreri yang dipimpin oleh Angganita. Menufandu dari Sowak. Pada waktu Jepang tiba di Irian Jaya Angganita ditangkap dan dipenjarakan. Gerakan selanjutnya dipimpin oleh Stefanus Simopiaref. Sejak dipimpin oleh Stefanus gerakan perlawanan terhadap Jepang bertujuan politik yaitu kemerdekaan Irian Jaya dari penjajah. Gerakan ini membuat bendera angkatan bersenjata yang disebut AB (Amerika Babo/ Amerika Baru).

Perlawanan terhadap Jepang secara terbuka terjadi pada 10 Oktober 1942 di pantai Manswan Biak Selatan. Dalam pertempuran dimana rakyat hanya mengandalkan persenjataan yang masih sangat sederhana dengan mengandalkan senjata parang, besi, panah dan ilmu kebal. Hanya semangat yang menyala-nyalalah yang ada sehingga berani melawan Jepang yang bersenjatakan peralatan perang yang modern pada waktu itu. Rakyat Irian Jaya berperang bagaikan benteng yang sedang terluka. Tetapi semangat dan niat suci saja tidaklah cukup

sehingga Jepang berhasil menumpas gerakan Koreri dan diperkirakan korban rakyat sebanyak 2000 orang sedang pihak pasukan Jepang tidak diketahui dengan pasti. Sebagian rakyat yang berhasil meloloskan diri, menghimpun diri dalam kelompok-kelompok kecil bergerilya mengganggu aktifitas Jepang sampai kedatangan tentara Sekutu.

Ditumpasnya gerakan perlawanan rakyat di Biak tidak memadamkan perlawanan di daerah lain yaitu Yapen Waropen. Di pulau Yapen Waropen gerakan perlawanan dipusatkan di kecamatan Yapen Timur. Di daerah ini gerakan perlawanan berhasil ditumpas Jepang dengan sangat kejam.

Sejak ditumpasnya gerakan di dua pulau itu yang terjadi hanyalah perang gerilya yang kapasitasnya sangat kecil, namun sangat merugikan Jepang. Dalam kondisi itu muncullah seorang Silas Papare yang pada waktu bertugas sebagai tentara intelijen Belanda. Pengalamannya sebagai intel dipergunakannya untuk menyusup ke hutan-hutan menghubungi saudara-saudaranya yang berhasil lolos dihimpun untuk melawan Jepang dengan menjalin kerja sama dengan Sekutu.

Sikap dan tindakan Jepang menginjak-injak norma adat dan gereja menimbulkan kebencian rakyat. Apalagi Jepang tidak segan-segan memberi hukuman, menyiksa orang dan memancung kepala orang yang dicurigainya sebagai musuh Jepang. Meskipun dalam keadaan tersiksa yang ada hanyalah semangat bahwa suatu saat akan datang jaman keemasan (*kargo cult*).

Rakyat yang sudah menderita dan membenci Jepang di Biak dan berita tentang kekejaman dan perbuatan najis tentara Jepang terhadap wanita-wanita Irian Jaya ditambah lagi dengan adanya berita akan datangnya tentara Sekutu untuk menghancurkan Jepang, telah dimanfaatkan Silas Papare untuk menghimpun kekuatan rakyat.

Tidak disangka-sangka bahwa dalam tubuh seorang anak nelayan yang langsing dan sederhana serta sedikit pendiam itu mengalir darah seorang pejuang dan tentara yang tidak pernah mengenal takut terhadap Jepang. Tanggung jawabnya sebagai generasi pertama yang terdidik daripada rakyat lainnya, serta pengalaman

merantau ke luar Serui, membuat rakyat menaruh harapan kepada Silas Papare sebagai pemimpin yang dapat memberikan ketenangan dan kemenangan dalam situasi tertindas.

Pada bulan April 1944 tentara Sekutu dibawah pimpinan Mac Arthur berhasil menyerang Hollandia (Jayapura sekarang) dan mengalahkan Jepang. Dari bukit Ifar Gunung dan Danau Sentani, Mac Arthur mendapat ilham untuk menyusun strategi perang loncat katak antar pulau. Ibarat katak-katak di Danau Sentani yang meloncat dari satu pulau ke pulau lain.

Bersamaan dengan masuknya Sekutu di Hollandia, Silas Papare telah berhasil menghimpun kekuatan rakyat di berbagai daerah di Biak, Yapen Waropen, Nabire dan Wandamen. Setelah merasa kekuatan rakyat mampu untuk menghadapi segala kemungkinan di medan perang meski hanya dibekali teknik berperang yang sederhana maka Silas Papare mencari kontak dengan pasukan Sekutu Amerika. Berita tentang kekalahan Jepang di Hollandia telah terdengar pula di Yapen Waropen sehingga membangkitkan semangat dan keberanian rakyat untuk melawan Jepang. Dalam cerita lokal bahwa suatu saat akan datang jaman keemasan yang mendatangkan pakaian, makanan, alat-alat dapur berlimpah yang dibagikan oleh Sekutu. Inilah ratu adil yang ditunggu-tunggu telah datang. Berdasarkan mitos Yapen Waropen inilah salah satu unsur yang memperkuat untuk mengusir Jepang.

Kemampuan dan kelebihan dari Silas Papare dapat dilibat dari kronologisnya pada waktu melawan Jepang diambil dari buku hariannya.

Pada 1 mei 1944 sebuah pesawat terbang sekutu turun dipantai pulau Nau, saya berenang menuju pesawat yang dikemudikan Letnan Van large, sersan penerbang semua laras senjata dalam pesawat itu diarahkan pada diri saya, tapi saya terus berenang mendekati pesawat, kemudian saya ditarik kedalam pesawat, Read saya diperlihatkan peta dengan garis merah yang menunjukkan posisi tentara Amerika di Aitapu, Wewake, Rebaul, Holandia dan rencana untuk menyerang Jepang di Biak. Setelah menerima informasi, saya berenang ke pantai membawa sebuah bendera Amerika.

Pada 2 Juni 1944 bendera Amerika berkibar di Nau ini menjadi tanda bagi pesawat terbang sekutu yang melayang berputar-putar untung saya mendarat pada posisi pendaratan yang lalu. Saya berenang ke pesawat dan diberi seragam tentara Amerika dan beberapa saat kemudian kami terbang menuju tempat yang belum saya ketahui. Setelah tiga seperempat jam di udara saya melihat barisan-barisan kapal-kapal perang di lautan dan kapal terbang di udara. Kami mendarat di lapangan udara Sentani pukul 09.30.

Pada 1 Juni 1944 Silas Papare yang telah dipercaya sebagai pemimpin gerilya rakyat Irian Jaya mengirimkan tiga pemuda yaitu Otniel Papare, Yehuda, Abiatur. Ketiganya disuruh berlari dari Manokwari ke Hollandia untuk menyampaikan informasi tentang posisi Jepang di Nabire dan Manukwari. Sedang Silas Papare bersama rakyat menyusun pertahanan di Serui untuk menyambut kedatangan Sekutu. Setelah berhasil menyusun kubu pertahanan di Serui Silas Papare bersama-sama dengan Eliezer Yan Bonai kembali ke markasnya di pulau Nau.

Berdasarkan informasi dari mata-mata yang di kirim oleh Silas Papare maka pada 5 Juli 1944 Sersan Rapmund, letnan Van Hoks dan Silas Papare membom kapal Jepang Daito Maru di sekitar Pulau Mionum. Kapal tersebut diperkirakan akan memberi bantuan peralatan di logistik tentara Jepang di Serui. Dari sinilah dimulai penyerangan terhadap markas Jepang di Serui dan berhasil merampas senjata dari tentera Jepang di Serui. Dari Serui Silas Papare dengan kapal Torpedo menuju Nau, mencari informasi dari pertahanan Jepang di Warenai. Hasil survei yang dilakukan Silas Papare maka untuk menghancurkan Jepang di Warenai dan Sorong harus membangun pertahanan di Nau. Bersama-sama rakyat selama 13 hari berlangsung pertahanan berhasil di bentuk di Nau.

Penyerangan dimulai 10 Agustus 1944 diperkirakan jumlah tentara Jepang 150 orang, sesuai petunjuk posisi Jepang di bom dari udara menyebabkan 12 tentara Jepang tewas dan lainnya melarikan diri. Namun usaha Silas Papare tidak berhenti dalam penyerangan 17 Agustus 1944 bersama-sama rakyat sisa tentara Jepang dibom di Mugim yang tinggal 139 tentara digempurnya dan hanya 39 orang

yang berhasil lolos sedang 100 orang tewas dan luka-luka kemudian dijadikan tawanan.

Keberhasilan menguasai basis-basis pertahanan Jepang, maka basis terbesar Jepang yang masih ada hanya tinggal di pos Muwari dan Manokwari. Silas Papare ditugaskan untuk mengadakan penelitian di sekitar Manokwari. Dari informasi Silas Papare dan anak buahnya maka diputuskan untuk mengadakan penyerangan pada 22 September 1944. Pukul 04.00 dini hari pos Jepang di Mowari dan Manokwari diserang dari berbagai arah. Dalam serangan itu dibebaskan Markus Kaisiepo dan Frans Kaisiepo yang berada dipihak Jepang sebagai Kempetai. Serangan darat terbesar di Manokwari berhasil menghancurkan gudang senjata dan gudang makan. Pertempuran Mowari kekuatan Jepang kira-kira lima batalyon tetapi berhasil didesak ke hutan. Pertempuran ini dilakukan oleh 12 tentara bersama gerilya rakyat. Dengan dikuasanya Manokwari maka seluruh kekuatan Jepang di Teluk Cendrawasih menyerah kepada Sekutu.

Dengan membaca kisah perjuangan Silas Papare di atas seolah-olah ia turut berperang dan menyambut kemenangan Sekutu atas Jepang. Namun yang patut kita ambil dari semua itu ialah betapa keberanian Silas Papare yang melakukan tugas-tugas intelijen menyusup ke daerah musuh untuk kembali dengan membom lewat udara atau memimpin serangan langsung di daratan. Dan berbicara perjuangan Silas Papare pada masa Jepang merupakan kekhususan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah dalam sejarah perjuangan bangsa. Bukan penjajah Belanda yang lama di Irian Jaya pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia tetapi Belanda meninggalkan Irian Jaya karena disiksa dan ditawan Jepang selanjutnya rakyat Irian Jaya melawan penjajah Jepang.

Sebagai diketahui Irian Jaya dibebaskan dari penjajahan Jepang sudah lebih awal dari wilayah Indonesia lainnya karena untuk terakhir kalinya negara Sekutu (AS) di bawah komando Jenderal Douglas Mc. Arthur menghancurkan pertahanan Jepang yang terakhir di Sausapor daerah kepala burung Irian Jaya pada 30 Juli 1944. Oleh karena sasaran Sekutu adalah negeri Sakura maka pengelolaan atas Irian Jaya diserahkan kepada NICA (*Nederlands Indie Civil*

Administration). Dengan demikian sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Irian Jaya telah dikuasai kembali oleh Belanda. Hal ini lain dengan daerah lain di Indonesia dimana Belanda kembali setelah kemerdekaan Indonesia.

Kedatangan NICA (Belanda) di Irian Jaya mengikutsertakan orang-orang Indonesia yang dijadikan tawanan di Digul kemudian di bawa ke Australia. Orang Indonesia yang dibawa kembali ke Irian Jaya adalah Sugoro. Ia dimanfaatkan oleh NICA sebagai penasehat pada kursus pamong praja bagi orang-orang Irian Jaya di Kampung Harapan, Jayapura. Siswanya antara lain Markus Kaisiepo, Frans Kaisiepo, Nicolas Youwe serta Lukas Rumkorem. Selain itu di rumah sakit NICA di Kampung Harapan terdapat Corinus Crey dan Silas Papare. Dilain pihak pada Batalyon Papua yang dibentuk oleh NICA terdapat Marthin Indey, orang Irian Jaya tersebut mendapat didikan kebangsaan oleh Sugoro. Melalui pertukaran pikiran mereka sering mengadakan rapat gelap membicarakan tentang perjuangan bangsa Indonesia. Kampung Harapan yang pada waktu itu bernama Kota Nica ternyata merupakan tempat pertemuan antar pejuang Irian Jaya yang mencita-citakan kemerdekaan Indonesia.

Akibat pertemuan-pertemuan gelap itu Silas Papare dan kawan-kawan merencanakan pemberontakan terhadap Belanda. Namun rencana itu gagal karena dikhianati oleh anak buahnya sendiri. Akibat rencana yang bocor tersebut Silas Papare ditangkap dan dipenjarakan di Jayapura. Dipenjarakan bukan membuat tokoh ini jera tetapi malah menambah semangat untuk segera merealisasikan cita-cita Indonesia merdeka. Pada tahun 1945 Silas Papare bersama-sama Lukas Rumkoren, Yan Waranu, Corinus Crey, G. Sawari dan SD. Kawab membentuk Dewan Perwakilan Siswa untuk membantu Sugoro dalam urusan kesiswaan agar dapat mempermudah dan memperluas ide tentang Indonesia merdeka.

Sementara itu di Jakarta 17 Agustus 1945 Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan Indonesia, dimana batas teritorialnya meliputi seluruh bekas jajahan Hindia Belanda dari Sabang sampai Merauke. Berita kemerdekaan tersebut tiba di Irian Jaya agak terlambat, yaitu dibawa oleh para pelaut yang

berlayar dari Australia menuju Singapura. Mereka dititipi pamflet-pamflet tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh orang-orang Indonesia yang berada di Brisbane Australia. Orang-orang Indonesia itu terhimpun dalam Indonesia Political Exile Association (IPEA). Selanjutnya di Melbourne juga didirikan organisasi Komite Indonesia Merdeka (KIM).

Mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka yang meliputi wilayah Irian Jaya maka arah perjuangan menjadi lebih jelas yaitu melawan Belanda untuk merdeka bergabung dengan Republik Indonesia. Reaksi rakyat yang muncul sangat hebat, dikibarkannya bendera merah putih secara penuh sedang bendera Belanda dan Amerika Serikat dikibarkan setengah tiang. Belanda dengan berbagai agitasi-agitasi dan penindasan berusaha mematahkan semangat perjuangan rakyat. Selain itu dibidang diplomasi Belanda telah memasukkan Irian Jaya sebagai bagian dari wilayah teritorialnya.

Menanggapi kenyataan tersebut Silas Papare sebagai panglima perang yang telah berhasil mengusir Jepang dari Irian Jaya menyatakan memilih bergabung dengan Republik Indonesia, daripada janji-janji kosong Belanda. Selain usaha-usaha tersebut Belanda pada bulan Juli 1946 mengadakan konperensi Malino di Makassar. Sekembalinya dari konperensi Malino pemerintah Belanda di Irian Jaya membuat pertemuan di Wasior. Pertemuan bermaksud menjelaskan hasil-hasil konperensi Malino. Dalam kesempatan ini hadir Silas Papare, Frans Kaisiepo, Corinus Crey, Lukas Rumkorem, Nicolas Youwe, Markus Kaisiepo dan lain-lain. Pemerintah Belanda kembali menawarkan janji-janjinya untuk kemerdekaan Irian Jaya dalam kesatuan Belanda. Suasana tegang tidak seorangpun berani menentang kehendak itu, tetapi jiwa pejuang dan keberanian Silas Papare yang tadinya duduk langsung berdiri dan tidak bersedia menerima janji-janji Belanda dan memilih merdeka dalam kesatuan negara Republik Indonesia.

Berawal dari sinilah akhirnya putra-putra Irian Jaya telah terdapat dua kubu yang saling bertentangan dan berbenturan. Disatu pihak adalah Nicolas Youwe dan Markus Kaisiepo yang bermarkas di Hollandia dan Biak sebagai basis Belanda. Sedang kubu Silas Papare adalah memproklamirkan Serui dan Yapen Waropen sebagai basis

pejuang Indonesia. Pertemuan Serui telah gagal tanpa menghasilkan konsensus. Namun Belanda tetap berusaha dengan akal liciknya untuk mengadakan *divide et impera* terhadap semua pejuang Irian Jaya.

Silas Papare dan kawan-kawannya kebetulan pada saat itu telah berkenalan dengan eks Digulis lainnya yaitu Hajono dan Suprpto. Perkenalan ini telah menumbuhkan rasa nasionalisme bahwa melawan Belanda haruslah dengan taktik dan strategi sehingga perlu organisasi yang mapan. Akhirnya pada 29 September 1945 Silas Papare dan eks Digulis lainnya mendirikan Komite Indonesia Merdeka (KIM) yang merupakan tindak lanjut dari keberadaan KIM yang ada di Meolbourne di Australia. Tujuan dari KIM adalah menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan selanjutnya, mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945 serta menangani pemulangan-tawanan perang.

Pada 25 Desember 1946 bersama-sama dengan Marthin Indey, Corinus Crey, Silas Papare dapat mempengaruhi Batalyon Papua (bentukan tentara Sekutu) untuk mengadakan pemberontakan terhadap Belanda dengan tujuan untuk mewujudkan kemerdekaan di Irian Jaya. Akibat kebocoran dan pengkhianatan dari anak buah Batalyon Papua rencana tersebut gagal, sehingga Belanda mendatangkan bantuan dari Rabaul (Papua Timur). Akibatnya Silas Papare dan Marthin Indey ditangkap dan dipenjarakan di Hollandia (Jayapura).

Meskipun dipenjarakan di Hollandia kontak dengan kawan-kawan seperjuangan tidak putus. Tanggal 17 Juli 1946 Silas Papare merencanakan pemberontakan dengan sasaran melucuti senjata serdadu KNIL menangkap pembesar-pembesar serdadu Belanda, pendudukan stasiun radio dan onjek vital lainnya. Namun rencana tinggal rencana, Belanda melalui mata-matanya berhasil membongkar rencana ini sehingga Silas Papare ditangkap dan diasingkan di Serui. Di Serui Silas Papare berjuang sambil bekerja di Rumah Sakit Serui.

Pada saat itu 5 Juli 1946 Serui digunakan sebagai pengasingan Gubernur Sulawesi Selatan dan stafnya GSSJ Sam Ratulangi, Lanto Daeng Pasewang, Saleh Daeng Tompo, Latumabine, Suwarno, JPI. Tobing dan WST. Pondaag. Oleh Belanda mereka dijuluki

“tujuh oknum berbahaya”, sehingga orang-orang Irian Jaya dilarang untuk mengadakan hubungan dengan tujuh orang tersebut. Larangan itu tidak dihiraukan oleh rakyat Irian Jaya. Diam-diam Silas Papare dan kawan-kawan menjalin hubungan dengan Sam Ratulangi dan telah menambah semangat perjuangan rakyat Irian Jaya. Bimbingan dan arahan dari Sam Ratulangi tidak sia-sia. Pada 23 Nopember 1946 Silas Papare mendirikan organisasi Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) di Serui. Inilah untuk pertama kalinya nama Irian digunakan sebagai alat perjuangan melawan Belanda. Sedangkan untuk mengakomodasi aspirasi rakyat PKII menggunakan majalah *Suara Irian* yang materinya disiapkan dari Serui dan diterbitkan, di Jawa. Kedatangan Sam Ratulangi di Irian Jaya telah membawa dampak cukup luas bagi perjuangan rakyat Irian Jaya. Tujuan utama dari PKII adalah kemerdekaan Indonesia meliputi seluruh wilayah Irian Jaya. Sebagai ketua pertama kali dipilih Silas Papare, organisasi ini makin lama berkembang menjadi besar dan dianggap berbahaya bagi Belanda sehingga Silas Papare ditangkap dan diasingkan ke Biak.

Meskipun diasingkan di Biak pengaruh PKII dan KIM sangat luas dan telah menyebar ke seluruh daratan Irian Jaya. Ditandai dengan berdirinya Gerakan Merah Putih (GMP) di Manokwari oleh Petrus Wattedebessy bersama SD. Kawab. Di Sorong Sangaji Malan mendirikan organisasi yang diberi nama Perintis Kemerdekaan pada tahun 1946 sehingga pengaruh organisasi yang didirikan oleh Silas Papare telah memberikan dasar yang kuat bagi perjuangan rakyat Irian Jaya untuk mewujudkan proklamasi 17 Agustus 1945.



BAB X

PERAN SILAS PAPARE DALAM ARUS SEJARAH

Membicarakan peran Silas Papare dalam arus sejarah, nampaknya telah dilakukannya melalui jalan yang cukup panjang. Jauh sebelum Republik Indonesia ini ada Silas Papare sudah menunjukkan aktivitasnya dalam gerakan perjuangan Kebangsaan. Perjuangannya yang dilakukannya bukanlah berupa tindakan mengangkat senjata melawan penjajah, akan tetapi perjuangan yang dilakukan adalah usahanya memajukan diri dengan melalui gerak-gerakan tentang kebangsaan yang kesemua itu disumbangkan untuk kepentingan negara dan bangsanya. Dan ini dibuktikannya dalam aktivitas-aktivitas yang diperankan oleh Silas Papare terutama dalam memperjuangkan Irian Barat agar kembali kepangkuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Peran-peran Silas Papare dalam arus sejarah telah dimulai jauh sebelum Indonesia Merdeka, di mana ia telah menunjukkan identitasnya bahwa ia adalah putra bangsa, bangsa Indonesia.

Perjuangan bangsa Indonesia mencapai puncaknya adalah ketika Soekarno-Hatta membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pernyataan atau Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang telah diucapkan oleh Soekarno-Hatta itu disambut seluruh rakyat dengan perasaan gembira dan berita tersebut kemudian menyebar luas keseluruh pelosok tanah air dan akhirnya didengar oleh rakyat Irian Barat. Berita ini bersumber dari

berita yang terus menerus disiarkan oleh putra-putra Indonesia melalui kantor berita Domei dan berita kemerdekaan ini ditangkap juga di Australia. Atas inisiatif dan usaha orang-orang Indonesia, khususnya para pejuang eks Digulis yang sudah berada di Australia, segera menerbitkan berita proklamasi tersebut ke dalam pamflet-pamflet. Selanjutnya pamflet itu disebarluaskan antara lain ke Brisbane, Kamp Kasino, Sidney, Melbourne, Merauke dan bahkan sampai ke Ujung Pandang (dahulu Makassar) dan Balikpapan. Dari kota Merauke inilah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diketahui para pejuang kemerdekaan di Irian Barat.

Semangat kebangsaan Silas Papare semakin mengkrystal setelah bertemu dengan Soegoro Atmoprasodjo, salah seorang eks pejuang Digulis yang juga bekas pemuka Taman Siswa Yogyakarta. Soegoro Atmoprasodjo dan para pejuang eks Digulis yang melarikan diri ke Australia pada masa pendudukan Jepang, ditarik kembali untuk bekerja di Irian Barat oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari rakyat Irian Barat dan demi menegakkan dominasi kolonialnya di Irian Barat. Oleh karena Pemerintah Kolonial Belanda sangat membutuhkan tenaga dalam bidang pemerintahan, maka dengan sendirinya para pejuang eks Digulis ini disertai beberapa jabatan dalam bidang pemerintahan, di sisi lain tanpa sepengetahuan Pemerintah Kolonial Belanda, para pejuang eks Digulis ini menggunakan kesempatan yang baik itu untuk menanamkan benih dalam jiwa para pejuang di Irian Barat.

Soegoro Atmoprasodjo diangkat oleh Pemerintah Kolonial sebagai Penasehat Direktur Pendidikan dan Agama untuk daerah-daerah yang dibebaskan. Di samping jabatan tersebut Soegoro Atmoprasodjo dipercayai juga untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan yaitu Sekolah Bestuur (Pamong Praja) di Kampung Harapan Jayapura yang semula bernama Kotanika. Pendidikan Pamong Praja ini diadakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dalam bidang pemerintahan. oleh karena itu sebagian besar peserta Pendidikan Bestuur ini didatangkan dari berbagai daerah di Irian Barat. Dengan harapan setelah selesai mengikuti pendidikan ini kelak dapat menempati pos-pos pemerintahan yang berada di daerah-daerah

Irian Barat. Namun, dalam kenyataannya penyelenggaraan Pendidikan Bestuur ini selain sebagai sarana untuk menghasilkan manusia terdidik juga dimanfaatkan oleh Soegoro Atmoprasodjo untuk menanamkan kepada murid-muridnya ajaran tentang kemerdekaan dan patriotisme dalam rangka Indonesia merdeka. Selain itu juga sebagai pusat diskusi para pejuang kemerdekaan. Dalam usaha menyampaikan cita-citanya itu Soegoro Atmoprasodjo sering mengadakan pertemuan rahasia dengan pemuda Irian Barat seperti Silas Papare, Frans Kaisiepo, Corinus Crey, Lukas Runkorem, dan Marthen Indey guna membabas upaya penyatuan Nederlands Nieuw Guinea ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut para pemuda dilatih menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Hasil nyata dari kegiatan-kegiatan tersebut terlibat adanya tanggapan rakyat Irian Barat yang pertama di tandai dengan terjadinya insiden bendera pada tanggal 31 Agustus yang bertepatan dengan hari kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina. Ketika Senior Officer Nica yaitu R. Abdul Kadir Widjoatmodjo mempersiapkan perayaan hari ulang tahun Ratu Belanda tersebut, seluruh rakyat diperintahkan untuk mengibarkan bendera Belanda, Merah Putih Biru. Akan tetapi didalam kenyataannya yang terjadi adalah rakyat di Irian Barat mengibarkan bendera Sang Merah Putih secara penuh, sedangkan bendera Belanda dan bendera Amerika dikibarkan setengah tiang.¹

Peristiwa atau insiden tersebut jelas mencerminkan manifestasi gejala hati putra-putra Irian Barat untuk menghirup alam kemerdekaan Indonesia. Kegiatan-kegiatan para pejuang kemerdekaan di Irian Barat berupa rapat-rapat di Jayapura. Bahkan tiga hari sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1945 di Kampung Harapan Jayapura telah dikumandangkan lagu kebanggaan Indonesia Raya oleh Marcus Kaisiepo, Nicolas Youwe dan kawan-kawan.

1. Badan Pembinaan Pahlawan Daerah Tingkat I Irian Jaya. *Riwayat Perjuangan Silas papare* (Naskah): Drs. Bondan Soedharto dkk. Sejarah Perjuangan Rakyat Irian Jaya. Kerjasama Universitas Cendrawasih dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Irian Jaya. Jayapura, 1989. hal. 89, 110, 177, 201--218.

Dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Marthin Indey bersama-sama teman, murid-murid Kursus Sekolah Bestuur, pimpinan Soegoro Atmoprasodjo, lepasan Digul telah menunjukkan dirinya bahwa mereka itu adalah aktivis pejuang yang militan. Murid-murid lepasan sekolah ini telah berperan aktif karena telah tertempa menjadi manusia terdidik dan terpelajar dan yang paling penting bahwa mereka itu berperan sebagai eksponen dalam memperjuangkan kemerdekaan. Mereka itu telah aktif melakukan kegiatan istimewa menyampaikan pesan-pesan kemerdekaan.

Untuk meraih cita-cita itu pemuda-pemuda telah mengikat tali rasa persatuan kebangsaan yang ditandai dengan terbentuknya Dewan Purwa Kelan Suku yang datang dari berbagai suku dari Irian Barat. Berdirinya badan ini bukan saja untuk kepentingan sekolah dalam arti kepentingan mereka dengan guru, melainkan juga telah dimanfaatkan sebagai forum kontak, tukar pikiran antara murid dan murid dan antara murid dengan guru, sehingga karenanya makin memperluas wawasan serta pemahaman tentang kemerdekaan. Kesemua itu telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan Silas Papare, Lukas Romkore, Yan Waromi, Corinus Crey, Marthen Indey, G. Saweri, SD Kawab dalam upaya menyebarkan semangat kemerdekaan kepada seluruh lapisan rakyat Irian Barat untuk disambut dan ditegakkan.

Bertolak dari faham kebangsaan yang telah diserap dan dibangkitkan oleh Silas Papare bersama kawan-kawan telah pula menusuk ke dalam tubuh Batalyon Papua yang telah dibentuk ketika pendaratan Sekutu. Dan dengan semangat Kemerdekaan putra-putra Irian Barat baik yang menjadi anggota Batalyon Papua, maupun Polisi serta orang Sipil telah dilancarkan ajakan untuk melakukan pemberontakan. Untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan maka diadakan kontak dengan para tokoh perjuangan seperti Silas Papare, Marthen Indey dan Corinus Crey. Dengan memperoleh kata sepakat kemudian ditetapkanlah waktu yang tepat dan dari kesepakatan tersebut diputuskan bahwa pemberontakan akan dimulai pada tanggal 25 Desember 1945. Pemberontakan ini merupakan suatu aksi yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan di Irian Barat. Namun demikian rencana pemberontakan ini dapat tercium oleh Pemerintah

Kolonial Belanda. Dengan bantuan pasukan dari Rabaul (Irian Timur) yang sekarang bernama Papua New Guinea dilakukan penangkapan terhadap 250 orang termasuk Soegoro Atmoprasodjo, Silas Papare, dan Marthen Indey Sebagai penanggungjawab dalam rencana pemberontakan ini, maka sebagai tertuduh adalah Silas Papare, Marthen Indey, dan Soegoro Atmoprasodjo dijatuhi hukuman penjara, sedangkan anggota lainnya dibebaskan dari tuduhan.

Meskipun mereka itu ditahan dalam penjara, para pejuang ini tidak berhenti dan secara diam-diam merencanakan lagi untuk melakukan pemberontakan berikutnya dan pelaksanaannya ditetapkan pada tanggal 17 Juli 1946. Pemberontakan ini dipimpin oleh Panggoncang Alam pejuang asal Minangkabau. Yang menjadi sasaran pemberontakan adalah melucuti persenjataan tentara KNIL menangkap pembesar-pembesar Belanda, menduduki stasiun radio dan tempat vital lainnya. Akan tetapi rencana yang telah terinci dan matang ini tercium lagi, karena ada yang membocorkan, maka sebelum tercapai tujuannya Pemerintah Kolonial Belanda telah mengadakan pembersihan. Sehubungan dengan hal ini Marthen Indey yang dianggap sebagai tokoh pemberontakan tersebut segera dipindahkan dari Jayapura ke Serui.

Melihat kenyataan yang demikian, bahwa setiap adanya usaha untuk menggerakkan pemberontakan selalu mengalami kegagalan, maka kemudian dibentuklah suatu organisasi yang tersusun rapi. Hal ini disadari bahwa untuk dapat mencapai tujuan haruslah menghimpun serta mengerahkan seluruh kekuatan rakyat dan untuk itu agaknya diperlukan suatu wadah organisasi politik. Tanpa wadah yang dapat menampung aspirasi rakyat serta mengatur gerak langkah perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan, maka akan sedikit sekali hasil yang dapat diperoleh. Dengan bimbingan para eks Digulis seperti Haryono dan Suprpto dibentuk organisasi Komite Indonesia Merdeka (KIM). Komite Indonesia Merdeka ini sebenarnya berpusat di Melbourne yang didirikan pada tanggal 29 September 1945 dengan ketuanya Jamaluddin Tamin dan anggota-anggotanya antara lain Maskun, Kandur Maryono dan lain-lain. Di samping bertujuan membela dan mempertahankan proklamasi 1945, Komite Indonesia Merdeka juga bertugas dalam urusan repatriasi atas pemulangan

orang-orang Indo ke tanah airnya dengan menolak campur tangan Belanda. Selanjutnya, Komite Indonesia Merdeka yang didirikan di Jayapura pada bulan oktober 1946 diketuai oleh Dr. T.A. Gerungan, seorang dokter wanita yang mengepalai sebuah rumah sakit di Abepura Jayapura. Sebagai wakilnya ialah Lattuparisa, sedangkan sekretaris I ialah Corinus Crey, sekretaris II ialah Subroto. Sedangkan Silas Papare pada saat itu hanya sebagai anggota biasa. Dalam perkembangan selanjutnya pengurus Komite Indonesia Merdeka ini beralih kepada putra asli Irian dengan Ketuanya Marthen Indey, Corinus Crey sebagai wakilnya, dan Petrus Watebossy sebagai sekretaris.

Pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 Juli 1946 di ujung Pandang (dahulu namanya Makassar) diadakan Konperensi Malino. Konperensi ini dimaksudkan untuk mendukung gagasan Van Mook tentang pembentukan negara federal Indonesia. Bentuk negara federal ini di dalamnya akan bergabung satu Uni dengan Kerajaan Belanda. Di dalam konperensi tersebut, sebagai wakil dari Irian Barat yang ditunjuk oleh Pemerintah Kolonial Belanda (PKB) untuk menghadiri Konperensi Malino adalah Frans Kaisiepo. Sebelum keberangkatan Frans Kaisiepo ke Konperensi Malino, ia telah diberi bekal berupa pikiran-pikiran yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia oleh teman-temannya. Dengan melalui pertemuan di Jayapura Frans Kaisiepo, Corinus M. Crey serta Marcus Kaisiepo bersama Soegoro Atmoprasodjo telah membicarakan masalah keberangkatan wakil-wakil Irian Barat dalam Konperensi Malino itu. Salah satu "bekal" itu ialah mengganti kata Papua dengan kata IRIAN. Hal ini merupakan suatu peringatan bersejarah. Karena di dalam kesempatan menyampaikan pidato dihadapan para peserta Konperensi Malino tanggal 18 Juli 1946, Frans Kaisiepo menyodorkan atau mengusulkan sebuah gagasan yang isinya sangat mengejutkan pihak Belanda, yaitu agar nama Papua dan Nederlands Nieuw Guinea yang dipakai selama ini ditiadakan dan diganti dengan kata atau nama IRIAN. Sedangkan pengertian IRIAN menurut Frans Kaisiepo adalah ikut Republik Indonesia Anti Nederlands. Pidato Frans Kaisiepo yang telah disampaikan tersebut pada malam harinya oleh Radio Makassar (ujung Pandang) dalam siarannya, langsung menyiarkan berita, tentang penggantian nama Papua dan Nederlands Nieuw Guinea menjadi IRIAN.

Penggantian kata Papua dengan kata IRIAN itu mempunyai makna tersendiri, karena dengan itu rakyat Irian Barat hendak menunjukkan identitas dan menjalankan aspirasinya terhadap budaya bangsanya. Kata Irian yang berarti ; panas yang dikemukakan oleh Frans Kaisiepo berasal dari bahasa Biak, sedangkan kata Papua sebenarnya mula-mula digunakan oleh pelaut-pelaut Portugis dan Spanyol. Sejak itu Pemerintah Indonesia menggunakan kata IRIAN, sebaliknya Pemerintah Kolonial Belanda melarang penggunaan kata IRIAN dan tetap menggunakan kata Papua. Sedang kata IRIAN yang diucapkan Frans Kaisiepo di depan sidang Konperensi Malino sebenarnya sudah diberitahukan lebih dahulu oleh Surat Kabar Penyuluh di Brisbane, Australia. Pengirim artikel tentang penggantian nama Papua menjadi IRIAN kepada surat kabar tersebut sebenarnya di lakukan oleh dua bersaudara yaitu Markus Kaisiepo dan Frans Kaisiepo. Gagasan untuk mengganti nama tersebut telah dicetuskan oleh Frans Kaisiepo. Sewaktu mengikuti Kursus Kilat Bestuur di Kota Nica Belanda. Ia tidak setuju dengan papan nama kursus/sekolah yang bertuliskan "PAPUA BESTUUR SCHOOL.". Karena itu ia menyuruh saudaranya, Marcus Kasiepo untuk mengganti dengan nama "IRIAN BESTUUR SCHOOL.". Tercetusnya gagasan dua bersaudara tersebut adalah atas saran Soegoro Atmoprasodjo.

Kehadiran Frans Kaisiepo dalam Konperensi Malino telah mengecewakan Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga diadakan lagi Konperensi Denpasar sebagai kelanjutan Konperensi Malino yang diselenggarakan pada tanggal 20--24 Desember 1946. Irian Barat tidak diperbolehkan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti Konperensi tersebut. Agaknya tanpa wakil dari Irian Barat dalam konperensi tersebut dimaksudkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda agar tidak merintangi niatnya untuk memisahkan Irian Barat dari Indonesia.

Berhubung dengan usaha Belanda untuk memisahkan wilayah Irian Barat dari Indonesia secara nyata dalam Konperensi Denpasar yang berlangsung pada tanggal 20 sampai 24 Desember 1946, para pejuang Irian Barat minta kepada Residen Van Eechoud agar ada wakil-wakil rakyat Irian Barat yang dikirim menghadiri konperensi tersebut. Akan tetapi permintaan itu ditolak, sehingga pada tanggal

12 Desember 1946 Marthen Indey, Corinus Crey dan Nicolas Youwe mengirim telegram kepada H.J. Van Mook di Denpasar. Adapun isi telegram itu menyatakan agar Irian Barat tidak dipisahkan dari wilayah Republik Indonesia. Dalam kaitan ini Marthen Indey termasuk orang yang menantang pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) sebab wilayah Irian Barat tidak dimasukan ke dalam Negara Indonesia Timur.

Sementara itu, pada tanggal 5 Juli 1946 perjuangan dari rakyat Serui untuk melepaskan diri dari Belanda semakin memuncak. Seperti halnya dari daerah-daerah lain di Irian Barat, dari Serui ini lahirlah para pejuang yang bukan hanya berjuang di Serui saja tetapi juga menyebar ke daerah-daerah lain di Irian Barat. Ada beberapa sebab yang mendorong perkembangan ke arah itu yaitu adanya kontak antara penduduk setempat dengan penduduk yang berada di luar Serui, juga sebagai akibat diasingkannya tokoh pejuang nasional dr. GSSJ Ratulangi beserta 6 orang stafnya. Tujuan Belanda mengasingkan para pejuang ke Serui tiada lain adalah untuk mematahkan semangat juang dan guna politik memecah belah atau politik adu dombanya dapat terlaksana, karena Serui dianggap sebagai daerah terpencil jauh dari pusat pergolakan di Jawa. Namun ternyata, justru dengan kehadiran para pejuang tersebut memberi dorongan kepada para pejuang asal Irian Barat. Sehingga dapat dikatakan bahwa politik Pemerintah Kolonial Belanda tidak berhasil dilaksanakan di Irian Barat.

Pada mulanya kedatangan Dr. GSSJ Ratulangi dirahasiakan oleh Belanda. Mereka khawatir akan menimbulkan perkembangan baru yang tidak diharapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Mereka di larang berjumpa dengan penduduk setempat, begitu pula sebaliknya. Namun tidak demikian halnya demikian para pemuda seperti Silas papare dan Stevanus Rumbewas yang sudah memiliki semangat kebangsaan mengabaikan perintah tersebut dan mereka berusaha untuk mengunjungi para tahanan. Dari hasil mengunjungi para tahanan, barulah rakyat mengetahui dengan benar bahwa mereka itu bukan penjahat seperti yang digambarkan oleh pihak Belanda. Dengan demikian terjadilah kontak antara rakyat setempat dengan para pejuang yang diasingkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Kehadiran Gubernur GSSJ Ratulangi dan stafnya di Serui adalah sebagai akibat pendudukan kota Makasar oleh NICA Belanda. Dibuangnya Dr. GSSJ Ratulangi ke Serui tidak menjadi hambatan dalam melanjutkan pekerjaan dan perjuangan Dr. GSSJ Ratulangi baik sebagai Gubernur maupun sebagai pejuang kawakan Indonesia. Kota Serui hanyalah sebuah kota Distrik yang berada di bawah Karesidenan Biak, dengan kehadiran Dr. GSSJ Ratulangi telah berperan sebagai Pusat Pemerintahan Gubernur di pembuangan dan Pusat Pemerintahan Sementara Propinsi Sulawesi Utara di pengasingan. Hubungan antara Dr. GSSJ Ratulangi dan penduduk setempat membawa akibat rakyat Serui semakin menyadari bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dari Sabang sampai Merauke. Mereka tidak gentar menghadapi pihak Pemerintah Kolonial Belanda dalam menerima benih-benih patriotisme dari para Dr. GSSJ Ratulangi dan kawan-kawan.

Sementara itu para tahanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya oleh Pemerintah Kolonial Belanda diberi kebebasan bergerak di luar tahanan untuk berkebudai di ladang. Kebebasan ini dimanfaatkan oleh para tahanan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia antara Dr. GSSJ Ratulangi dan kawan-kawan dengan tokoh masyarakat serta pemuda setempat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan olah raga. Dr. GSSJ Ratulangi telah berhasil mendidik banyak kader Republik yang tidak pernah mau bekerjasama dengan Belanda. Dengan adanya pertemuan-pertemuan tersebut, maka pada tanggal 29 Nopember 1946 terbentuk Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) dengan Ketuaanya Silas Papare, Wakil Ketua Alwi Rahman, Sekretaris I Ari Kamarea, Sekretaris II Andreas Samberi. Organisasi ini dibentuk atas bimbingan dan sekaligus sebagai penasehat adalah Dr. GSSJ Ratulangi. Tujuan partai ini adalah memperjuangkan kemerdekaan seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Dengan adanya PKII ternyata mempunyai pengaruh yang besar dan meluas di seluruh daerah Irian Barat, terbukti dengan adanya pembukaan cabang PKII di Biak, Manokwari dan Sorong. Untuk mencapai tujuannya, PKII berjuang dalam berbagai bidang antara lain bidang politik dan bidang ekonomi. Di samping itu persatuan antara para pejuang dan rakyat setempat diwujudkan pula dengan

menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Propaganda-propaganda terus dilancarkan ke seluruh Serui.

Sementara PKII terus mengaktifkan kegitannya, pihak Pemerintah Kolonial Belanda mulai mencium dan mencurigai perkembangan dari organisasi ini bahkan tokoh organisasinya yaitu Silas Papare segera ditangkap karena adanya informasi bahwa PKII akan mengadakan pembontakan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda di Serui. Namun akhirnya dapat dibebaskan berkat usaha dari Alwi Rahman dan Animan beserta rakyat Serui. Meskipun demikian, pihak Pemerintah Kolonial Belanda masih tetap khawatir terhadap kehadiran Silas Papare di Serui yang akan menimbulkan semangat kebangsaan dalam diri para pejuang lainnya. Oleh sebab itu Pemerintah Kolonial Belanda segera memindahkan Silas Papare ke Biak dengan alasan Silas Papare sedang sakit ingatan sehingga perlu dirawat di rumah sakit Biak.²

Sesuai dengan alasan yang diberitakan oleh pihak Pemerintah Kolonial Belanda, bahwa Silas Papare menderita sakit ingatan, hal itu dipergunakan olehnya untuk mengeluhai pihak Pemerintah Kolonial Belanda agar dapat berangkat ke Jawa yang sesungguhnya adalah untuk meneruskan perjuangannya di luar pulau Irian Barat.

Perjuangan yang sedang berlangsung di Irian Barat perlu didukung oleh rakyat diseluruh Indonesia. Jawa sebagai pusat pemerintahan, jelas membutuhkan berbagai informasi dan hubungan kerjasama, maka tepatlah sikap dan tindakan Silas Papare untuk berangkat ke Jawa.

Pada tanggal 16 Maret 1945 Silas Papare dengan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian mengajukan Mosi kepada Pemerintah Republik Indonesia, Parlemen Negara Indonesia Timur, dan Pemerintah Belanda serta Komisi Tingkat Negara. Mosi itu berbunyi sebagai berikut :

1. Menuntut kepada Pemerintah Hindia Belanda, mengakui Mosi Parlemen Negara Indonesia Timur dan dengan secepat-cepatnya Daerah Irian Barat dijadikan bagian Negara Indonesia Timur.

2. Drs. Bondan Soedharto dkk. *ibid.* hal 72--83 : Perjuangan Rakyat Yapen Woropen Bersama Silas Papare. Serial Sejarah Perjuangan. hal 14--17

2. Menuntut kepada Pemerintah Republik Indonesia mendesak kepada Komisi Tiga Negara supaya daerah ini tidak dijadikan Daerah Istimewa.
3. Menuntut Komisi Tiga Negara supaya keinginan rakyat dari daerah ini untuk menentukan nasibnya tidak dihalangi.

Dari isi Mosi Partai Kemerdekaan Indonesia Irian tadi dapat dianalisa betapa perjuangan PKII yang meskipun berada di Serui namun menjawab tantangan secara nasional. Mosi butir 1 diajukan karena Van Mook ingin memisahkan Irian Barat dari Negara Indonesia Timur. Sedangkan butir 2 diajukan karena terkesan adanya upaya dari pihak Komisi Tiga Negara untuk menghalang-halangi aspirasi rakyat yang disalurkan melalui Partai Kemerdekaan Indonesia Irian untuk memilih menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur serta mengakui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dari Sabang sampai Merauke. Mosi PKII tanggal 16 Maret 1949 membuktikan bahwa PKII bukanlah Partai yang hanya nama saja, tetapi secara sungguh-sungguh memanfaatkannya sebagai media untuk menyalurkan aspirasi politik yang tujuannya adalah :

1. Menyuarakan keinginan rakyat sebagai bahan untuk Pemerintah Indonesia - Belanda - PBB (KTN)
2. Mendukung perjuangan Pemerintah Republik Indonesia menghadapi politik Belanda, di mana Mosi PKII membuktikan bahwa rakyat Irian Barat pro Indonesia dan menentang Belanda.

Peranan PKII sebagai kader dan alat demokrasi yang didukung oleh kekuatan Pers Nasional di Daerah telah membedakan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian pimpinan Silas Papare dari organisasi-organisasi politik lainnya di Irian Barat.³

Ketika akan dilangsungkan Konperensi Meja Bundar di Den Haag, oleh Pemerintah Republik Indonesia Silas Papare diikutsertakan sebagai delegasi Indonesia menuju Konperensi Meja Bundar dimana secara tidak langsung Silas Papare mewakili Partai Kemerdekaan Indonesia Irian. Dalam perundingan KMB, masalah status Irian Barat

3. Perjuangan Rakyat Yapen Waropen Bersama Silas Papare. *ibid.* hal. 17--20

hampir saja menggagalkan seluruh perundingan KMB. Kawatir KMB mengalami kegagalan, maka Badan Perserikatan Bangsa Bangsa yaitu UNCI menawarkan usul kompromi yang kemudian menjadi Pasal 3 Piagam Pengakuan Kedaulatan yang intinya berbunyi bahwa "Status Quo Nieuw Guinea akan dibicarakan setahun kemudian (1950) antara Belanda - Indonesia". Dengan rumusan demikian, maka Belanda berhasil memperpanjang penjajahannya di Irian Barat. Agaknya alternatif itu sudah disiapkan oleh UNCI dan juga Belanda sebagai "Harga" yang harus diterima oleh Indonesia untuk menerima kedaulatan penuh tanpa syarat dari Nederland.

Silas Papare dan J. Latumahina tidak mau menerima formulasi Pasal 3 Piagam Pengakuan Kedaulatan tadi karena memberikan status tidak jelas untuk Irian Barat.

Sementara itu Silas Papare yang sudah berada di Pulau Jawa bersama dengan J. Latumahina dan St. Joseph pada tanggal 12 Oktober 1949 mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Sehubungan dengan Pasal 3 Piagam Pengakuan Kedaulatan, pada tanggal 12 Nopember 1950 Badan Perjuangan Irian bersama Partai Kemerdekaan Indonesia Irian di bawah pimpinan Silas Papare mengeluarkan pernyataan bersama yang berbunyi :

1. Badan Perjuangan Indonesia dan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian tidak dapat menyetujui rencana persetujuan dari Konperensi Meja Bundar mengenai pemisahan Irian Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Perjuangan Irian dan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian dengan berusaha sekeras-kerasnya untuk menyatakan kepada seluruh bangsa Indonesia, bahwa bukanlah KMB satu-satunya jalan yang akan menetapkan kebahagiaan nusantara dan bangsa Indonesia akan mempergunakan segala jalan untuk menjamin, bahwa tidak ada satu daerah dari Hindia Belanda dahulu,
4. Diangkat sesagai Penasehat Delegasi RI dengan tugas pokok merundingkan masalah kedudukan Irian Barat dengan Pemerintah Kerajaan Belanda di Den Haag dengan Surat keputusan Presiden RI No. 57 Tanggal 29 Nopember 1950.

5. Diangkat sebagai Perutusan Pemerintah RI ditetapkan di Jakarta dengan Surat Keputusan Presiden RI No. 239 Tanggal 3 Desember 1951 untuk mengadakan Pembicaraan dengan Pemerintah Belanda tentang Perjanjian/Persetujuan International sebagai status Uni, Persetujuan Konperensi Meja Bundar dan Masalah Irian.

Pada tahun 1953 Pemerintah RI membentuk Biro Irian di Jakarta sebagai embrio dari Pemerintah di Irian Barat, di mana Silas Papare diangkat sebagai Komisaris I dengan Surat Keputusan Presiden RI No. 53 Tanggal 17 Februari 1954. Melalui Biro Irian, Silas Papare memperjuangkan Irian Barat agar segera bersatu menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun ternyata usahanya itu mengalami kegagalan. Karena kecewa dengan Biro Irian yang gagal memperjuangkan Irian, maka pada tahun 1957 Silas Papare bersama, Pemerintah Pusat membentuk Propinsi Irian Barat di Jakarta, untuk mengimbangi politik Pemerintah Belanda di Irian Barat. Oleh Silas Papare papan nama Biro Irian diturunkan dan diganti dengan papan nama Propinsi Irian Barat. Pilihan untuk menurunkan papan nama Biro Irian Barat merupakan pilihan yang sangat berat bagi Silas Papare selaku utusan Irian Barat .

Sementara itu pada tahun 1956 Silas Papare diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI (pemilihan rakyat) dengan Surat Keputusan Presiden RI No. 143 Tahun 1956 Tanggal 1 Agustus 1956. Kemudian dengan Surat Keputusan Presiden RI Silas Papare diangkat sebagai Anggota Dewan Perancang Nasional dan sebagai Anggota MPRS. Pada tahun 1960 dengan Surat keputusan Presiden No. 155 Tahun 1960 Tanggal 24 Juni 1960 Silas Papare diberhentikan dengan hormat dari kedudukannya sebagai Anggota DPR, dan dengan Surat Keputusan Presiden No. 669 Tahun 1960 Tanggal 12 Oktober 1960 mendapat pensiun sebagai Anggota DPR.

Selama bertahun-tahun Belanda berusaha untuk dapat mempertahankan kekuasaannya di Irian Barat, tetapi ketika mendapat tekanan kuat dari dunia internasional, terutama sekutunya Amerika agar segera melepaskan Irian. Pemerintah Belanda mulai

bimbang, dapatkah Belanda mempertahankan Irian Barat tanpa bantuan sekutunya apabila Indonesia melakukan operasi militer secara besar-besaran. Akhirnya mau tidak mau Pemerintah Belanda bersedia untuk berunding dengan Pemerintah Indonesia.

Dalam bulan Juli 1962 berlangsung perundingan di bawah bimbingan Sekretaris Jenderal PBB U Thant dan Duta Besar Ellsworth Bunker. Duta Besar Bunker menawarkan konsep yang kemudian dikenal sebagai draft dari Persetujuan New York untuk mengakhiri permusuhan kedua belah pihak. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 bertempat di Markas Besar PBB di New York, dilangsungkan penandatanganan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah kerajaan Belanda mengenai Irian Barat. Persetujuan mana lebih dikenal dengan nama "New York Agreement (Persetujuan New York)".

Silas Papare termasuk salah satu di antara putra daerah yang berkenan menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut, yaitu penandatanganan Naskah New York Agreement. Sulit dibayangkan bagaimana perasaan Silas Papare ketika mendengar dan melihat secara langsung peristiwa tersebut yang selama bertahun-tahun diperjuangkannya. Selaku putra dari Yapen Waropen yang mencanangkan Serui sebagai basis perjuangan republik untuk menghadapi kubu Hollandia - Biak yang memihak Belanda, Silas Papare telah memenuhi janjinya kepada rakyat Serui bahwa "Bukan Hollandia - Biak yang memang, melinkan Serui".⁴

Perjuangan Silas Papare tidak berhenti begitu saja se usai Persetujuan New York dan kembalinya Irian Barat Ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi masih terus berlanjut dalam pemerintahan. Namun pada tanggal 7 Maret 1979 kita semua dikejutkan oleh adanya berita bahwa Silas papare telah meninggal dunia. Bagi orang yang mengenal Silas Papare, apakah dia di Irian Jaya (dulu Irian Barat) maupun di luar Irian Jaya tentu mengetahui betapa gigih dan keras hatinya, tidak saja berjuang selama Irian Jaya belum bebas, di mana kita di seluruh Tanah Air telah bebas merdeka.

4. Perjuangan Rakyat Yapen Waropen Bersama Silas Papare, *ibid.* hal. 21--51 : Badan Pembina Pahlawan Dacrah : Biodata Silas papare. Jayapura, 1993

Tetapi jauh sebelum Negara Republik Indonesia diproklamsikan. Silas Papare adalah seorang pejuang yang "Sepi Ing Pamrih" serta tidak memikirkan diri sendiri dan tetap menjalankan tugasnya dalam semua keadaan suka dan duka, susah dan senang Silas Papare menerima dengan penuh ketabahan. Silas Papare telah meninggalkan kita semua, jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Serui, terpisah dari kedaulatan Indonesia secara status maupun nasibnya.

Tidak lama kemudian dibentuk Panitia Bersama di mana Silas Papare duduk sebagai anggota yang bertugas mengumpulkan data-data bagi penyusunan laporan kedua pihak untuk disampaikan kepada Konferensi Menteri Uni Indonesia - Belanda.

Ketika Belanda mengirimkan laporan ke Perserikatan Bangsa Bangsa di mana Irian Barat disebut sebagai "Daerah yang tidak berpemerintahan sendiri" yang mana sesungguhnya Belanda ingin menjadikannya sebagai daerah dekolonisasi. Maka Silas Papare, J. Lattumahina, Saleh Daeng Tompoh dan para pejuang lainnya mendirikan Badan-Badan Perjuangan Irian di berbagai Kota dan Kabupaten di seluruh Tanah Air sebagai usaha menghimpun kekuatan nasional menghadapi setiap aksi Belanda.

Sementara itu dalam tahun 1950 dan 1951 Silas Papare beberapa kali diangkat oleh Pemerintah Indonesia untuk menjadi Panitia dalam perundingan dengan Belanda, antara lain :

1. Diangkat sebagai Anggota Panitia Negara menghadiri Konferensi Indonesia-Belanda di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Presiden RIS No.61 Tahun 1950.
2. Diangkat sebagai Panitia Irian dengan tugas merundingkan status Karesidenan Irian Barat dengan Pemerintah Belanda sekaligus mewakili Pemerintah di Indonesia dan Irian Barat dengan Surat Keputusan Presiden RIS No. 145 Tahun 1950.
3. Diangkat sebagai Panitia Teknis yang ditetapkan di Jakarta dengan Surat Keputusan Perdana Menteri RI No. 9 / PM / 1950 Tanggal 14 Oktober 1950.

BAB XI

P E N U T U P

Bumi Irian Barat dengan keindahan alamnya dan keanekaragaman budayanya telah melahirkan tokoh pejuang kemerdekaan antara lain Silas Papare dan Marthin Indey untuk menghadapi penjajah Belanda dari Jepang.

Nasionalisme Di Irian Barat tidak terlepas dari kondisi alam dan kondisi politik yang diciptakan Belanda pada saat itu. Kondisi politik yang diciptakan Belanda pada saat itu. Kondisi alam yang ganas menyebabkan mereka untuk lepas dari keterbelakangan dengan menuntut ilmu yang dibawa oleh misionaris agama. Kondisi politik waktu itu yang mendukung adalah karena di Tanah Merah (Irian Barat) digunakan sebagai tempat pembuangan nasionalis dari pulau Jawa, antara lain Sugoro, Suparto, bahkan Soekarno pernah dibuang ke Digul. Dari para tawanan politik inilah pejuang Irian Barat belajar tentang organisasi dan diplomasi. Silas Papare dan Marthin Indey dalam perjuangannya banyak dipengaruhi oleh para Digulis tersebut.

Perjalanan hidup Marthin Indey dan Silas Papare yang kedudukannya sebagai anak manusia sudahlah berakhir, karena kedua tokoh Pahlawan Nasional Indonesia itu telah dipanggil kembali oleh Sang Penciptanya. Marthin Indey meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Juli 1996 di Rumah Sakit Umum Jayapura karena

menderita sakit, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Waena Jayapura pada hari Sabtu 19 Juli 1986. Sedangkan Silas Papare meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1979 di Rumah Sakit Pertamina Jakarta, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Serui. Meskipun Marthin Indey dan Silas Papare telah meninggalkan kita semua, namun demikian, namanya tetap dikenang dan hidup sepanjang sejarah bangsa dan hal ini merupakan kebanggaan nasional Hal ini karena nama tersebut telah tertera dalam lembaran sejarah bangsa. Apalagi Marthin Indey dan Silas Papare telah memperoleh penghargaan dan dikukuhkan oleh Pemenritah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemerintah Republik Indonesia sehingga menjadi salah satu dari sedikit putra terbaik bangsa dengan sebutan “Pahlawan Nasional”.

Penghargaan yang diperoleh Marthin Indey dan Silas Papare adalah pantas dan tepat, sebagian masa hidup telah dicurahkan baik tenaga, maupun fikiran telah disumbangkan sebagai amal bakti terhadap kepentingan Nusa dan Bangsa. Sehingga generasi penerusnya dapat menikmati hidup dan kehidupan di alam yang merdeka sebagai hasil dari jerih payah itu.

Marthin Indey dan Silas Papare seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa ia adalah salah seorang putra bangsa yang terbaik yang berasal dari Bumi Irian Barat (sekarang Irian Jaya), wilayah Negara Kesatuan Indonesia yang paling timur.

Marthin Indey dan Silas Papare lahir dan dibesarkan oleh alam lingkungan yang ganas serta ditempa oleh masyarakat yang memiliki corak budaya yang keras pula. Sejalan dengan itu maka sejak masa kanak-kanak Marthin Indey dan Silas Papare telah dituntut oleh, suatu keberanian di dalam mengarungi hidup. Dan dengan alam yang ketat ia terus tumbuh bukan saja menjadi manusia kuat, ibarat kokohnya pulau karang diterjang ombak samudera, tetapi telah membawa cahaya terang untuk bangsanya, bagaikan mercusuar tegak berdiri di pulau terpencil memberi peringatan kepada setiap yang lewat.

Perjuangan Silas Papare dan Marthin Indey secara organisaris dimulai dengan mendirikan KIM (Komite Indonesia Merdeka) dan PKII (Partai kemerdekaan Indonesia Irian). Tujuan dari organisasi ini

adalah untuk menggalang rakyat Irian Barat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Setelah kemerdekaan ternyata pengambilan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia mengalami rintangan dari pihak Belanda. Setelah Konperansi Meja Bundar (KMB) terjadi titik terang bahwa Irian Barat akan dikembalikan ke Indonesia melalui jalan perundingan. Dalam perjuangan KMB Silas Papare menjadi salah satu wakilnya. Dalam perundingan inilah Silas Papare dan Marthin Indey diuji lagi sebagai seorang diplomat selain sebagai ahli perang. Dalam sidang KMB ini lah banyak perang yang diberikan demi suksesnya jalannya perundingan. Pengembalian Irian Barat secara menyeluruh baru pada tahun 1962 melalui perang. Karena ternyata perundingan KMB diingkari oleh Belanda.

Untuk mengenang perjuangan Marthin Indey pada saat ini di Sentani, Irian Jaya telah berdiri lapangan terbang Marthin Indey. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang yang melihatnya akan mengingat jasa-jasa Marthin Indey

Demikianlah sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah sesuatu yang hidup dari masa ke masa. Kejadian-kejadian pada waktu lampau dimana berlangsungnya perjuangan membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, semuanya dapat dijadikan cermin bagi generasi yang akan datang. Peristiwa-peristiwa dimasa perjoangan kemerdekaan Indonesia telah menjadi sumber ilham dan pengetahuan terhadap kepentingan nusa dan bangsa.

Perjuangan telah banyak meninggalkan suri tauladan yang perlu dan halus diketahui oleh generasi sekarang.

Meskipun ia hidup di lingkungan masyarakat yang sarat dengan tradisi, akan tetapi ia tidak terperosok dalam kehidupan yang berbau dengan masa kepurbakalaan. Hal ini dapat terlihat, karena Marthin Indey dan Silas Papare dilahirkan dari keluarga yang telah tersentuh dengan kemajuan zaman. Marthin Indey dan Silas Papare tepat waktunya telah dapat mengikuti lembaga pendidikan resmi. Kemudian dapat meneruskan pada sekolah Guru dan Sekolah Pamong Praja dan berhasil memperoleh ijazah.

Dalam meniti karir dimulainya dari Guru, suatu pekerjaan yang mulia, karena pekerjaan itu tidak membawakan misi kemanusiaan terutama untuk mencerdaskan bangsa. Akan tetapi kemudian kehadiran Jepang telah memutuskan aktivitasnya dengan pekerjaan tersebut, karena ia ditangkap dan kemudian ditunjuk oleh pemerintah Jepang menjadi mandor onderneming di Ransiki Manokwari.

Ketika Indonesia sudah merdeka, sedangkan Irian masih dalam cengkeraman pihak Belanda, Frans Kaisiepo pindah dengan memulai karir dalam bidang pemerintahan. Dari prestasi-prestasi yang dicapainya, ia terus berjalan meniti karir di dalam bidang pemerintahan ini. Puncak karir Frans Kaisiepo diperolehnya adalah setelah Irian Barat kembali kedalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Ia adalah salah seorang putra Irian Barat yang mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi Gubernur, Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Irian Barat periode tahun 1964--1973.

Perkenalan Frans Kaisiepo dengan tokoh-tokoh eks-Digulis telah menularkan faham kebangsaan yang rental di dalam dirinya dan ini telah menjadi alat keyakinan politiknya untuk mengusir imperialis Belanda dari bumi Indonesia. Irian Barat khususnya.

Dengan politiknya yang fasih, ia bersama kawan-kawan seperjuangan secara diam-diam terus merapatkan barisan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Untuk melancarkan maksud tersebut secara rahasia ia melakukan kontak dengan tokoh eks Digulis, yang juga sebagai "Gurunya", guna untuk memperoleh masukan berupa baik fikiran maupun gagasan-gagasannya untuk menggoncang stabilitas Pemerintah Kolonial Belanda di Irian Barat khususnya.

Kiranya patut dicatat, bahwa Frans Kaisiepo adalah orang pertama yang mencetuskan dan mengumumkan nama "Papua" menjadi Irian. Dan karena ulahnya yang berpihak terhadap paham kebangsaan sebagai wujud dari persatuan dan kesatuan telah memaksa Pemerintah Kolonial Belanda tidak menyukainya.

Demikianlah lakon yang telah diperankan oleh Frans Kaisiepo dalam upaya membangun keutuhan wilayah dan membina keutuhan bangsa seperti yang dipesankan oleh lambang negara kita "*Bhineka*

Tunggal Ika". Melihat akan sikap, tindak serta perilaku yang telah ditunjukkan Frans Kaisiepo, kiranya banyak tersimpan nilai-nilai yang pantas dan bahkan musti untuk dilestarikan guna menambah khasanah kekayaan sejarah bangsa. Selanjutnya sangatlah bermanfaat bila ini dapat dipetik oleh kaum muda yang berperan sebagai pewaris dan penerus kehidupan bangsa dan negara. Karena dalam era globalisasi yang kita hadapi dewasa ini, bukan tidak mungkin kalau kita lengah, generasi muda akan melupakan budaya bangsanya dalam mengisi nuansa-nuansa pembangunan.

Kemudian diharapkan, karena kegiatan penulisan Biografi Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo merupakan studi awal yang menuntut kelanjutan kesempurnaan. Sehubungan dengan itu, maka usaha untuk ini hendaknya dapat menaruh minat untuk melakukan kajian ulang agar dapat mencapai titik kesempurnaan.

Daftar Pustaka

- Agaki Wanda, Habel, *Beberapa Catatan Mengenai Sejarah Irian Jaya Indonesia Sentris dan Sejarah Lokal Papua Belanda Sentris (Sebagai kenangan untuk Bapak Silas Papare)*. Irian Jaya: Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Propinsi Irian jaya.
- Kartawidjaya, MA, Drs. Tarmidja dkk, *Perang Tradisional Perang Pasifik dan Perang Trikora di Irian Jaya*. Irian Jaya: Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Irian Jaya., tahun 1983.
- A. Apandi dkk, *Mengenal Sebagian dari Tanah Air Kita Irian Barat*. Edisi III, Staf Penguasa Perang Tertinggi.
- Tanpa pengarang, *Riwayat Singkat Perjuangan Marthin Indey* Jakarta: Depsos. tahun 1993.
- Makmur, Djohan, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: Depdikbud, 1993.
- Rifai, Mien A. *Mohammad Noer*. Jakarta: Gramedia, tahun 1991.
- , *Tamu Kita Agustina Heunassy: Saya Menyusul Terus*. KDK. No. 34/Th. VII Pebruari 1989.
- Aditjondro, G.J, *Tokoh Marthin Indey, Pilar Perjuangan Pembebasan Irian Barat di Javapura* dalam Prisma 2 Pebruari 1987.
- Masjkuri, *Ratulangi, Dr. GSSJ*. Jakarta: Depdikbud, 1985.

Raponai, Supardi. dkk, (peny.) *Praja Ghups Virs (Ksatriis Pelindung Masyarakat.) Irian Barat dari Masa ke Masa*. Djayapura: Sejarah Militer Kodam XVII, tahun 1971.

Suhatno, dkk, *Tokoh-tokoh Pemikir Paham Kebangsaan: Haji Agus Salim dan Muhammad Husni Thamrin*. Jakarta: Depdikbud, 1995.

-----, *Perjuangan Rakyat Yapen Waropen Bersama Silas Papare*. Serial Sejarah perjuangan Rakyat Yapen Waropen. bagian 2.

Soedharta, Bondhan, *Gerakan Bawah Tanah: Cara Rakyat Irian Jaya Menentang Kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda*. Jurusan Sejarah USU Medan, tahun 1994.

-----, *Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat*. Jakarta: Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat, tahun 1986.

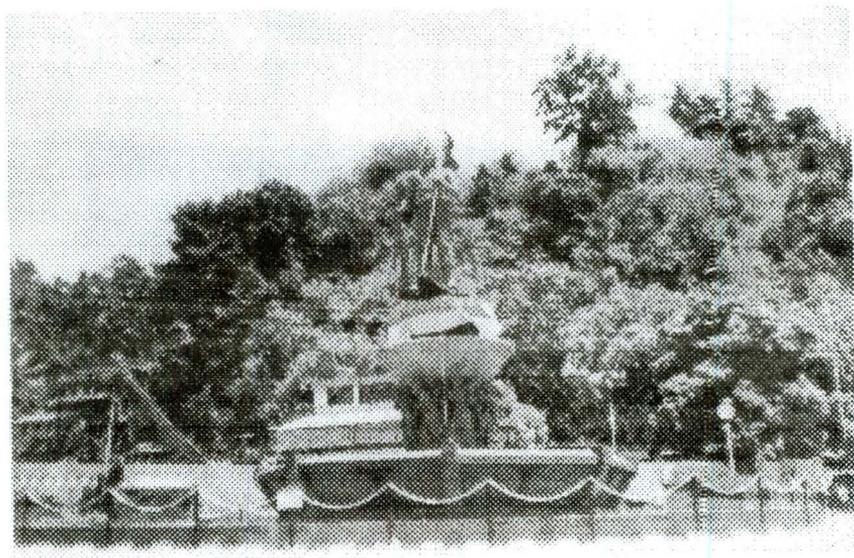
Arsip lepas Badan Pembina Pahlawan Daerah Tingkat I Irian Jaya. Riwayat Perjuangan Marthin Indey, tersimpan di Departemen Sosial RI.

Rekomendasi Nomor 464.1/04/R-BYW/1993, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Yapen Waropen "Tentang Pengangkatan Silas Ayam Dorrai Papare sebagai Pahlawan Nasional".

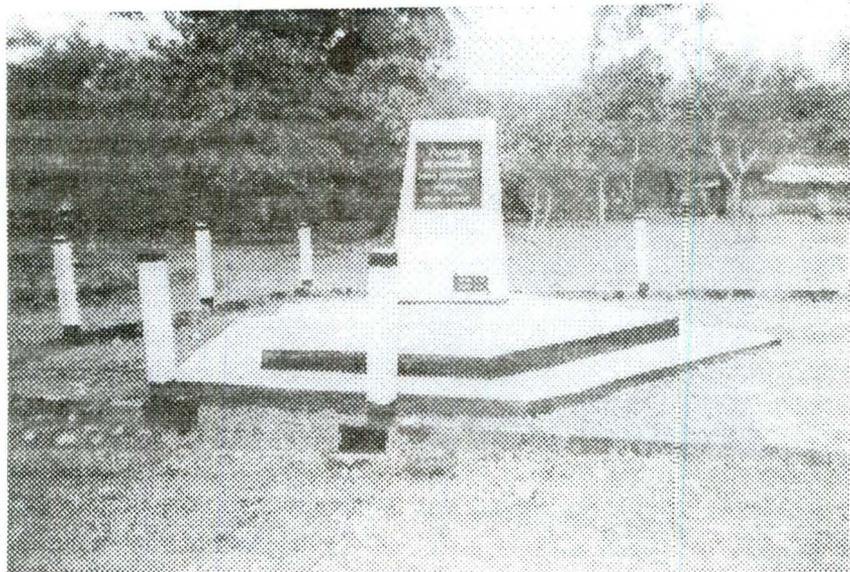
Tanpa pengarang, *Pertemuan Antara Saudara Kandung* terbitan khusus Departemen Penerangan, tanpa tahun.

Wawancara dengan janda Marthin Indey tanggal 4 September 1995 pukul 16.00 di Irian Jaya.

Wawancara dengan Ibu Mory Papare (Putri Sulung Silas Papare.) tanggal 5 September 1995 pukul 10.00 di Irian Jaya.



Monumen Perjuangan Rakyat Irian Jaya



Tugu Peringatan Perjuangan Mathin Indey



Istri Alm. Marthin Indey



Anak pertama Alm. Silas Papare

DEPARTEMEN SOSIAL RI

DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEJAHTERAAN SOSIAL
Jalan Salemba Raya No. 28 Telp. : 310.3591 - 310.3655 Jakarta 10430

M E M O

Nomor : 235 /DIR/IX /BFS/VIII /93
Dari : Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial.
Kepada : Yth. Ibu Menteri Sosial R.I.

1. Bersama ini kami laporkan dengan hormat, bahwa sebagai tindak lanjut dari penelitian usulan Calon Pahlawan Nasional asal Irian Jaya, Tim Badan Pembina Pahlawan Pusat telah mengadakan pengumpulan data/penelitian ke Irian Jaya pada tanggal 30 Juli 1993 sampai dengan 2 Agustus 1993.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan laporan hasil pengumpulan data/penelitian oleh Tim Badan Pembina Pahlawan Pusat dimaksud.
3. Demikian mohon menjadi periksa, dan petunjuk Ibu Menteri lebih lanjut.

Jakarta, 7 Agustus 1993.

DIREKTUR JENDERAL
BINA KESEJAHTERAAN SOSIAL



MUCHRODJI

LAPORAN HASIL PENGUMPULAN DATA/PENELITIAN DALAM RANGKA
MEMANTAPKAN USUL PENGANUGERAHAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL
DARI GUBERNUR KDH TK.I/KETUA BADAN PEMBINA PAHLAWAN DAERAH
IRIAN JAYA

I. D A S A R.

Surat Perintah Perjalanan Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial No. 38/B/VI/BKS/VII/93, tanggal 29 Juli 1993.

II. PELAKSANAAN.

- A. Tanggal 30 Juli 1993 berangkat dari Jakarta.
- B. Tanggal 31 Juli 1993 mengadakan pertemuan dengan :
 - Muspida.
 - DPRD TK. I.
 - Rektor Universitas Cenderawasih.
- C. Tanggal 1 Agustus 1993 mengadakan pertemuan dengan :
 - Tim Pengumpul data daerah yang diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Irian Jaya.
 - Tokoh-tokoh masyarakat Irian Jaya.
 - Keluarga dan teman-teman dekat calon Pahlawan Nasional yang diusulkan.

III. HASIL-HASIL.

- A. Masukan diperoleh berupa keterangan lisan dan bahan-bahan tertulis.
- B. Aspirasi-aspirasi/kondisi kerawanan daerah Irian Jaya yang perlu mendapat perhatian :
 1. Perasaan seperti masih dianaktirikan.
 2. Masih tebalnya rasa kesukuan, yang mengakibatkan terjadinya persaingan antarsuku.
 3. Adanya kecemburuan sosial di kalangan pemuda terhadap para pendatang.
 4. Adanya gejala membandingkan keadaan Irian Jaya dengan Papua Nugini yang tingkat kemajuannya lebih rendah, namun mempunyai negara sendiri.

5. Keinginan agar para pejuang Irian Jaya mendapat penghargaan yang wajar.
6. Pengertian dan penghayatan terhadap Pahlawan masih perlu ditingkatkan, karena belum adanya tokoh Irian Jaya yang menjadi Pahlawan Nasional yang dapat dijadikan Idola.
7. Belum ada tokoh Pahlawan Nasional berasal dari Irian Jaya menyebabkan timbulnya anggapan Irian Jaya belum 100 % masuk wilayah Indonesia. Mereka menganggap wilayah Indonesia yang paling timur ialah Maluku yang telah ada Pahlawan Nasionalnya.

III. KESIMPULAN DAN SARAN.

A. Kesimpulan.

Masyarakat Irian Jaya saat ini sangat mendambakan adanya Pahlawan Nasional asal Irian Jaya yang dianugerahkan pada hari Pahlawan tahun 1993 mendatang.

B. S a r a n.

Untuk menanggulangi kerawanan-kerawanan tersebut dan dalam usaha memupuk rasa kebangsaan (nasionalisme), semangat kepahlawanan/kepeloporan dan kebanggaan daerah dalam rangka menyongsong PJPT II dan penekanan pembangunan Indonesia Bagian Timur (IBT), maka :

1. Pemerintah perlu pada tahun ini menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada tiga tokoh pejuang yang telah menjadi idola masyarakat Irian Jaya yaitu : Silas Papare (dari Serui), Frans Kaisiepo (dari Biak), dan Marthen Indey (dari Jayapura). Ketiga tokoh tersebut sama-sama mempunyai bobot perjuangan yang sangat besar bagi kembalinya Irian Barat ke pangkuan R.I. (Riwayat hidup dan perjuangan masing-masing ketiga tokoh tersebut terlampir).

2. Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada ketiga tokoh idola masyarakat daerah Irian Jaya tersebut pada saat ini sangat diperlukan, karena penganugerahan gelar Pahlawan Nasional hanya kepada salah seorang atau dua orang di antaranya akan menimbulkan rasa iri dan mempertajam persaingan yang tidak sehat antara suku-suku yang ada. Hal ini dapat dimengerti mengingat luasnya Propinsi Irian Jaya dan terbatasnya komunikasi.
3. Dari segi politis dan psikologis maupun jasa-jasa yang telah dibhaktikan ketiga tokoh tersebut, seyogyanya ketiganya dapat dianugerahi gelar Pahlawan Nasional secara bersamaan demi keutuhan bangsa.

Jakarta, 3 Agustus 1993.

TIM PENDATA/PENELITI.

1. R.P. Soekandarno.
2. Drs. Soemarsono.
3. Drs. Amrin Imran.
4. Drs. Soetopo Soetanto.

BIODATA An. SILAS PAPARE

1. Nama lengkap : SILAS PAPARE
Tempat tanggal lahir : Serui, 18 Desember 1918
B a n g s a : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Nama orang tua : - Ayah : Musa Papare
- Ibu : Dorkas Mengge
Nikah tanggal : 12 April 1936
Susunan keluarga : - Istri : Regina Aibui
- Anak : 9 orang

2. Pendidikan : a. Volksschool, tamat borijezah tahun 1920
di Serui
b. Sekolah juru rawat, tamat borijezah
tahun 1931 s/d 1935 di Serui.

3. Riwayat hidup :
a. Tahun 1935 s/d 1936 : Bekerja sebagai juru rawat pada Rumah Sakit
Zending di Serui
b. Tahun 1936 s/d 1940 : Bekerja sebagai juru rawat pada Rumah Sakit
Perusahaan minyak NINGEM di Dabo, kemu-
dian kembali lagi ke Serui.
c. Tahun 1944 s/d 1945 : Bertugas sebagai Intellegence pada tentara
Sekutu dengan pangkat Serjan Eerste-klas da-
lam perang Duhis ke II (Pasific)
d. Tahun 1945 s/d 1949 : Bertugas sebagai Kepala Rumah Sakit Zending
di Serui dan menjabat sebagai Ketua Umum
Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII)
e. Tahun 1950 : 1). Diangkat sebagai anggota panitia Negara
menghadiri Konferensi Indonesia Belanda
di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan
Presiden RIS No. 61 tahun 1950.
2). Diangkat sebagai panitia Irian dengan
tugas merundingkan status Keresidenan
Irian Barat dengan pemerintah Belanda
sekaligus mewakili pemerintah di Indo-
nesia dan Irian Barat dengan Surat Ke-
putusan Presiden RIS No. 145 tahun 1950.
3). Diangkat sebagai panitia technis yang
ditetapkan di Jakarta dengan Surat Ke-
putusan Perdana Menteri RI No. 9/PM/ 1950
tanggal 14 Oktober 1950.

- 4). Diangkat sebagai penasehat Delegasi RI dengan tugas pokok merundingkan masalah kedudukan Irian Barat dengan pemerintah Kerajaan Belanda di Den Haag dengan Surat Keputusan Presiden RI No. 57 tanggal 28 Nopember 1950 (foto data terlampir)
- f. Tahun 1951. :
- 1). Diangkat sebagai perutusan pemerintah RI ditetapkan di Jakarta dengan Surat Keputusan Presiden RI No. 238 tanggal 3 Desember 1951 untuk mengadakan Peembicaraan dengan pemerintah Belanda tentang perjanjian/peretujuan Internasional sebagai status Uni, persetujuan Konferensi Meja Bundar KMB dan masalah Irian.
 - 2). Diangkat sebagai perawat pada Kantor pusat Kementerian Kesehatan Kota Praja Jakarta Raya.
- g. Tahun 1954. :
- 1). Diangkat sebagai komisaris I pada Biro Irian di Jakarta dengan Surat Keputusan Presiden RI No. 53 tahun 1954 tanggal 17 Februari 1954.
 - 2). Diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara RI menggantikan almarhum Dr. Rajiman Wodiodiningrat dengan Surat Keputusan Presiden RI No. 61 tahun 1954.
- h. Tahun 1956 :
- 1). Diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI (pemilihan rakyat) dengan Surat Keputusan Presiden RI No. 143 tahun 1956 tanggal 1 Agustus 1956
 - 2). Dengan Surat Keputusan Presiden RI almarhum Silas Papere diangkat sebagai anggota Dewan Perancang Nasional Sementara RI (Bernas) dan sebagai anggota MPRS,
- i. Tahun 1960 :
- 1) Dengan Keputusan Presiden No. 155 tahun 1960 tanggal 24 Juni 1960 diberhentikan dengan hormat sebagai anggota DPR
 - 2). Dengan Keputusan Presiden No. 669/1960 tanggal 12 Oktober 1960 mendapat pensiun

J. Tahun 1979 : Pada tanggal 7 Maret 1979 Silas Papare meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Pertamina Jakarta.

4. Riwayat Perjuangan.

- a. Tanggal 29 Nopember 1946 : Secara resmi didirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) di Soruf dan ditunjuk sebagai Ketua umum almarhum Silas Papare (asuncun pengurus terlampir)
- b. Tahun 1946 : Ditangkap pemerintah Belanda dan dipenjarakan di Bisk.
- c. Tahun 1947 : Ditangkap pemerintah Belanda dan dipenjarakan di Soruf.
- d. Tahun 1949 : Sebagai realisasi rapat partai kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) dengan biaya rakyat mg ke diutus Silas Papare ke Jogjakarta untuk bersama - sama pemerintah Indonesia mengikuti perundingan Konferensi Meja Bundar (K M B) di Den Haag.
- e. Tahun 1950 : Bersama - sama Sdr Latumahina, St, Yoseph dan Superno membentuk Badan perjuangan Irian di Jogjakarta (Bintaran Lor) foto terlampir
- f. Tanggal 17 Agustus 1950 : Bersama - sama pemerintah pusat membentuk Kompi Irian 17/m.b.s.d. di Jakarta untuk memperkuat politik pemerintah dalam forum Internasional guna masalah pengembalian Irian Barat pada tahun 1951 sebelum ayam berkokok.
- g. Tahun 1954 : Bersama pemerintah pusat membentuk Biro Irian di Jakarta dimana almarhum Silas Papare menuju di Komisaris I (Kepres No.53 tahun 1954 tanggal 17 Februari 1954)
- h. Tahun 1957 : Bersama pemerintah pusat membentuk Propinsi Irian Barat di Jakarta untuk mengimbangi politik pemerintah Belanda di Irian Barat.
- i. Tahun 1962 : Sebagai anggota Delegasi Republik Indonesia turut ke forum Internasional untuk menanda tangani persetujuan Indonesia Belanda atas daerah Irian Barat masuk kepangkuan ibu pertiwi Negara Kesatuan RI (New York Agreemen)

5. Tanda tanda penghargaan.

- a. Dari kerajaan Belanda berupa bintang perunggu oleh Koningin Wilhelmina di London, tanggal 5 April 1945 karena bertugas melayani dan mengeluarkan rakyat Indonesia dari hutan semasa pendudukan Jepang antara lain di Serui, Biak dan Manokwari.
- b. Surat penghargaan bagian OPS Perang Pasifik dari Biro Intelligence Tentara Sokutu yang ditanda tangani oleh G.A. Willongby, Mayor Jenderal USA (US ARMY) Pada tanggal 31 Oktober 1945.
- c. Surat penghargaan dari 29 Negara yang menjadi anggota Konferensi Asia - Afrika di Bandung pada bulan April 1955.
- d. Piagam Penghargaan Perjuangan Pembebasan Irian Barat dari Penjejehan Belanda (Kepres Nomor 32 / 82) golongan II b).

6. Informasi Positif

- a. Mendapat surat pribadi dari Soekarno untuk memperjuangkan Irian Barat - masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, kegiatan Silas Papare sebagai pejuang yang handal dan tanpa pamrih memperjuangkan keutuhan wilayah Republik Indonesia.
- b. Mendapat pengakuan dari Adam Malik dalam tulisan berjudul "IN MEMORIAN SDR. SILAS PAPARE".
- c. Berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) pada tanggal 31 Agustus 1984 oleh PANGDAM VIII TRIKORA selaku Ketua Yayasan Mandala dengan akte Notaris Nomor 11 tanggal 5 Juni 1984 diberi nama STISIPOL SILAS PAPARE.
- d. Nama Silas Papare sudah dimaklumkan di dalam TMP Serui di Serui.

7. Informasi Negatif.

8. Lain - lain

- a. Rekomendasi dari Bupati KDH Tingkat II Serui terlempir.
- b. Rekomendasi dari DANDIM 1709 Serui (terlempir).
- c. Rekomendasi dari KAPOLRES Serui (terlempir).
- d. Rekomendasi dari Kejeri Serui (terlempir).
- e. Rekomendasi dari Ketua DPRD Tingkat II Serui (menyusul).
- f. Catatan dari Bapak Benyamin Kayei teman seperjuangan almarhum Silas Papare dari Kampung Anatsurei yang masih hidup (terlempir).
- g. Surat Pernyataan dari tokoh masyarakat Serui Bapak Obeth Boney (73 thn) teman seperjuangan Silas Papare yang masih hidup (terlampir).
- h. Surat Pernyataan dari eks pensiunan tentara Belanda (KNIL) di Serui Bapak Kopda (Pur) Karel Manigasi yang melihat langsung perjuangan Silas Papare di Serui (terlampir).
- i. Wawancara dengan Bapak Abrahm Koromat di Dok IX Jayapura, teman seperjuangan Silas Papare akan membuat tulisan perjuangan Silas Papare.
- j. Wawancara dengan responden :

- 1). Ny. Marie Papere (Putri sulung) di Waena Jayapura.
 - 2). Samuel Isek Papere putra Silas Papere di Bisk.
 - 3). Daud Aninam anak Bernabas Aninam teman seperjuangan Silas Papere,
- K. Foto / gambar.
- 1). Makam Silas Papere di TMP Serui.
 - 2). Gedung Pertemuan Silas Papere di Serui.
 - 3). Situs rumah tempat ditinggalkannya Dr. Sam Ratulangi waktu perjuangan di Serui.
 - 4). Gedung Bunda Irian di Serui (Organisasi Wanita yang diketuai oleh Ny. Regina Aibui Papere / isteri Silas Papere).

Jayapura, 6 Februari 1993

TUGAS BAHASA CALON MAHASISWA
BUDIDHI ASAL IRIAN JAYA

PERJADI
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 57 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan : deb.-

Menetapkan : deb.-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Membentuk suatu Delegasi Republik Indonesia yang bertugas merundingkan masalah kedudukan-Juengjawaan Irian-Barat dengan Pemerintah Kerajaan Belanda atau Delegation;
- II. Mengangkat pada Delegasi tersebut:
 1. s/d no. deb.-
 11. S I L A S P A P A R E
partikolin, sebagai Penasehat;
 12. deb.-
- III. Selama pengeluaran yang dilakukan untuk keperluan Delegasi Republik Indonesia tersebut diatas dibebankan kepada Sekretariat Uni Indonesia-Nederland di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Nopember 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

1.
ANO.

PERDANA MENTERI,
ttd.

MOHAMMAD ATSER.

Untuk P. dan jang sah.

DIREKTUR KEMENTERIAN PRESIDEN,

H. KRINGSCHIEDO.





Silas Papare (berdiri ketiga dari kiri) Penasehat Delegasi RI dalam komisi Irian Barat di Den Haag (1950)

Silas Papare

IN - MEMORIAN- ERM. SILAS PAPAARE.

Dengan rasa terkejut kemarin tanggal 7 Maret 1979, kita diberi kabar bahwa sdr. Silas Papare telah meninggalkan kita semu kembali ke Ruchmet Tuhan Y.M.E. Bagi orang yang mengenal sdr. Silas Papare ini, apakah dia di Irian Jaya maupun diluar Irian Jaya tentu mengototai betapa gigihnya dan keras hatinya dia berjuang tidak saja berjuang selama Irian Jaya belum bebas, dimana kita diseluruh Tanah Air telah bebas merdeka. Tetapi jauh sebelumnya bahkan pada zaman Belanda sebelum kita memproklamirkan 17 Agustus 1945, sdr. ini telah menunjuk-kan perjuangannya yang sepeguh hati dan mengajak teman2nya untuk memerdekakan Bangsa dan Negara kita.

Mudah2an apa yang menjadi keinginan dan cita-cita perjuangan sdr. Silas Papare sudah terwujudkan pada tanggal 17 Agustus 45. Kemudian dia tidak berhenti melakukan perjuangan untuk kembalinya Irian Jaya ke pan gkuan Ibu Pertiwidan inipun dilakukan dengan sepeguh hati dengan semangat yang gigih dalam perjuangan dan pengorbanannya.

Kita melihat perjuangan sdr. Silas Papare pada hari-hari belakangan ini, tentu kita merasa agak kesepian, walaupun dia pernah ada di DPR-MPR maupun DPA, dan lain2nya. Tetapi sdr. ini masih mendapat kesempatan mengikuti seluruh jalannya perjuangan dari Proklamasi sampai kembalinya Irian Jaya, juga sampai kepada zaman Era pembangunan sekarang ini.

Saya mengenal saudara ini sebagai benar2 seorang pejuang yang dengan istilah sekarang sepi ing pantrih serta tidak memikirkan diri sendiri, dan tetap menjalankan tugasnya dalam semua keadaan suka dan duka, susah dan senang dia menerima dengan penuh ketabahan. Dalam zaman era pembangunan ini dia juga menunjukan kemauan yang benar untuk dapat ikut membangun Irian Jaya. Untuk daerah2 yang dialaminya yang ditonjolkannya untuk masyarakat di Irian Jaya.

Silvanus Muli

Oleh karena itu sampai akhir hayatnya, dia masih mencoba untuk membangun daerahnya dimana dia dilahirkan, dibesarkan dan dimana dia memulai perjuangannya. Sekarang saudara ini sudah tidak ada lagi di tengah2 kita, begitu juga telah banyak kawan2 seperjuangan saudara ini yang telah mendahuluinya. Tetapi semua ini tidak ada hal2 yang harus kita sedihkan. Tentu kita merasa sepi dengan hilangnya saudara ini, tapi seperti kata pepatah : Patah tumbuh, hilang berganti ; Dan saya yakin teman-teman seperjuangan beliau, maupun teman-teman dari angkatan sesudahnya, atau yang disebut Angkatan Muda, Angkatan Penerus janganlah lupa kan untuk mencontoh perjuangan sdr. Silas Papare ini.

Masih banyak tugas yang harus kita pikul, biarpun tidak lagi kita menghadapi kolonialisme, tapi sekarang ini tugas yang harus kita pikul adalah membangun Bangsa dan Negara, khususnya di Irian Jaya.

Oleh karena itu dengan kepergian sdr. Silas Papare ini, saya hanya dapat mengatakan, selamat jalan semoga Tuhan Y.M.E akan memberikan tempat yang layak disisinya, sesuai dengan amal dan perbuatannya semasa beliau hidup didunia ini.

Jakarta, 8 1 1979.-



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II YAPEN WAROPEN

REKOMENDASI

NOMOR : 464.1/04/R-BYW/1993.

Dupati Kepala Daerah Tingkat II Yapen Waropen dengan ini merekomendasikan :

N a m a lengkap : SILAS AYARI DONRAI PAPARE
 Tempat / tanggal lahir : Serui Laut, 18 Desember 1918
 Tempat / tanggal Wafat : Jakarta, 7 Maret 1978
 Tempat / tanggal Pemakaman : Taman Makam Pahlawan Kusuma Trikora - Serui, tanggal 14 Maret 1978.

Untuk dicalonkan, diperjuangkan dan kemudian dikukuhkan sebagai salah satu Pahlawan Nasional dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. SILAS AYARI DONRAI PAPARE merupakan salah seorang Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang dengan gigih dan tanpa pamrih serta dilandasi jiwa nasionalisme yang tinggi telah turut memperjuangkan - pengembalian Irian Jaya kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa sosok perjuangan SILAS AYARI DONRAI PAPARE sangat represen - tatip ditinjau dari sudut regional, Nasional dan Internasional melalui rangkaian perjuangan melawan Penjajah Belanda di Irian Jaya, pomatangan perjuangan ditingkat Nasional dan perjuangan memperoleh Pengakuan Internasional diforum PBB dan lain-lain terhadap status-Irian Jaya sebagai bagian Integral dari Negara Kesatuan Republik-Indonesia.
3. Bahwa penantian masyarakat Irian Jaya akan munculnya figur Pahlawan Nasional asal Irian Jaya perlu segera diakhiri sebagai upaya pelestarian nilai-nilai perjuangan bangsa di Propinsi Irian Jaya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat, guna mendapatkan pertimbangan dan restu Pemerintah Republik Indonesia.



Serui, 3 Februari 1993.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II YAPEN WAROPEN,

Drs. LABAN SAHORI.

KOMANDO RESOR MILITER 173
 PRAJA VIRA BRAJA
 KOMANDO DISTRIK MILITER 1709

Serui, 3 Pebruari 1993

N o m o r : R / 64 / II / 1993

Klasifikasi : BAHASIA

Lampiran : -

Perihal : Pengangkatan Almarhum
 Silas Papare menjadi
Pahlawan Nasional.

K e p a d a

Yth. Ketua Badan Pembina
 Pahlawan Daerah
 Irian Jaya

di -

J a y a p u r a .

1. Menunjuk Surat Ketua Badan Pembina Pahlawan Daerah Irian Jaya No R/323/KS/I/1993 tanggal 28 Januari 1993 tentang permohonan bantuan pengumpulan data calon Pahlawan Nasional asal Propinsi Irian Jaya An. Almarhum Silas Papare .
2. Sehubungan tersebut surat diatas, dilaporkan bahwa sesuai catatan maupun data yang ada di Kodim 1709/Yawa, almarhum Silas Papare semasa hidupnya tidak ditemukan adanya indikasi terlibat gerakan yang menentang Pancasila, UUD-45, Pemerintah dan Negara Republik Indonesia, bahkan almarhum adalah termasuk Tokoh Pejuang Pembebasan Irian Barat yang tergabung dalam Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) Serui yang meliputi daerah pelosok Irian a.l. Biak, Sorong, pulau-pulau Raja Ampat, Kaimana, Inanwatan dan Fak-Fak dibawah koordinasi almarhum Dr. Sam Ratulangi.
3. D dilaporkan bahwa jenazah almarhum Silas Papare saat ini telah berada di Taman Makam Pahlawan Serui - dan sebagai pengakuan atas jasa perjuangannya Masyarakat dan Pemda Tingkat II Yapen Waropen telah mengabdikan namanya sebagai nama Gedung Pertemuan serba guna di Kota Serui (Gedung Silas Papare).
4. Untuk itu tepat sekali apabila almarhum Silas Papare diangkat sebagai Pahlawan Nasional dari daerah Irian Jaya .
5. Demikian untuk menjadikan periksa dan pertimbangan lebih lanjut.

KOMANDAN, KOMANDO DISTRIK MILITER 1709/YAWA



AKAN MASKAN

LETNAN KOLONEL ART NRP 24357

Tembusan :

1. Pangdam Up Aspera
 Kasdam VIII/Trikora
2. Dan Rem 173/FVB
3. Ka Polres / Yawa
4. Gubernur KDH TK-I Irija
5. Bupati KDH TK-II Yawa
6. Kajari Dati II Yawa

POLRI DAERAH IRIAN JAYA
RESORT YAPEN WAROPEN

SURAT REKOMENDASI

NO.POL : B/REK/01 /II/1993.

1. KEPALA KEPOLISIAN RESORT YAPEN WAROPEN, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: SILAS PAPARE.
Tempat tanggal lahir	: Serui, 18 Desember 1918.
Suku /bangsa	: Indonesia.
Pekerjaan	: Pejuang
Agama	: Kristen Protestan.
Alamat sekarang	: Serui Kabupaten Yapen Waropen.
2. Berdasarkan pengamatan kami dan arsip yang ada di Polres Yapen Waropen bahwa almarhum SILAS PAPARE semasa hidupnya dan sesuai informasi yang diterima yang bersangkutan tidak pernah tersangkut tindak pelanggaran maupun kejahatan yang ditangani oleh - Polres Yapen Waropen .
3. Demikianlah Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya .

Dikeluarkan di : S e r u i .

Pada tanggal : 3 Pebruari 1993.

KEPADA RAH
 KEPOLISIAN RESORT YAPEN WAROPEN
 KEPALA
 DR. SUKANDA
 LETKOL POLISI NRP 52020103 .-



PARTAI KEMERDEKAAN INDONESIA IRIAN (P.K.I.I.) SERUI
YANG DIKORDINIR OLEH ALMAHRUM BAPAK DR. SAM RATULANGIE

Tanggal 29 November 1946, telah terbentuk di Serui Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (P.K.I.I.) dengan informasi dari dalam Medan Pertahanan terdiri dari :

No. Urut.	N a m e		Kedudukan dalam Partai	Keterangan
1.	SILAS	PAPARE	Ketua	Pegawai Rumah Sakit
2.	ALMI	RACHMAN	Wakil	--
3.	A P I	KAMAREA	Sekretaris I	Ex. Bestuur
4.	ANDRIAS	PAPARA SANDERI	Sekretaris II	Ex. Pelajar (JWVS)
5.	HATTIUS	ABAA	Bendahara	Pendeta
6.	THUNG CUNG	EM	Komisaris I	Pedagog
7.	BENYANIN	KAYAI	Komisaris II	Kep. Kamp. Mariadel
8.	STEFANUS	RUMBOWAS	Penghubung	Kep. Kamp. Komanap
9.	PAULUS	PAYAWA	Penghubung	Kep. Kamp. Tarau
10.	STEFANUS	REPASI	Penghubung	Pemuka Rakyat
11.	L. R. I.	TIGOU	Pencahivat I	Bestuur Asistend
12.	BARNABAS	AEIKAM	Pencahivat II	Bestuur Asistend

Partai tersebut mempunyai jiwa Yapan Waropou terdaftar dalam Lendek-book (Buku Keanggotaan) berjumlah 4.000 orang yang berjuang atas nama Irian-Barat untuk berjuang kepada kemerdekaan seluruh bangsa Indonesia Sabang-Merauke, Susunan Administrasi pengeluaran resolusi dan mosi diajukan ke-Jakarta untuk memujuk kesatuan Kemerdekaan R.I.

Sedang tujuannya diarahkan sebagai kontak penggerak perjuangan kemerdekaan dipelosok Irian Barat seperti : Blau, Sorong, Pulau-2 Raja Ampat, Kai-mana, Inawatan, Fak-Fak.

Politik Belanda pada masa itu kagum, karena melihat reaksi dari Partai Kemerdekaan Indonesia Irian, yang sangat gigih itu hingga terpaksa Belanda menarik kesimpulan untuk mendirikan Dewan Papua dengan bermaksud menangkis Politik Partai Kemerdekaan Indonesia Iriandi Serui.

Dan akhirnya oleh P.K.I.I. telah mengutus Sdr. Ketua SILAS PAPARE ke-Jakarta untuk menegakan daerah Irian Barat kedalam Pengakuan Ibu Pertiwi Kemerdekaan seluruh Bangsa Indonesia Sabang- Merauke.

Pada tanggal 30 November 1947 terbentuklah Cabang (P.K.I.I.) Serui-Laut dengan 11 (sebelas) orang wakil yang dikordinir oleh Bapak SILAS PAPARI dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

Ketua I	:	ANDRIAS	WAYOI
Ketua II	:	SAKUS	BONAI
Sekretaris I	:	SAKUS	ABAA
Sekretaris II	:	NIKOLAS	BONAI
Bendahara I	:	EMHOS	PAPARA
Bendahara II	:	DEMIANUS	TANAWANI
Koordinator I	:	YOSIAS	PAPARA
Komisaris II	:	EMHOS	BONAI
Penghubung I	:	DORTHEUS	ANTARIPADA
Penghubung II	:	HARKUS	WAYOI
Penghubung III	:	SILAS	MASUI/PAPARA

Dengan jumlah anggota 300 (Tiga ratus) orang.

Setelah terbentuknya Organisasi P.K.I.I. di Serui Laut pada tahun 1947. Dengan semangat patriot yang membah kami turut memproklamkan Kemerdekaan Indonesia yang berwujud dari Sabang sampai Merauke.

Tetapi saat itu Irian Barat (Niuw-Guinea) atas politik licik penjajah Belanda sehingga Irian Barat (Niuw-Guinea) dijajah selama 17 tahun. Namun kami sebagai patriot pembebas Irian dari jajahan Belanda dan tak kenal menyerah dengan mengorbankan jiwa raga kami selama 17 tahun demi menyenyapkan Penjajah Belanda dari Bumi Indonesia.

Hingga pada tanggal 28 Oktober 1958 kami dibawah pimpinan Almahrum Bapak Piter Wayoi dan Sdr. Aser Samori, kami menandatangani sumpah untuk rela ber-

Atak itu telah terbentuk lagi satu cabang yang dinamakan G.A.P.I. (Gabungan Pemuda Indonesia) yang terdiri dari :

Ketua I	: Alhadruw Piter Mayoi
Ketua II	: Leonardus Kouri
Sekretaris I	: Alhadruw Sektens Abas
Sekretaris II	: Helianus Inbiri
Endahera I	: Alhadruw Daniel Kouri
Endahera II	: Maurids Mupapaty
Penasihat I	: Andris Mayoi
Penasihat II	: Hapok R u m
Komisaris I	: Frestik Tawandi
Komisaris II	: Yalius Rere I
Komisaris III	: Sefnat Kambora

Dengan mempunyai jumlah anggota sebanyak 60 (Enam puluh) orang.

1. Harhan	Mayoi	31. Kondrat	Mupapaty
2. Samuel	Abas	32. Yohan	Mayoi
3. Kristijan	Mayoi	33. Yoas	Kouri
4. Efort	Pairi	34. Yopi	Pairi
5. Deud	Kouri	35. Martinus	Pairi
6. Yonok	Pairi	36. Elisa	Boeri
7. Lalis	Koruni	37. Daud	Mupapaty
8. Stefanus	Inbiri	38. Abraham	Antaribaba
9. Agustianus	Nuaberi	39. Yanes	Inbiri
10. Alians	Noruni	40. Jacob	R u m
11. Yence	Mupapaty	41. Pillep	R u m
12. Adrian	Mupapaty	42. Ruban	R u m
13. Mathias	Mupapaty	43. Mathias	Tawandi
14. Kellipus	Mupapaty	44. Romelus	Antaribaba
15. Yulius	Rere II	45. Sison	Inbiri
16. Sektens	Mayoi	46. Antonius	Mayoi
17. Yosias	Kouri	47. Apner I	Mayoi
18. Barnabas	R u m	48. Yohan	Humberi
19. Teheopilus	Orerei	49. Yohan	Mayoi II
20. Yunus	Noruni	50. Yengania	Mayoi
21. Sefnat	Inbiri	51. Hapok	Mayoi
22. Ayub	Mayoi	52. Kenci	Nebul
23. Yonathan	Antaribaba	53. Bertheis	Antaribaba
24. Neklon	Orerei	54. Yance	Mayoi
25. Donagus	Noruni	55. Philipus	Mayoi
26. Witte	Rere I	56. Martinus	Mayoi
27. Gerson	Koruni	57. Yersias	Mayoi
28. Fredril	Mayoi	58. Hartben	Mayoi
29. Melchias	Mayoi	59. Norans	Mayoi
30. Yonce	Kouri	60. Charles	Mupapaty

Sesuai dengan perintah Bapak Presiden Republik Indonesia, maka kami berenti berpuasa.

Kami berangkat sampai diatas Gunung Gwi, dengan cara seb. :

1. Berpuasa pemuda disiapkan.
2. Sang saka Merah Putih dinaikkan dan dikibarkan.
3. Doa singkat yang dipimpin oleh Alhadruw Bapak Piter Mayoi.
4. Kitab Suci (Alkitab) dinaikkan keatas dan ditujukan helangit dan tanah dengan angkat 3 (tiga) jari.
5. Sambutank singkat sbd. :

Sdr-2 patriot pebebas Irian, kamu telah disugesti dengan Gans-2 Pancasila. Maka disaat ini kamu bersedia untuk mengabdikan diri dengan Gerilya-2 dari Jakarta yang sebentar lagi berada di daerah ini. Justru itu kami bersedia membantu mereka baik secara moral maupun materiil dan kita bersiap sedia untuk bertempur walaupun senjata kita tidak cukup hanya menggunakan panah dan anak panah. Semuanya dapat SCR-2 kita dari pemerintah yang disebut Korpelita dan dengan menggunakan panah runcing.

Jikalau itu kita akan bertempur melawan musuh bangsa kita, BIL

Sangat Patriot yang meluap devisa itu berlagunya terus hingga tanggal 1 Oktober 1962, dan pada tanggal 1 Mei 1963, kebeliian Irian kepangkasa Ibu Pertiwi.

Sejak tanggal 1 Oktober 1962 sampai dengan tanggal 1 Mei 1963, kami dibawah pimpinan Bapak Polisi Ratuana, kami dilatih dengan latihan militer antara lain belajar cara baris berbaris dan kami digolongkan dalam Organisasi Pertahanan Rakyat (O.P.R.) dan ditugaskan sebagai anggota keamanan di-Kota Serui.

Yang kemudian pada tanggal 5 Mei 1963, atas Pimpinan Bapak Ratuana kami diberangkatkan dengan K.H. BRANTAS ke- Bick untuk menjerup Bapak Presiden Republik Indonesia Pendiri Besar Revolusi Indonesia (Ir. SUKARNO).

Sekembalinya kami dari Bick ada yang mendapat janjian dari Pemerintah dan ada yang menanggungur hingga saat ini.

Demikianlah riwayat perjuangan kami yang disusun berdasarkan keadaan pada saat itu hingga sekarang untuk ditanggapi dan dipergunakan melengkapi riwayat hidup perorangan.

Serui, 5 Mei 1980

SAKSI YANG ADA :

A.n. KETUA BERSAMA ANGGOTA
P.K.I.I. / G.A.P.I.

BAPAK St. RUMBENAS

Kpt. Tituler ALRI. NRP.200/PT.

1. ANDRIS MAYOL

2. SUKSES LUPANAN

3. LAURENS BORAI

6	Benyamin Kayai	Komisaris II	Kep. Kampung Marladei
7	Stepanus Rumbewas	Komisaris III	Kep. Kampung Kamanap
8	Faulus Payewe	Komisaris IV	Kep. Kampung Terau
9	Stepanus Repesi	Komisaris V	Pemuka Rak- yat Weroopen
10	L.P. Tiwouw	Penasehat I	Bestur Assis -ten.
11	Barnabas Aninam	Penasehat II	Bestur Assis -ten.
12	Matheus Abza	Bendahara	Pendeta.



No: _____

Nama : _____

Tgl. lahir : _____

Kelamin : _____

Tempat asal : _____

Bangsa : _____

Agama : _____

Alamat : _____

20-3-1980

KETUA PARTAI KEMERDEKAAN
INDONESIA IRIAN

A. SAMBERTI.

**ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Partai tersebut mempunyai jiwa Yapan Waropen terdaftar dalam Leden Book (Buku ke anggotaan) berjumlah 4000 orang yang berjuang atas nama Irian-Barat untuk berjuang kepada Kemerdekaan seluruh Bangsa Indonesia Sebagai Merauke.

Susunan administrasi dan Pengerjaan mosi diajukan ke Jakarta untuk memupuk kesatuan Kemerdekaan Republik Indonesia, sedangkan tembusannya diserahkan sebagai kontak penggerak kemerdekaan dipelosok Irian Barat seperti : BIAK, SORONG, Pulau - Pulau-Raja Ampat, Kaimana, Kokes, Inanwatan dan FAK-FAK.

Politik Belanda Pada masa itu kagum, karena melihat reaksi Partai Kemerdekaan Indonesia Irian yang sengat gigih itu, sehingga Belanda terpaksa menarik kesimpulan untuk men-

dirikan PAPUA NIEUW GUINEA RAAD dengan beraksud menangkis Politik Partai Kemerdekaan Indonesia Irian di Serui.

Den akhirnya oleh Partai Kemerdekaan Indonesia Irian telah mengutus Saudara Ketua SILAS PAPARA ke Jakarta untuk memasukkan Daerah Irian Barat kedalam pangkuan Ibu Pertiwi (Kemerdekaan seluruh Bangsa Indonesia Sebagai Merauke).

SUSUNAN BADAN PEDOMAN BESAR PARTAI KEMERDEKAAN INDONESIA IRIAN (PKII) SERUI DIKORDINIR OLEH Dr. SAM RATU - LANGI MEMPUNYAI INFORMASI DARI DALAM MERUPAKAN MEDAN PERTAHANAN, terdiri dari:

No. Urut	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Silas Papara	Ketua	Pertwet RSUP
2.	Alwi Rehmen	Wakil	-
3.	Ari Kamarea	Sekr. I	Sekas bestur (dipecat).
4.	Andreas Semberi	Sekr. II	Bekas VVS (dipecat).
5.	Tung Tjing Ek	Komisaris I	Pedegang Tlonghoa

REPUBLIK INDONESIA

Kepada Mr S Papare
di Jakarta.

Sudara Papare,

Telah tibaalah saatnya sekarang
untuk mempergiat usaha kita dan
masukkan Grian - Barat kembali
kekekuasaan Republik Indonesia.
Sudara Papare, sebagai putra - asri
Grian, dan sebagai salah seorang
yang saja pertajapi, saja minta
mentyurahkan keraguan kepada
usaha kita yang mulia ini. Kond
Grian Barat, maka Indonesia buka
Indonesia!

Marilah kita mengabdikan sepenuh
penuhya kepada kita - kita - nasion
kita, yaitu Indonesia Merdeka, dari S
Lang sampai ke Merauke!

P.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II YAPEN WAROPEN

K E P U T U S A N

NOMOR : 06/KPTS/DPRD-YW/1993

TENTANG :

**PERNYATAAN POLITIK TOKOH PEJUANG
SEBAGAI PAHLAWAN NASIONAL INDONESIA
ASAL DAERAH YAPEN WAROPEN**



TANGGAL 2 FEBRUARI 1993



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II YAPEN WAROPEN

K E P U T U S A N

NOMOR : 06/KPTS/ DPRD- YW/ 93

T E N T A N G

PERNYATAAN POLITIK

TERHADAP

LOKOH PEJUANG SERAGAI PAHLAWAN
NASIONAL INDONESIA ASAL DAERAH
YAPEN WAROPEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II YAPEN WAROPEN

- MENIMBANG :
- a. BAHWA CITA - CITA KEBERDEKHAAN BANGSA DAN RAKYAT INDONESIA YANG DIPROKLAMASIKAN PADA TANGGAL 17 AGUSTUS 1945 MERUPAKAN CITA CITA PERJUANGAN RAKYAT YAPEN WAROPEN ;
 - b. BAHWA CITA-CITA PERJUANGAN RAKYAT YAPEN WAROPEN ADALAH BAGIAN DARI NEGARA KESATUHAN REPUBLIK INDONESIA SABANG-MERAUKE YANG MEMILIKI SATU BENDERA MERAH PUTIH, LAMBANG NEGARA BUNGA TUNGGAL IKA, SATU BAHASA INDONESIA, SATU BANGSA INDONESIA SATU LAJUH AIR YAITU INDONESIA LUKAH BAKAL YANG BERLANDAS KAH PANCASILA DAN UUDS- UUDS DASAR 1945 ;
 - c. BAHWA CITA CITA PERJUANGAN RAKYAT INDONESIA DI YAPEN WAROPEN TELAH TERBUJUD PADA TANGGAL 01 MEI 1963 YAITU HARI PEMERASAAN IRJAH BARAT HAKA SUDAH SONTINYA MASYARAKAT YAPEN WAROPEN MEMANBAH LEBARABAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA DENGAN MEMANBIKAN LOKOH-LOKOH PEJUANG LAYAK SERAGAI PAHLAWAN NASIONAL ;

- d. BAHWA UNTUK MEMAHAPKAN TOKOH - TOKOH DI JANG YANG LAYAK SEBAGAI PAUWON NASIONAL HINDONESIA, MAKA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II YAPEN WAROPEN MEMANDANG PERLU MENGEUARKAN SUATU PERNYATAAN POLITIK DALAM BENTUK KEDUTUSAN DEWAH SEBAGAI PEHERANG ASPIRASI RAKYAT DI DAERAH YAPEN WAROPEN.

- MENGINAT :
1. UNDANG-UNDANG NOMOR : 12 TAHUN 1969 TENTANG PEHBENTUKAN PROPINSI GUNOH IRIAN BARAT DAN KABUPATEN-KABUPATEN DIOROH DI PROPINSI IRIAN BARAT JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1973 TENTANG PERUBAHAN NAMA PROPINSI IRIAN BARAT MENJADI IRIAN JAYA :
 2. KEKETAPAN MPR RI NOMOR : 11/MPR/1978 TENTANG PEDOMAN PENGIAYATAN PENGHAALAN PANCASILA :
 3. UNDANG UNDANG NOMOR : 5 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH :
 4. KEKETAPAN MPR RI NOMOR : 11/MPR/1988 TENTANG GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA :
 5. PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II YAPEN WAROPEN.

- EMPERHATIKAN: 1. KEDUTUSAN DANITIA MUSYAWARAH NOMOR : 3/KPIS/ DPRD-YW/1993 TANGGAL. 02 FEBRUARI 1993 TENTANG RAPAT PARIPURNA PEMBAHASAN AWAL PERUMUSAN PERNYATAAN SIKAP DEWAN YANG LEBIH LANJUT DIBAWAH FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II YEPAN WAROPEN.
2. KESEPAKATAN PENDOPAT FRAKSI - FRAKSI DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II YAPEN WAROPEN YANG DISAMPAIKAN DALAM RAPAT FRAKSI-FRAKSI DEWAH TANGGAL. 6 FEBRUARI 1993.

MEHUTUSKAN/3.

- 3 -

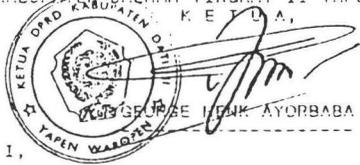
M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II YAPEN WAROPEN TENTANG PERNYATAAN POLITIK TERHADAP TOKOH-TOKOH PEJUANG YAPEN WAROPEN SEBAGAI PAHLAWAN NASIONAL ATAS NAMA ALMARIUM SILAS AYARI DUNRAI PAPARE.
- PERTAMA : MINGUSULKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA AGAR TOKOH-TOKOH PEJUANG REPUBLIK INDONESIA ASAL YAPEN WAROPEN :
- N A M A : SILAS AYARI DUNRAI PAPARE.
 TEMPAT LAHIR : SERUI LAHI.
 TANGGAL LAHIR : 18 DESEMBER 1918.
 JABATAN : PIMPINAN PARTAI KEMERDEKAAN INDONESIA IRIAN (PPKII)
- K E D U A : PEMBERIAH GELAR PAHLAWAN NASIONAL ASAL YAPEN WAROPEN KEPADA SILAS AYARI DUNRAI PAPARE KARENA JASA-JASA SEBELUM PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN SETELAH KEMERDEKAAN DI DAERAH IRIAN JAYA.
- KETIGA : PERNYATAAN POLITIK INI DISAHPAIKAN DENGAN BASA TANGGUNG JAWAB DEMI SUKSESNYA PEMBANGUNAN DAERAH IRIAN JAYA SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL DARI NEGARA DAN BANGSA INDONESIA.

DIBUAT DI :/4

DIBACA DI : S E R U
PADA : LEGAL : 6 FEBRUARI 1964

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II YAPEN WARDEN
K E T U A,



WAKIL KETUA I,


RUSLI SUARLI

WAKIL KETUA II,


JOHN MANSAI

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
K E T U A,


MUH. ARIPIEM ABBAS

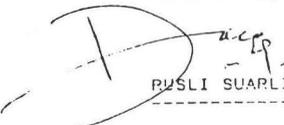
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN
K E T U A,


NIKOLAS MANIAGASI

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
K E T U A,


NIKOLAS LIKLIKWATIL

FRAKSI ANGKATAN BERSENJATA
REPUBLIK INDONESIA
K E T U A,


RUSLI SUARLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 077 /TK/TAHUN 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Merbaca : - dst -
Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Menganugerahkan Gelar "PAHLAWAN NASIONAL" disertai dengan Piagam dan "BINTANG MAHAPUTERA ADIPRADANA (KELAS III)" kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas jasa-jasa mereka yang luar biasa dan tindak kepahlawanannya dalam perjuangan melawan penjajah Pemerintah kolonial Belanda pada umumnya, khususnya dalam perjuangan mempertahankan prinsip kemerdekaan sehingga tindak kepahlawanannya yang demikian itu dapat dijadikan teladan bagi setiap Warga Negara Indonesia.

Dengan ketentuan, bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada ahli waris almarhum yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 September 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 077 /TK/TAHUN 1993
TANGGAL 14 SEPTEMBER 1993

NOMOR URUT :	N A M A :	DAERAH PERJUANGAN :	GELAR DAN TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN :
4.	SILAS PAPARE (Almarhum)	Irian Jaya	PAHLAWAN NASIONAL DAN BINTANG MAHAPUTERA ADIPRADANA

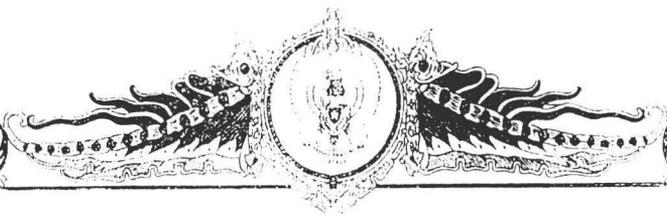


UNTUK PETIKAN :
SEKRETARIS MILITER PRESIDEN

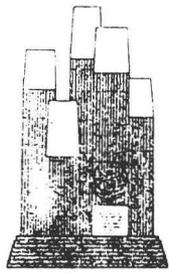
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O



No. 04/19/1993



Diagam Gelar Pahlawan

Presiden Republik Indonesia
menganugerahkan

Gelar Pahlawan Nasional
kepada

Sdr. Hilas Papare
(Almarhum)

berdasarkan Undang-Undang No. 33 Pps Tahun 1964 tentang Tatacara Penetapan Gelar Pahlawan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 077 / TK / Tahun 1993 tanggal 14 September 1993 sebagai penghargaan atas kesetiaan dan tindak kepahlawanannya dalam perjuangan melawan penjajah di daerah **Irian Jaya** sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Warga Negara Indonesia

Jakarta, 14 September 1993

Presiden Republik Indonesia


Soeharto



No 0336/0/1993



Diagam
Tanda Kehormatan

Presiden Republik Indonesia

menganugerahkan

Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera

Adipradana

kepada

Nama : Pdr. Silas Papara (Almarhum)

Pangkat : -

Jabatan : Pahlawan Nasional

sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Dri Tahun 1959, dan Keppres RI Nomor 077 /11K/Tahun 1993 sebagai Kehormatan tinggi karena berjasa luar biasa terhadap Negara dan Bangsa Indonesia.

Jakarta 14 September 1993

Presiden Republik Indonesia

B I O D A T A
D A R I
M A R T H I N I N D E Y

Nama lengkap : MARTHEN INDEY
 Tempat dan tgl. lahir : Doromena (Jayapura), 16 Maret 1918
 Pangkat/golongan : Pengatur Tk. 1/Gol. 11/d
 Jabatan : Kontrolcur/Pembantu Residen Kotabaru
 (Jayapura), Irian Jaya.
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Irian
 Agama : Kristen Protestan
 Pendidikan : 1. Sekolah Rakyat (VVS) 5 Th. (Lamat)
 2. Sekolah Pelayaran di Makasar dan
 Surabaya tahun 1932
 3. Sekolah Polisi di Sukabumi tahun 1934
 4. Sekolah Militer Para di Brisbane
 dan Gans Australia tahun 1943
 Status perkawinan : Kawin tanggal 25 Maret 1956 di Manokwari
 Nama istri : Agustina Heumassey
 Anak : 1. Frans Marcelino Charles Engelbert Indey
 2. Elkena Soroway Indey

I. RIWAYAT HIDUP :

1. Desember 1934 diangkat sebagai Agen Polisi kelas II ditempatkan di Ambon.
2. Akhir tahun 1935 dipindahkan ke Manokwari.
3. Tahun 1938-1940 mengikuti ekspedisi studi kelayakan pembuatan jalan Paniai - Mimika.
4. Pebruari 1941-1943 dipindahkan ke Tanah Merah sebagai Wakil Komandan Jaga dengan tugas menjaga interniran Belanda.
5. Tahun 1943 selama 8 bulan ~~hukuman jabatan~~ bekerja di daerah Pas-Nannam (Tanah Merah), sebagai hukuman administratif karena mengorganisasikan gerakan di bawah tanah bersama kaum interniran dan merencanakan penangkapan pegawai/pejabat-pejabat Belanda Di Tanah Merah (Digul).
6. Juli 1943 untuk kepentingan Sekutu dikirim ke Brisbane (Australia) guna latihan terjun payung dan mendapat pangkat Kopral.

7. Tanggal 22-23 April 1944 bersama-sama pasukan Sekutu (Amerika) mendarat di Hollandia (sekarang Jayapura).
8. Oktober 1944 menjadi pelatih pada Batalyon Papua di Kota Nica (sekarang Kampung Harapan).
9. Januari 1945-Januari 1947 menjadi Kepala Distrik Arso, Yamay, dan Waris.
10. Mei 1963-1968 diangkat oleh Pemerintah RI menjadi anggota MPRS utusan daerah Propinsi Irian Barat (sekarang Irian Jaya).
11. 1 Agustus 1963 dengan Surat Keputusan Gubernur/Kdh. Propinsi Irian Barat tanggal 10 Agustus 1963 No. 06/1/1/UP/63 Marthin Indey diangkat sebagai Kontrolleur diperbantukan pada Residen Kotabaru di Kotabaru (sekarang Jayapura).
12. 1 Agustus 1965 dimutasikan ke Kantor Gubernur/Kdh. Propinsi Irian Jaya di Kotabaru (sekarang Jayapura).
13. Tahun 1965 mengikuti Sidang Umum MPRS dx ke-3 di Bandung dan Peringatan Dasawarsa Konferensi Asia Afrika di Jakarta.

II. RIWAYAT PERJUANGAN :

1. Maret 1945 di Kota Nica (sekarang Kampung Harapan), secara sembunyi-sembunyi bergabung dengan kelompok Sugoro yang menanamkan kesadaran politik sebagai bangsa Indonesia kepada Marthin Indey, Corinus Krey, Silas Papare di asrama Sekolah Bestuur Kota Nica.
2. 25 Desember 1945 ditangkap Pemerintah Belanda (NICA) karena merencanakan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda-NICA guna mewujudkan kemerdekaan RI di Irian Barat.
3. Oktober 1946 menjadi anggota Komite Indonesia Merdeka (KIM) pimpinan Dr. J.A. Gerungan di Hollandia Binnen (sekarang Abepura) bersama-sama Corinus Krey, Untuk selanjutnya kepemimpinan KIM diserahkan kepada Marthin Indey (Ketua), Corinus Krey (Wakil Ketua), dan Petrus Wettobossy (Sekretaris).

4. Desember 1946 bersama 11 orang pemuka dari berbagai daerah di Irian Barat (sek. ~~Tarjan~~ Tarjan Jaya) memprotes usaha-usaha Pemerintah Belanda-NICA yang bermaksud memisahkan Irian Barat dari wilayah RI dalam konferensi Denpasar 1946. Kemudian bersama-sama Corinus Krey, Petrus Wettebosy, Marthin Indey mengiriskan telegram protes tersebut kepada Pemerintah Belanda di Nederland dan Pemerintah RI di Jakarta.
5. 7 Januari 1947 bersama keluarga ~~pergi~~ pergi ke Ambon ~~mencari~~ ~~dalam~~. Selama di Ambon pada tanggal 25 ~~Agst~~ Maret 1947 menemui Presiden NIT Sukawati dan Kapten Tahiya, dan minta agar NIT dapat mempertahankan Irian Barat tetap dalam wilayah Republik Indonesia.
6. Tanggal 25 Maret 1947 ~~selama~~ di Ambon, karena kegiatannya menghubungi tokoh-tokoh republikan di Ambon, akhirnya Marthin Indey ditangkap oleh Pemerintah Belanda-NICA dan dikirim kembali ke Hollandia (sekarang Jayapura) serta dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun. Di penjara Hollandia Binnen (sekarang Abepura) dipenjara juga Elly Wyo, Kleb Hamadi, Petrus Wettebosy, dan lain-lain.
7. Tanggal 1 Mei 1950 dibebaskan dari penjara. Bersam-sama Petrus Wettebosy menemui anggota-anggota Komisi Indonesia Belanda yaitu Mr. Letuharhary, Mr. Huh. Yamin, dan lain-lain. Kepada anggota komisi tersebut Marthin Indey dan Petrus Wettebosy memberikan laporan dan tetap mempertahankan pendirian Putai Indonesia Merdeka (PIH, semula KIH) yaitu seluruh rakyat Irian Barat sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia.
8. Tahun 1962 Marthin Indey bersama-sama R.J. Teppy menyusun organisasi bawah tanah untuk menyambut kedatangan pasukan-pasukan sukarelawan TNI/Trikota untuk bersam-sama melawan kekuatan Pemerintah Kolonial Belanda.
9. Tanggal 16 Agustus 1962 Marthin Indey menampung dan me-

9. Tanggal 16 Agustus 1962 Marthin Indey menampung dan melindungi 9 orang tentara sukarelawan TBI/Trikora yang didaratkan oleh KRI Candrasa di Tanjung Tanah Merah (DepapreO dan "disebabnyikan" di hutan sekitar Tanjung).
10. Desember 1962 bersama-sama rombongan E.Y. Bonay, Marthin Indey berangkat ke New York untuk mendesak kepada PBB agar memperpendek masa pemerintahan OTEA di Irian Barat dan menghapuskan plebisit.
11. Pebruari 1963 berangkat ke Jakarta bersama Haman Woyoi untuk menyampaikan Piagam Kotabaru kepada Presiden Sukarno. Piagam Kotabaru merupakan ikrar kebulatan tekad rakyat Irian Barat (sekarang Irian Jaya) untuk tetap setia dan patuh terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta tetap mempertahankan keutuhan bangsa dan negara RI.

IV. PENGHARGAAN :

1. Oktober 1957 menerima bintang perunggu Trouw van Verdienste dari Pemerintah Hindia Belanda di Ambon.
2. Mei 1944 menerima ikat pinggang perak dari Sekutu (Amerika) dalam Perang Dunia II di Hollandia (Jayapura).
3. Maret 1945 menerima bintang perak Trouw van Verdienste dari Pemerintah Belanda-NICA di Kotu Hica (sekarang Kampung Harapan).
4. Maret 1945 menerima bintang keberanian dari Sekutu (Amerika) di Hollandia (sekarang Jayapura).
5. 1 Agustus 1964 diangkat menjadi Mayor TNI Tituler pada Kodam XVII Cenderawasih di Kotabaru (sekarang Jayapura).
6. Piagam Pahlawan.
7. Piagam Trikora.

V. LAIN - LAIN

Pada hari Kamis, 17 Juli 1986 Marthin Indey meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Jayapurakarena sakit, dan dimakamkan di TMP Waena (Jayapura) pada hari Sabtu, 19 Juli 1986.

Mengetahui,
 KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN SOSIAL
 PROPINSI IRIAN JAYA
 Selaku
 SEKRETARIS BADAN PEMERIKSA PAHLAWAN DAERAH
 IRIAN JAYA

DRAN SUDARMA,

Jayapura, 6 Pebruari 1993
 TIM PULAKITA CALON PAHLAWAN NAS
 ASAL IRIAN JAYA

SEKRETARIS,


 ALFONS RUMBEKAH



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

Jalan Kabupaten 1 Telp. 22109 SITO 21012, 21113, 21212, 21746

Jayapura, 23 Februari 1973

Nomor : 420 / 293 / D/P
 Lampiran : 1 (satu) Expl
 Perihal : Usul Calon Pahlawan Nasional
 dari Kabupaten Jayapura a/n.
 MAYOR TITULER MARTHEN INDEY.

K e p a d a

Yth. Ketua Tim Fulata
 Calon Pahlawan Nasional
 Irian Jaya
 di -

J A Y A P U R A

Dalam rangka mengenang semangat, jiwa dan nilai juang Pembebasan Pengembalian Irian Barat sebagai bagian Integral dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanggal 1 Mei 1963, maka para Putra Daerah Irian Jaya selaku Pejuang Pembebasan, patut dihargai dan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Bangsa dan Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dari Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura, berdasarkan Nilai dan Bukti Sejarah Perjuangan Pembebasan yang ada, kami usulkan Almarhum MAYOR TITULER MARTHEN INDEY untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

Biografi Perjuangan yang bersangkutan yang menjadi dasar pengharan Pengangkatannya sebagai Pahlawan Nasional adalah sebagaimana tercantum pada lampiran.

Demikian kami usulkan untuk diketahui serta diproses lebih lanjut dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA /

YAN PIETER KARAFIR, M.Ec

TEMBUSAN kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya di Jayapura ;
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya di Jayapura ;
3. Kadit. SOSPOL Propinsi Irian Jaya di Jayapura ;
4. Kakanwil Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya di Jayapura ;
5. Ketua DPRD Tingkat II Jayapura di Jayapura ;
6. Dandim 1701 Jayapura di Jayapura ;
7. Kapolres Jayapura di Jayapura ;
8. Kakan SOSPOL Kabupaten Jayapura di Jayapura ;
9. Kadin. Sosial Dati II Jayapura di Jayapura ;
10. A r s i p.

Lampiran :

**BIOGRAFI PERJUANGAN MARTHEN INDEY
(ALMAKHUM)**

Lahir : 16 Maret 1912
Tempat lahir : Doromena/Tanah Merah ;
Kabupaten Jayapura.

A. Pendidikan

- Sekolah Rakyat 5 Tahun (Tamat) ;
- Sekolah Polisi di Sukabumi ;
- Sekolah Mariner di Makassar dan Surabaya ;
- Latihan Militer Pard di Brisbane dan Cape Australia.

B. Perjuangan

Marthen Indey mengorganisir gerakan dibawah tanah untuk menyingkarkan Pejabat-pejabat Penjajah di Tanah Merah, yang kemudian diketahui dan ditangkap, untuk selanjutnya diasingkan ke Daerah masyarakat primitif; pada bulan Maret 1945 bersama-sama dengan beberapa Tokoh Pejuang dari luar daerah (antara lain ; Sultan Hamid Panggocang - Alam, Sugoro, Panjaitan, Yusuf Masution dan Siregar).

Marthen Indey melakukan kegiatan Organisasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Irian Barat. Pada bulan Mei 1946, mengadakan rapat dan mendirikan Komite Indonesia Merdeka (KIM) yang diketahui oleh - J. Tumingen Garungan, dengan anggota masing-masing Marthen Indey dan C. Krey. Bulan Nopember 1946, mengadakan rapat kilat di Gedung Pisor Kotabaru untuk mendengarkan bunyi surat Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Belanda, pada Perjanjian Linggar Jati tanggal 15 Nopember 1946, sekaligus merubah Komite Indonesia Merdeka (KIM) menjadi Partai Indonesia Merdeka (PIM). Desember 1946, Marthen Indey bersama 11 orang Pemuka dari berbagai daerah, mengadakan Rapat Kilat dan mengambil Keputusan menghadap Residen Kolonial Belanda Van Eeckhovt, untuk dan atas nama Rakyat Irian Barat memprotes maksiud Pemerintah Belanda memisahkan Irian Barat dari Wilayah Republik Indonesia. Pernyataan sikap yang sama juga disampaikan kepada Raja Belanda Juliana di Negeri Belanda; Letnan Jenderal Van Mook di Jakarta dan Perdana Menteri Republik Indonesia; melalui Telegram yang ditandatangani oleh Marthen Indey, Corinus Krey dan Nicolas Jouwe.

Pada tanggal 25 Februari 1947, Marthen Indey menemui Presiden Indonesia Timur, Sukawati dan Kapten Tahiya, membicarakan situasi Irian Barat dan minta agar Indonesia Timur dapat mempertahankan Irian-Barat untuk tetap dalam Wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 1947, Marthen Indey ditangkap oleh Pemerintah Kolonial Belanda, sewaktu berada di Ambon kemudian di terbangkan ke Kotabaru dan dijatuhi Hukuman Penjara 4 1/2 tahun; bersama-sama dengan rekan seperjuangan lainnya diantaranya ; Eli Uyo, Kalep Hamadi, Petrus Wetebossy, Yohanis Fakdawer, Andreas Ireuw, Loren Mano dan lain-lain.

Beliau dibebaskan dari tahanan/penjara pada tanggal 1 Mei 1950 dan pada Bulan itu juga, yang bersangkutan mendapat peninjauan dari Parlemen Komisi Indonesia Belanda, dimana pihak Indonesia diwakili oleh Mr. Latuharhari dan Moh Yamin. Dalam kesempatan ini pula Marthen Indey dan P. Wetebossy melaporkan untuk tetap mempertahankan pendirian Partai Indonesia Merdeka.

Dalam tahun 1962, Beliau bersama-sama dengan R.J. Teppy menyusun Organisasi dan menunggu kedatangan Pasukan TNI/Trikora guna bersama-sama melancarkan kekuatan Pemerintah Kolonial Belanda. Dengan penuh semangat dan optimistis ikut melindungi beberapa Tentara Sukarelawan Trikora yang daratnkan dengan Kapal Selam di teluk Pesisir Pantai Depapre di Daerah Sabron, sehingga aman dibawah perlindungannya, dan dikembalikan ke Jakarta oleh Wakil Pemerintah Indonesia di UNTEA.

Kemudian pada tanggal 29 Desember 1962, bersama-sama dengan rombongan Herman Wayoi dari Kongres Nasional Papua Barat ke Jakarta, dan pada tanggal 10 Oktober 1962 mendapat perintah dari Menteri Luar Negeri RI Dr. Subandrio untuk segera kembali ke Kotabaru membebaskan Sdr. R.J. Teppy dengan rekan-rekannya yang ditahan Pemerintah Kolonial Belanda, beberapa bulan sebelumnya.

Perjuangan lebih lanjut menunjukkan bahwa, dalam bulan Desember 1962, Marthen Indey bersama-sama rombongan E.Y. Bonay berangkat ke Jakarta dan kemudian mendapat tugas ke New York membawa pernyataan / mosi untuk mendesak PBB memperpendek waktu kekuasaan UNTEA di Irian Barat dan menghapuskan Plebisit. Tanggal 27 Desember 1962 kembali dari New York melalui Alaska, Tokyo, Hongkong, Manila dan Jakarta. Bulan Pebruari 1963, beliau bersama Herman Wayoi ke Jakarta menghadap P.J.M. Presiden RI untuk menyerahkan Piagam Kotabaru, dan pada Bulan Mei 1963 diangkat oleh Pemerintah menjadi anggota MPRS mewakili Daerah Propinsi Irian Barat. Pada Bulan Desember 1963 Marthen Indey bersama A. Karomat diutus oleh Pemerintah Daerah sebagai utusan Angkatan 45, mengikuti musyawarah Angkatan 45 di Senayan Jakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat tanggal 10 Agustus 1963 Nomor : 06/1/1/63, atas nama Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, Marthen Indey diangkat sebagai Kontrolleur dan diperbantukan pada Residen Kotabaru di Kotabaru, yang kemudian tanggal 1 Agustus 1965 dimutasikan ke Kantor Gubernur KIRI Propinsi Irian Barat.

Tanggal 1 Agustus 1964, Marthen Indey diangkat menjadi Mayor T.N.I. Tituler pada Kodam XVII Cenderawasih di Kotabaru, yang merupakan penghargaan atas jasa-jasanya sebagai Pejuang Putra Daerah Irian Barat. Tahun 1965 yang bersangkutan mengikuti Sidang Umum MPRS III di Bandung dan Dasa Warsa Asia - Afrika di Jakarta. Keanggotaannya sebagai Anggota MPRS berakhir tahun 1968, setelah penunjukan dan pengangkatan Anggota MPR baru, hasil pemilihan umum ke II.

Pejuang Putra Irian Barat yang dengan penuh semangat lagi optimistis dilandasi nilai dan jiwa kebersamaan nasional ini, pada hari Kamis tanggal 17 Juli 1986 bertempat di Rumah Sakit Umum Jayapura, mengakhiri Perjuangannya karena beliau telah di panggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kini tinggal jasa-jasanya yang patut dan perlu dikenang sepanjang masa, bukan saja dikenang tetapi juga patut dihargai, untuk turut serta menciptakan profil serta eksistensi Bangsa Indonesia menjadi Bangsa yang besar, bersatu teguh berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

" Bangsa yang Besar adalah Bangsa yang menghargai jasa-jasa Pahlawannya ".



DAERAH TINGKAT II JAYAPURA /

PIETER KARAFIR, M.Ec

KEMENTERIAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

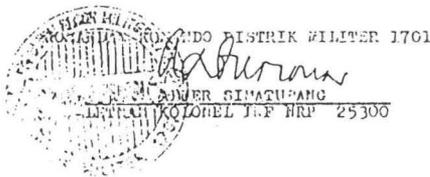
Jayapura, 23 Februari 1993

nomor : R/017/11/1993
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : --
Perihal : Pengangkatan almarhum
Marthen Indey menjadi
Pahlawan Nasional .

Kepada

Yth. KETUA BADAN PEMBINA PAHLAWAN
DAERAH IRIAN JAYA
di
Jayapura

1. Merujuk Surat Ketua Badan Pembina Pahlawan Daerah Irian Jaya Nomor : R/323/KS/1/1993 tanggal 20 Januari 1993 tentang permohonan bantuan pengumpulan data calon Pahlawan Nasional asal Propinsi Irian Jaya An. Almarhum Marthen Indey .
2. Sehubungan dengan dasar satu titik diatas , di laporkan bahwa sesuai data maupun catatan yang ada di Kodim 1701/Jayapura sbb :
 - a. Almarhum Marthen Indey selama hidupnya tidak ditemukan adanya indikasi terlibat gerakan yang menentang Pancasila , Undang undang Dasar 1945 , Pemerintah dan Negara Republik Indonesia .
 - b. Almarhum Marthen Indey termasuk salah satu tokoh pejuang pembebasan Irian Barat (Irian - Jaya) bersama sama dengan beberapa tokoh pejuang dari daerah lain (antara lain Sultan Hamid Penggoncang Alam , Sugoro , Panjaitan , Yusuf Hoution dan Siregar) .
 - c. Almarhum Marthen Indey tergabung dalam Komite Indonesia Merdeka (KIM) yang diketuai oleh J. Tumitingen Gerungan kemudian berubah menjadi Partai Indonesia Merdeka (PIM) .
 - d. Almarhum Marthen Indey meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1986 dan dimakamkan di Makam Pahlawan Kusuma Trikora Abepura .
3. Merujuk hal tsb diatas tepat kiranya apabila almarhum Marthen Indey diangkat dan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional dari daerah Irian Jaya .
4. Demikian untuk menjadikan perkara serta sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut .



Tembusan :

1. Pangdam VIII/Trikora
Up. Aspera.
2. Sub.KDH Tk I Prop.Irja.
3. Danren 172/PWY.
4. Kapolres Jayapura.
5. Bupati KDH Tk II Jayapura.
6. Kajari Jayapura.

No. 14364

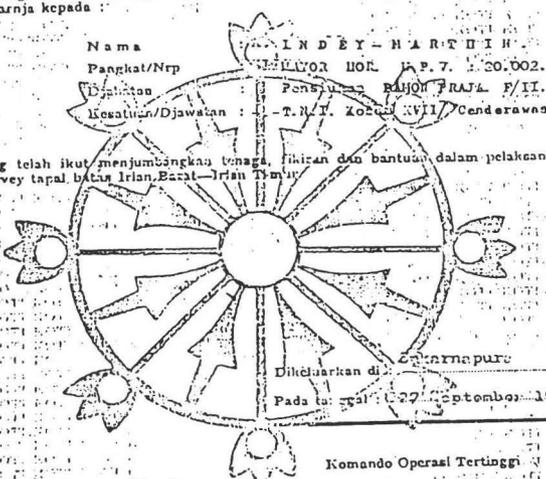
PIAGAM

Cenda Terima Kasih

Dengan ini mengucapkan terimakasih dan menjatakan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

Nama : **INDRY - HARTINI**
Pangkat/Nrp : **WELWOR HOR. N.P. 7. 1.20.002.232**
Dipangkat : **Pensiyas RAYON PRAJA F/II**
Kecamatan/Djawatan : **T.N.II. Kosok VII/Cenderawasih**

yang telah ikut menjumbangkan tenaga, pikiran dan bantuan dalam pelaksanaan Survey tapal batas Irian Barat - Irian Timur



Dikeluarkan di : **Samarapura**
Pada tanggal : **22 September 1966**

Komando Operasi Tertinggi

Operasi Tjenderawasih II

Komandan



DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN

13

No. 561232 V.A



PETIKAN

SURAT-KEPUTUSAN
Nomor Skrif 050 / VII / 1964.

tentang

PENGAKUAN, PENGESAHAN DAN PENGANUGERAHAN
GELAR KEHORMATAN... VETERAN PERANG KEMERDEKAAN R.I. ...
(Pasal 1 ayat (2) dari UU No. 7 Tahun 1967)

MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN/PANGlima ANGKATAN BERSENJATA

Menimbang : d a l
Meringat : d a l
Memperhatikan : d a l

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menguk, mengesahkan dan menganugerahkan Gelar Kehormatan
"Veteran Perang Kemerdekaan R.I." kepada

Nama : HARTINUS ANDRI,
N P V : 26.002.832,
Golongan : Ix
Masa Bhakti : 17: 10: 1942 - 27 Maret s/d 4 Mei 1964,
Predikat :
Dengan catatan : /

Bahwa apabila ditemukan hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat
Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : d a l

PETIKAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya serta berlaku juga
sebagai Surat Keterangan Veteran R.I.

Dikeluarkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 31 Juli 1964

MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN /
PANGlima ANGKATAN BERSENJATA

Capitid.

Kepada Yth.:

Sdr. H. D.D.M.

di JAYAPURA



untuk PETIKAN
ditandatangani dengan aslinya

SI CADA MAN VISIOM
KEPA
KEMENTERIAN PERTAHANAN KEAMANAN
PANGlima ANGKATAN BERSENJATA



DEWAN HARIAN NASIONAL ANGGARAN - 45

Piagam Penghargaan
dan
Medali Perjuangan Angkatan - 45

Nomor: 45 B.094.

Diberikan kepada:

Saudara: **Marthin Endeu**
Propinsi
Jrian Jaya

Dalam rangka memperingati 45 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai penghargaan atas perannya penyabdianya dalam upaya melestarikan Jiwa, Semangat, dan Nilai-nilai 45.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian. Amin.

Tetap Merdeka!

Jakarta, 10 Nopember 1990.

Ketua Umum.

H. SURONO





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 077 /TK/TAHUN 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : - dst -
Merimbang : - dst -
Mengingat : - dst -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Menganugerahkan Gelar "PAHLAWAN NASIONAL" disertai dengan Piagam dan "BINTANG MAHAPUTERA ADIPRADANA (KELAS II)" kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas jasa-jasa mereka yang luar biasa dan tindak kepahlawanannya dalam perjuangan melawan penjajah Pemerintah Kolonial Belanda pada umumnya, khususnya dalam perjuangan mempertahankan prinsip kemerdekaan sehingga tindak kepahlawanannya yang demikian itu dapat dijadikan teladan bagi setiap Warga Negara Indonesia.

Dengan ketentuan, bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembedulan seperlunya.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada ahli waris almarhum yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 September 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 077 /TK/TAHUN 1993

TANGGAL 14 SEPTEMBER 1993

NOMOR URUT :	N A M A :	DAERAH PERJUANGAN :	GELAR DAN TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN :
5.	MARTHEN INDEY (Almarhum)	Irian Jaya	PAHLAWAN NASIONAL DAN BINTANG MAHAPUTERA ADIPRADANA

UNTUK PETIKAN :
SEKRETARIS MILITER PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O



No. 6339/0/1993



**Biagam
Tanda Kehormatan**

Presiden Republik Indonesia

menganugerahkan

Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera

Adipradana

kepada

Nama : Ht. Marhzn Indgy (Almarhum)

Pangkat : -

Jabatan : Pahlawan Nasional

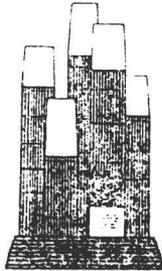
sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Dst Tahun 1959, dan Keppres RI Nomor 077 /TK/ tahun 1993 sebagai Kehormatan tinggi karena berjasa luar biasa terhadap Negara dan Bangsa Indonesia.

Jakarta 14 September 1993

Presiden Republik Indonesia

Soeharto

No 05/P/1993



Diagam Gelar Pahlawan

Presiden Republik Indonesia
menganugerahkan

Gelar Pahlawan Nasional
kepada

Sdr. Marthen Inday
(Almarhum)

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Prps Tahun 1964 tentang Tatacara Penetapan Gelar Pahlawan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 077 / TK / Tahun 1993 tanggal 14 September 1993 sebagai penghargaan atas kesetiaan dan tindak kepahlawanannya dalam perjuangan melawan penjajah di daerah **Irian Jaya** sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Warga Negara Indonesia

Jakarta, 14 September 1993

Presiden Republik Indonesia

Soeharto

15 August 1962.

**AGREEMENT
BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
CONCERNING
WEST NEW GUINEA (WEST IRIAN)**

The Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands,
Having in mind the interests and welfare of the people of the
territory of West New Guinea (West Irian) hereinafter referred to
as "the territory,"

Desirous of settling their dispute regarding the territory,
Now, therefore, agree as follows:

**Ratification of Agreement and Resolution of
the General Assembly of the United Nations
Article I**

After the present Agreement between Indonesia and the Netherlands has been signed and ratified by both Contracting Parties, Indonesia and the Netherlands will jointly sponsor a draft resolution in the United Nations under the terms of which the General Assembly of the United Nations takes note of the present Agreement; acknowledges the role conferred upon the Secretary General of the United Nations therein, and authorizes him to carry out the tasks entrusted to him therein.

**Transfer of Administration
Article II**

After the adoption of the resolution referred to in Article I, the Netherlands will transfer administration of the territory to a United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) established by and under the jurisdiction of the Secretary-General upon the arrival of the United Nations Administrator appointed in accordance with Article IV. The UNTEA will in turn transfer the administration to Indonesia in accordance with Article XII.

**United Nations Administration
Article III**

In order to facilitate the transfer of administration to the UNTEA after the adoption of the resolution by the General Assembly, the Netherlands will invite the Secretary-general to send a representative to consult briefly with the Netherlands Governor will depart prior to the arrival of the United Nations Administrator.

Article IV

A United Nations Administrator, acceptable to Indonesia and the Netherlands will be appointed by the Secretary-General

Article V

The United Nations Administrator, as chief executive officer of the UNTEA will have full authority under the direction of the Secretary-General to administer the territory for the period of the UNTEA administration in accordance with the terms of the present Agreement.

Article VI

1. The United Nations flag will be flown during the period of United Nations administration.

2. With regard to the flying of the Indonesian and Netherlands flags, it is agreed that this matter will be determined by agreement between the Secretary-General and the respective governments.

Article VII

The Secretary-General will provide the UNTEA with such security forces as the United Nations Administrator deems necessary; such forces will primarily supplement existing Papuan (West Irianese) police in the task of maintaining law and order. The Papuan Volunteer Corps, which on the arrival of United Nations Administrator will cease being part of the Netherlands armed forces, and the Indonesian armed forces in the territory will be under the authority of, and at the disposal of, the Secretary-General for the same purpose. The United Nations Administrator will, to the extent feasible, use the Papuan (West Irianese) police as a United Nations security force to maintain law and order and, at his discretion, use Indonesian armed forces. The Netherlands armed forces will be repatriated as rapidly as possible and while still in the territory will be under the authority of the UNTEA.

Article VIII

The United Nations Administrator will send periodic reports to the Secretary-General on the principal aspects of the implementation of the present Agreement. The Secretary-General will submit full reports to Indonesia and the Netherlands and may submit, at his discretion, reports to the General Assembly or to all United Nations Members.

First Phase of the UNTEA Administration

Article IX

The United Nations Administrator will replace as rapidly, as possible top Netherlands officials as defined in Annex A with non-Netherlands, non-Indonesian officials during the first phase of the UNTEA administration which will be completed on 1963. The United Nations Administrator will be authorized to employ on a temporary basis all Netherlands officials other than top Netherlands officials defined in Annex A, who wish to serve the UNTEA, in accordance with such terms and conditions as the Secretary-General may specify. As many Papuan (West Irianese) as possible will be brought into administrative and technical positions. To fill the remaining required posts, the UNTEA will have authority to employ personnel provided by Indonesia. Salary rates prevailing in the territory will be maintained.

Article X

Immediately after the transfer of administration to the UNTEA, the UNTEA will widely publicize and explain the terms of the present Agreement, and will inform the population concerning the transfers of administration to Indonesia and the provisions for the act of self-determination as set out in the present Agreement.

Article XI

To the extent that they are consistent with the letter and spirit of the present Agreement, existing laws and regulations will remain in effect. The UNTEA will have the power to promulgate new laws and regulations or amend them within the spirit and framework of the present Agreement. The representative councils will be consulted prior to the issuance of new laws and regulations or the amendment of existing laws.

Second Phase

Article XII

The United Nations Administrator will have discretion to transfer all or part of the administration to Indonesia at any time after the first phase of the UNTEA administration. The UNTEA's authority will cease at the moment of transfer of full administrative control to Indonesia.

Article XIII

United Nations security forces will be replaced by Indonesian security forces after the first phase of the UNTEA administration. All United Nations security force will be withdrawn upon the transfer of administration to Indonesia.

Indonesian Administration and 'Self-Determination

Article XIV

After the transfer of full administrative responsibility to Indonesia, Indonesian national laws and regulations will in principle be applicable in the territory, it being understood that they be consistent with the rights and freedoms guaranteed to the inhabitants under the terms of the present Agreement. New laws and regulations or amendments to the existing ones can be enacted within the spirit of the present Agreement. The representative councils will be consulted as appropriate.

Article XV

After the transfer of full administrative responsibility to Indonesia, the primary task of Indonesia will be further intensification of the education of the people, of the combating of illiteracy, and of the advancement of their cultural and economic development. Efforts also will be made in accordance with present Indonesian practice to accelerate the participation of the people in local government through periodic elections. Any aspects relating to the act of free choice will be governed by the terms of this Agreement.

Article XVI

At the time of the transfer of full administrative responsibility to Indonesia a number of United Nations experts, as deemed adequate by the Secretary General after Consultation with Indonesia, will be designated to remain wherever their duties require their presence. Their duties will, prior to the arrival of the United Nations Representative, who will participate at the appropriate time in the arrangements for self-determination, be limited to advising on and assisting in preparations for carrying out the provisions for self-determination except in so far as Indonesia and the Secretary-General may agree upon their performing other expert functions. They will be responsible to the Secretary General for the carrying out of their duties.

Article XVII

Indonesia will invite the Secretary-General to appoint a Representative who, together with a staff made up, *inter-alia* of experts referred to in Article XVI, will carry out the Secretary-General's responsibilities to advise, assist and participate in arrangements which are the responsibility of Indonesia for the act of free choice. The Secretary-General will, at the proper time, appoint the United Nations Representative in order that he and his staff may assume their duties in the territory one year prior to the date of self-determination. Such additional staff as the United Nations Representative might feel necessary will be determined by the Secretary-General after consultations with Indonesia. The United Nations Representative and his staff will have the same freedom of movement as provided for the personnel referred to in Article XVI.

Article XVIII

Indonesia will make arrangements, with the assistance and participation of the United Nations Representative and his staff, to give the people of the territory the Opportunity to exercise freedom of choice. Such Arrangements will include :

- a. Consultations (hiusiawarah) with the representative councils on procedures and appropriate methods to be followed for ascertaining the freely expressed will of the population.
- b. The determination of the actual date of the exercise of free choice within the period established by the prextit Acrecmerz.
- c. Formulation of the questions in such a way as to permit the to decied (a) Whether they wish to remain with Indonesia : or (b) whether they wish to sever their ties with Indonesia
- d. The eligibility of all adults, write and fertile, not foreign national to participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with international practice, who are residents at the time of the signing of the present Agreement and at the time of the act of self-determination, including those residents who depart after 1945 and who return to the territory to resume residence after the termination of Netherlands administration.

Article XIX

The United Nations Representative will report to the Secretary-General on the arrangements arrived at for freedom of choice.

Article XX

The act self-determination will be completed before the end of 1969.

Article XXI

1. After the exercise of the right of self-determination, Indonesia and the United Nations Representative will submit final reports to the Secretary-General who will report to the General Assembly on the conduct of the act of self-determination and the results thereof.

2. The parties to the present Agreement will recognize and abide by the results of the act of self-determination. Rights of the Inhabitants

Article XXII

1. The UNTEA and Indonesia will guarantee fully the rights, including the rights of free speech, freedom of movement and of assembly of the inhabitants of the area. These rights will include the existing rights of the inhabitants of the territory at the time of the transfer of administration to the UNTEA.

2. The UNTEA will take over existing Netherlands commitments in respect of concessions and property rights.

3. After Indonesia has taken over the administration it will honor those commitments which are not inconsistent with the interests and economic development of the people of the territory. A joint Indonesian-Netherlands commission will be set up after the transfer of administration to Indonesia to study the nature of the above-mentioned concessions and property rights.

4. During the period of the UNTEA administration there will be freedom of movement for civilians of Indonesian and Netherlands nationalities to and from the territory.

Article XXIII

Vacancies in the representative councils caused by the departure of Netherlands nationals, or for other reasons, will be filled as appropriate consistent with existing legislation by elections, or by appointment by the UNTEA. The representative councils will be consulted prior to the appointment of new representatives.

Financial matters

Article XXIV.

1. Deficits in the budget of the territory during the UNTEA administration will be shared equally by Indonesia and the Netherlands.

2. Indonesia and the Netherlands will be consulted by the Secretary-General in the preparation of the UNTEA budget and other financial matters

ANNEX A TO THE AGREEMENT

Top Netherlands officials to be replaced as rapidly as possible with non-Netherlands, non-Indonesia officials.

I. Government:	
Head Government Information Bureau	1
Head Popular Information Service	1
II. Department of Iriterna Affairs-	
Director	1
Divisional Commissioners ("Residenten"):	6
1. Hollandia	
2. Biak	
3. Manokwari	
4. Fakfak	
5. Merauke	
6. Central Highlands.	
Administrative Head of the General Police	1
III. Department of Finance:	
Director	1
IV. Department of Social Affairs and Justice:	
Director	1
V. Department of Public Health:	
Director	1
VI. Department of Economic affairs :	
Director	1
VII. Department of Economic Affairs:	
Director	1
VIII. Department of Transport and Power :	
Director	1
IX. Department of Public Works:	
Director	1
	Total : 18

LETTER FROM THE TWO PARTIES TO THE ACTING SECRETARY
GENERAL OF THE UN RELATING TO THE MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING REGARDING THE CESSATION OF
HOSTILITIES

15 August 1962

Sir,

On behalf of our respective Governments, on the occasion of the signature of the Agreement, between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian), we have the honour to bring to your attention the Memorandum of Understanding arrived at between our Governments concerning the cessation of hostilities in West New Guinea (West Irian), the signed original of which is contained in Annex A to this note.

In bringing the annexed Memorandum of Understanding to your attention we have the honour to request, on behalf of our respective Governments, that you indicate your willingness to undertake as an extraordinary measure the functions conferred upon the Secretary-General in it in order to give the earliest possible effect to the cessation of hostilities, reserving your right to report to the General Assembly of the United Nations at the appropriate time. Our respective Governments have in mind, in making this request, the urgent necessity for your assistance and that of United Nations personnel in implementing the agreement on cessation of hostilities.

The Memorandum of Understanding sets out the agreement arrived at between our respective Governments that our Governments will, on an equal basis, meet all costs incurred by you in carrying out your responsibilities under the Memorandum. To this end, our Governments have agreed to make available in advance such sums as you may deem necessary.

(Signed) Subandrio
Representative of Indonesia

(Signed) J. Herman van Roijen
Representative of the Netherlands

(Signed) C. W. A. Schurmann
Representative of the Netherlands

To
The Acting Secretary-General
United Nations

ANNEX A TO LETTER TO U THANT

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON CASSATION OF
HOSTILITIES CONSTITUTING AN AGREEMENT BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE KINGDOM
OF THE NETHERLANDS**

1. Cassation of hostilities in West New Guine (West Irian), hereinafter referred to as "the territory", is to take place at 0001 GMT on Saturday 18 August 1962.
As from that moment the following rules will be observed:
 - (a) Cease fire by both parties.
 - (b) Indonesia and the Netherlands will not reinforce their military forces in the territory nor resupply them with military materiel.
 - (c) The Secretary-General of the United Nations will assign United Nations personnel (i) to observe the implementation of this agreement and (ii.) in particular to take necessary steps for the prevention of any acts endangering the Security of forces of both parties to this agreement.
 - (d) Any incidents that might occur will be immediately reported by the party concerned to the United Nations personnel in order that they may take the necessary measures to restore the situation in consultation with both parties.
2. The cessation of hostilities will be communicated to the Netherlands and Indonesian armed forces by the following means:
 - (a) Messages transmitted through Indonesian and Netherlands radiostations and via other means of communication.
 - (b) The dropping of leaflets in the areas concerned in accordance with the provisions of paragraph 3 hereof.
3. In order to overcome the special difficulties in communicating the cease fire to Indonesian force in the territory pre-arranged flight, will be carried out by Indonesian air-craft, with the purpose of dropping leaflets on which a text, approved by the Secretary-General will be printed. The Indonesian authorities agree to enable the distribution of this pamphlet to isolated posts as soon as possible and not later than a fortnight from the cessation of hostilities. On these flights United Nations personnel will be on board to report, in advance and after the flight, on the time and the route of the flight and the areas of dropping leaflets.
4. To facilitate resupply of Indonesia troops in the territory and in order that they may be under the authority of and at the disposal of the Secretary-General at the appropriate time, Indonesia will make the necessary arrangements with regard to their location in selected areas, in agreement with the Secretary-general. The Secretary-general will act in consultation herein with the Netherlands Administration Authorities.

5. The supply of non-military materiel to the Indonesian armed forces the territory will be effected by the United Nations personnel in co-operation with Indonesian and Netherlands authorities. United Nations personnel may use one or two unarmed Indonesian vessel,-; for transport to one or more ports agreeable to the Netherlands authorities. Air supply will be carried out under The direction of the United Nations personnel in United Nations aircraft.
6. With a view to carrying out the arrangements mentioned under paragraphs 3, 4, and 5 hereof, a United Nations liaison and an Indonesian liaison, each consisting of three officers, will be established at a Netherlands forces headquarters in the territory. Military Liaison Officers will be included in the Permanent Missions to the United Nations of the Netherlands and Indonesia for liaison with the Secretary-General's Office.
7. As soon as possible after the adoption by the General Assembly of the United Nations of the resolution referred to in Article I of the Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian), and not later than 1 October 1962, a United Nations security force including an infantry battalion with ancillary arms and services will be placed by the Secretary-General at the disposal of the United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) in the territory, to primarily supplement the existing Papuan (West Irianese) Police in the task of maintaining law and order.
8. The Netherlands will make arrangements through the intermediary of the Secretary-General to repatriate Indonesian prisoners as soon as possible after the signing of the Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian).
9. Indonesia and the Netherlands will jointly, request the Secretary-General to undertake the functions conferred on him in this agreement.
10. Indonesia and the Netherlands will share on an equal basis all costs incurred by the Secretary-General under this agreement, and will make available in advance such sums as he deems necessary.

Done on this fifteenth day of August 1962.

(Signed) Subandrio

For the
Republic of Indonesia

(Signed) J. H. van Roijen

For the
Kingdom of the Netherlands

(Signed) C.W.A. Schurmann

For the
Kingdom of the Netherlands

ACTING SECRETARY-GENERALS REPLY

15 August 1962.

Sir,

I have the honour to acknowledge the receipt of the note of today's date addressed to me by the Representative of the Republic of Indonesia and the Representatives of the Kingdom of the Netherlands, concerning the cessation of hostilities in West New Guinea (West Irian), reading as follows :

"On behalf of our respective Governments, on the occasion of the signature of the Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian), we have the honour to bring to your attention the Memorandum of Understanding arrived at between our Governments concerning the cessation of hostilities in West New Guinea (West Irian), the signed original of which is contained in Annex A to this note.

"In bringing the annexed Memorandum of Understanding to your attention we have the honour to request on behalf of our respective Governments, that you indicate your willingness to undertake as an extraordinary measure the functions conferred upon the Secretary-General in it in order to give the earliest possible effect to the cessation of hostilities and reserving your right to report to the General Assembly, of the United Nations at the appropriate time. Our respective Governments have in mind, in making this request, the urgent necessity for your assistance and that of United Nations personnel in implementing the agreement on cessation of hostilities.

"The Memorandum of Understanding sets out the agreement arrived at between our respective Governments, that our Governments will, on an equal basis, meet all costs incurred by you in carrying out your responsibility under the Memorandum. To this end, our Governments have agreed to make available in advance such sums as you may deem necessary."

In reply I have the honour to inform you that, subject to the terms and conditions of the note under reference, I am prepared to undertake the responsibilities specified in that note and its related annex.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

(Signed) U Thant

Acting Secretary-General

The Representative of the
Republic of Indonesia

The Representative of the
Kingdom of the Netherlands

**MEMORANDUM OF UNDERSATNDING CONSTITUTING AN
AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIK OF INDONESIA AND THE
KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON CERTAIN FINANCIAL
MATTERS DURING THE GUINE (WEST IRIAN) BY THE UNITED
NATIONS TEMPORARY EXECUTIVE AUTHORITY (UNTEA)**

1. With the view to preparing the budget for the period of administration of the territory of West New Guinea (West Irian) by the United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) in accordance with Article XXIV of the Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian), a committee will be set up as soon as possible consisting of representatives of the Secretary-General of the United Nations, the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands in order to collect the necessary information and to make appropriate recommendations to the Secretary General. The committee will make recommendations to the Secretary-General concerning the amount to be placed at the disposal of the United Nations Administrator by the Netherlands and the Indonesian Governments at the beginning of the UNTEA period.

2. In establishing the budget for the UNTEA period, the United Nations Administrator will make his calculations on the basis of a rate of exchange for the New Guinea guilder at US\$ 1.00 = N.G. fl. 3.62.

DONE this Fifteenth day of August 1962 in three original copies.

(Signed) **Subandrio**

For the
Republic of Indonesia

(Signed) **J. H. san Roijen**

For the
Kingdom of the Netherlands

(Signed) **C. W. A. Schurmann**

For the
Kingdom of the Netherlands

**LETTER FROM THE TWO PARTIES TO THE ACTING SECRETARY
GENERAL OF THE UN, CONCERNING THE AGREEMENT RELATING
TO TRAVEL DOCUMENTS AND CONSULAR ASSISTANCE AND
PROTECTION ABROAD TO PAPUANS (WEST IRIANESE)**

15 August, 1962

Sir,

On behalf of our respective Governments, on the occasion of the signature of the Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian), we have the honour to bring to your attention the following agreement arrived at between our Governments and hereby placed on record, concerning the issue of passports and consular protection during the period of the administration by the United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) provided for in the aforesaid Agreement

"1. The UNTEA shall have the authority at its discretion to issue travel documents to Irapuans (West Irianese) applying therefor without prejudice to their right, to apply for Indonesian passports instead

"2. The Governments of Indonesia and of the Netherlands shall at the request of the Secretary-General furnish consular assistance and protection abroad to Papuans (West Irianese) carrying the travel documents mentioned in the previous paragraph, it being for the person concerned to determine to which consular authority he should apply."

Should the above be acceptable to you, we have the honour further to propose that the note and your reply to the above effect shall be regarded as constituting and placing upon record the agreement reached in this matter.

Accept, Sir, the assurances of our highest consideration.

(Signed) **Subandrio**

Representative of Indonesia

(Signed) **J. B. van Roijen**

Representative of the Netherlands

(Signed) **C. W. A. Schurmann**

Representative of the Netherlands

To
The Acting Secretary-General
United Nations

**IDENTICAL LETTERS FROM ACTING SECRETARY-GENERAL
U THANT TO THE REPRESENTATIVE OF INDONESIA AND THE
REPRESENTATIVES OF THE NETHERLANDS**

15 August 1962

Sir,

I have the honour to acknowledge the receipt of the note of today's date addressed to me by the representatives of the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands, concerning the issue of passports and consular protection during the period of the administration by the United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) of the territory of West New Guinea (West Irian), and reading as follows:

"On behalf of our respective Governments, on the occasion of the signature of the Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian), we have the honour to bring to your attention the following agreement arrived at between our Governments and hereby placed on record, concerning the issue of passports and consular protection during the period of the administration by the United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) provided for in the aforesaid Agreement

"1. The UNTEA shall have the authority at its discretion to issue travel documents to Papuans (West Irianese) applying there for without prejudice to their right to apply for Indonesian passports instead

"2. The Governments of Indonesia and of the Netherlands shall at the request of the Secretary-General furnish consular assistance and protection abroad to Papuans (West Irianese) carrying the travel documents mentioned in the previous paragraph, it being for the person concerned to determine to which consular authority he should apply."

"Should the above be acceptable to you, we have the honour further to propose that the note and your reply to the above effect shall be regarded as constituting and placing upon record the agreement reached in this matter."

In reply I have the honour to inform you that I am prepared to instruct the UNTEA, when it is established as provided for in the Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian), to undertake the function referred to in the note under reference. I would like to take this occasion to request your Government to undertake consular assistance and protection abroad to Papuans (West Irianese) as provided in paragraph No. 2 of the note under reference.

"This note and your note under reference shall be regarded as constituting and placing on record the agreement reached in this matter.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

(Signed) U Thant

Acting Secretary-General

Indonesia's Reply to the Acting Secretary-General

15 August 1962.

Sir,

I have the honour to acknowledge the receipt of your note of today's date, indicating your Willingness to undertake certain functions concerning issue of passport! during the period of the administration by the United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) of the territory of West New Guinea (West Irian) and requesting my Government to undertake consular assistance and protection abroad to Papuans (West Irianese) requesting such assistance and protection during the period of the UNTEA Administration. I have the honour to inform you that my Government will undertake such consular assistance and protection.

Accept, Sir, assurances of my highest consideration.

(Signed) **Subandrio**
Representative of Indonesia

Netherlands Reply to the Acting Secretary-General

15 August 1962.

Sir,

We have the honour to acknowledge the receipt of your note of to day's date, indicating your willingness to undertake certain functions concerning issue of passports during the period of the administration by the United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) of the territory of West New Guinea (West Irian) and requesting our Government to undertake consular assistance and protection abroad to Papuans. (West Irianese) requesting such assistance and protection during the period of the UNTEA Administration. We have the honour to inform you that our Government will undertake such consular assistance and protection.

Accept, Sir, the assurances of our highest consideration.

(Signed) **J.H. van Roijen**

Representative of the Netherlands

(Signed) **C. W. A. Schurmann**

Representative of the Netherlands

**EXCHANGE OF LETTERS REGARDING RESUMPTION OF DIPLOMATIC
RELATIONS BETWEEN THE NETHERLANDS AND INDONESIA**

15 August 1962

Sirs.

I have the honour on behalf of the Republic of Indonesia to confirm the understanding that after the signing of the Agreement the exchange of diplomatic missions will take place between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands.

Accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

(Signed) Subandrio
Representative of the
Republik of Indonesia.

To
The Representatives of the
Kingdom of the Netherlands

15 August 1962

Sir,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date reading as follows

I have the honour on behalf of the Republic of Indonesia to confirm the understanding that after the signing of the Agreement the exchange of diplomatic missions will take place between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands."

In reply we have the honour to confirm that the above is the understanding of the Kingdom of the Netherlands.

Accept, Sir, the assurances of our highest consideration.

(Signed) **J. R. van Roijen**

Representative of the
Kingdom of the Netherlands.

(Signed) **C. W. A. Schurmann**

Representative of the
Kingdom of the Netherlands.

The Representative of the Republic of
Indonesia.

**AIDE MEMOIRE OF ACTING SECRETARY GENERAL U THANT TO
INDONESIA REGARDING THE TRANSFER OF AUTHORITY OF
WEST IRIAN**

31 July 1962

AIDE MEMOIRE

The following is my understanding in regard to the modalities of the transfer of authority over West New Guinea (West Irian) :

1. The authority of the Government of the Netherlands over the territory will be terminated when the Special Representative of the Secretary General take.. charge. On the same day the United Nation flag will be hoisted.
2. From the same date the withdrawal and repatriation of the armed forces of the Netherlands will begin under the supervision of the Secretary-General's Special Representative and will be concluded as soon as possible. (While awaiting repatriation the armed forces will not be engaged in any military operation).
3. On 1 January 1963 the Indonesian flag will be hoisted side by side with the United Nations flag.
4. The transfer of authority to Indonesia will be effected as soon as possible after 1 May 1963.

U Thant

Acting Secretary-General

15 August 1962

AIDE MEMOIRE

Amendment to Aide Memoire dated 31 July 1962.

Substitute the following for paragraph

3. On 31 December 1962 the Netherlands flag will be struck and the Indonesian flag will be hoisted side by side with the United Nation flag.

U Thant

Acting Secretary-General

**AIDE MEMOIRE OF ACTING SECRETARY-GENERAL U THANT TO
THE NETHERLANDS REGARDING THE TRANSFER OF AUTHORITY
OF WEST IRIAN**

15 August 1962

AIDE MEMOIRE

The following modalities have been agreed to by Indonesia and the Netherlands regarding the transfer of authority of West New Guinea (West Irian):

1. The authority of the Government of the Netherlands over the territory will be terminated when the Special Representative of the Secretary-General takes charge. On the same day the United Nations flag will be hoisted.
2. From the same date the withdrawal and repatriation of the armed forces of the Netherlands will begin under the supervision of the Secretary-General's Special Representative and will be concluded as soon as possible.
3. On the day of the transfer of authority to the United Nations, the Netherlands flag will be hoisted side by side with the United Nations flag, and it will fly, until 31 December, 1962.
4. The transfer of authority to Indonesia will be effected as soon as possible after 1 May 1963.

U Thant

Acting Secretary-General

15 August 1962

**STATEMENT BY ACTING SECRETARY-GENERAL U THAT AT
CEREMONY OF SIGNING OF AGREEMENT BETWEEN REPUBLIC
OF INDONESIA AND KINGDOM OF NETHERLANDS**

On this eventful occasions when the Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands, in regard to the future of West New Guinea (West Irian) is about to be signed, I would like first, of all to congratulate the two governments on their, "Willingness to settle this question by peaceful negotiation, and also on their spirit of "give and take" which has made possible the conclusion of this agreement.

I am sure I am right in saying that as a result, there will be not only an easing of tension in the area, but also an increased feeling of mutual trust and confidence between the two governments. It is a good augury that with the signing of this Agreement, diplomatic relations are to be resumed between the two countries, and I am sure that their future relations will be marked by the friendliness, understanding and cordiality that have prevailed during these negotiations.

I would also like to take this opportunity to place on record, publicly, my gratitude to Ambassador Ellsworth Bunker who has acted on my behalf during the preliminary negotiations between the two governments and whose patience, integrity and diplomatic skill have contributed so greatly to the successful conclusion of this Agreement.

There are several unique features about this Agreement. One is that, if the General Assembly endorses it the United Nations would have temporary executive authority (established by acts under The jurisdiction of the Secretary-General) over a vast territory for the first time in its history. Another is that the entire expenses to be incurred under the terms of this Agreement are to be shared by the two governments and will not impose a burden on any of the other member governments. Considerable executive responsibilities are placed on the Secretary-General and Secretariat of the United Nations, some of which have necessarily to be undertaken, in the interests of peace and security in anticipation of the approval of the General Assembly. It will be my endeavor and that of my colleagues to fulfill these tasks to the best of our capacity.

If these responsibilities are to be discharged to the satisfaction of all concerned, I shall need the willing cooperation of both governments, especially during the period of transition. I hope that my task will be facilitated by the scrupulous adherence on the part of both governments to the letter and spirit of this Agreement. Without it my task would become immensely difficult, and I earnestly appeal to both governments to make their cooperation available to me in the fullest measure.

Before closing, I would like to congratulate once again the representatives of the two governments on the imminent signature of this historic agreement which, in line with the principles of the Charter, has settled peacefully a long-standing problem, with benefit to all concerned.

15 August 1962

**STATEMENT BY DR. SUBANDRIO, REPRESENTATIVE OF INDONESIA
AT THE CEREMONY OF THE SIGNING OF THE AGREEMENT
BETWEEN THE NETHERLANDS AND INDONESIA**

For the Indonesian people this very moment is regarded as a very important national occasion since with the signing of the agreement the Indonesian unity has been restored and therefore the basis for the struggle for independence completed as part and parcel of the Indonesian revolution.

It is therefore that we are most gratified, for Secretary-General, that you took the initiative as early as in December for both parties to come together in order to solve this problem in a peaceful way.

The positive response from the Indonesian and Netherlands side towards your urgent appeal results in the agreement we have just signed. Your guidance during the negotiations based upon sincerity, wisdom and experience, has made us pass with success through all the intricacies of a negotiated settlement. For that the Indonesian Government and people will be very grateful to you.

On behalf of the Indonesian Government and people I want also to thank, sincerely, the tireless efforts and patience of Ambassador Bunker who never spared himself physically and mentally in order to overcome all the difficulties and obstacles which sometimes seem to flood the path toward this agreement.

To be frank, without the personal qualities inherent to Ambassador Bunker, it would be almost impossible to formulate an agreement within such a short period.

I also want to make use of this opportunity, to congratulate Dr. Van Roijen, Dr. Schurmann and all the members of his delegation for the success of this agreement, and on behalf of my colleagues and myself, I want to express our deep appreciation for the consistent sincerity with which they have approached the problems we are dealing with.

And last but not least, Mr. Secretary-General, our deepest appreciation to your devoted colleagues on the Secretariat for their unfailing assistance without which this success could not have been achieved.

The success of this agreement which is also a success of the United Nations I hope will lead to further achievements in solving problems with which the United Nations has been engaged.

Now that this agreement has been signed, now that the Indonesian unity is reaching its completion, I sincerely hope that the traditional friendship between Indonesia and the Netherlands, could be restored.

Thank you.

**PERSETUDJUAN
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KERADJAAN NEDERLAND
MENGENAI
IRIAN BARAT**

(Pemerintah) Republik Indonesia dan (Pemerintah) keradjaan Nederland.

Mengingat kepentingan-kepentingan dan kesedjahteraan rakjat wilayah Irian Barat. jang selandjutnju disebut

Berhasrat menyelesaikan persengketaan mereka mengenai wilayah tersebut. maka sekarang bersetudju seperti tersebut dibawah ini :

**Pengesjahan Persetudjuan dan Resolusi Madjelis
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pasal I**

Setelah Persetudjuan antara Indonesia dan Nederland sekarang ini ditandatangani dan disjahkan oleh kedua belah pihak. Indonesia dan Nederland akan bersama mengadakan rentjana resolusi dalam Perserikatan Bangsa-bangsa jang mencandung ketentuan-ketentuan bahwa Madjelis Umum mentjatat Persetudjuan sekarang ini. memaklumi peranan Sekretaris Djenderal Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Persetudjuan tersebut. dan memberikan kuasa kepada Sekretaris Djenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan tugas-tugas jang dipertjajakan kepadanya dalam Persetudjuan ini.

**Penjerahan Pemerintahan
pasal II**

Setelah resolusi termaktub dalam Pasal I diterima. Nederland akan menjerahkan pemerintahan diwilajah tersebut kepada Badan Penguasa Pelaksana Semenatra Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Temporary Executive Authority: UNTEA). dibentuk oleh dan dibawah yurisdiksi Sekretaris Djenderal. pada set tibanja Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa jang diangkat sesuai dengan Pasal IV. UNTEA selandjutnja alan menjerahkan pemerintahan kepada Indonesia sesuai dengan Pasal XII.

**Pemerintahan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pasal III**

Untuk melantjarkan penjerahan pemerintahan kepada UNTEA setelah di terimanja resolusi oleh Madjelis Umum. Nederland akan mempersilahkan Sekretaris-Djenderal mengirimkan Scoring untuk mengadakan musyawarah singkat dengan Gubernur Nederland dari wilayah tersebut sebelum Gubernur berangkat.

Gubernur Nederland akan berangkat sebelum kedatangan Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal IV

Seorang Penguasa Peserikatan Bangsa-Bangsa, jang dapat diterima oleh Indonesia dan Nederland, akan diangkat oleh Secretaris Djenderal.

Pasal V

Penguasa Peserikatan Bangsa-Bangsa sebagai kepala, pelaksana UNTEA, akan berkuasa penuh atas petundjuk-petundjuk Sekretris Djenderal untuk mendjalankan pemerintahan diwilajah tersebut selama djangka waktu pemerintahan UNTEA sesuai dengan ketentuan-kentuan Persetudjuan ini.

Pasal VI

Bendera Peserikatan Bangsa-Bangsa alan dikibarkan selama masa pemerintahan Peserikatan Bangsa-Bangsa.

Mengenai pengibaran bendera Indonesia dan bendera Nederland, telah terdapat suatu pengertian bahasa hal tersebut akan ditentukan antara Sekretris Djenderal dan masing-masing pemerintah jang bersangkutan dalam suatu persetudjuan (tersenderi).

Pasal VII

Sekretris Djenderal akan menjediakan bagi UNTEA pasukan-pasukan keamanan jang dipandang perlu oleh Penguasa Peserikatan Bangsa-Bangsa pasukan-pasukan demikian itu terutama dimaksudkan ustuk memperkuat Polisi Irian Barat jang telah ada, dalam tugasnja mendjaga keamanan dan ketertiban umum, Korps Sukarela Irian Barat, jang pada saat tibanja Penguasa Peserikatan Bangsa-Bangsa akan berhenti sebagai bagian daripada angkatan bersendjata Nederland, dan angkatan bersendjata Indonesia di wilajah tersebut akan ditempatkan dibawah kekuasaan dan dipertentukkan bagi Sekretris Djenderal untuk maksud jang lama. Penguasa Peserikatan Bangsa-Bangsa sedapat mungkin akan menggunakan polisi Irian Barat sebagai pasukan keamanan Peserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendjaga keamanan dan keterliban umum dan, atas kebidjaksanaannja mempergunakan angkatan bersendjata Indonesia, Anglakan bersendjata Nederland, akan dipulangkan setjepat mungkin dan selama mereka berada diwilajah tersebut akan ditempatkan di bawah pengawasan UNTEA.

Pasal III

Penguasa Peserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan laporan-laporan berkala kepada Sekretris Djenderal tentang aspek-aspek ulama mengenai pelaksanaan Persetudjuan ini. Sekretris Djenderal akan rnenjampaikan laporan-laporan lengkap kepada IrONESIA dan Nederland dan, atas kebidjaksanaannja dapat menjampaikan laporan kepada Madjelis Umum atau kepada semua anggota Perkerikatan Bangsa-Bangsa

Taraf Pertama Pemerintahan UNTEA Pasal IX

Penguasa Peserikatan Bangsa-bangs setjepat mungkin akan mengganti pedjabat-pedjabat tertinggi Nederland jang termaktub dalam lampiran A dengan pedjabat bukan-Nederland, bukan-Indonesia selama taraf pertama pemerintahan UNTEA jang

akan berakhir pada tanggal 1 Mei 1963 Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan berwenang memperkerdjakan untuk sementara waktu semua pedjabat-pedjabat Nederland. selain dari pada pedjabat-pedjabat tertinggi Nederland termaktub dalam Lampiran A. jang ingin bekerdja pada UNTEA. dengan ketentuan-ketentuan serta sjarat-sjarat jang dapat ditetapkan oleh Sekretaris Djenderal. Sebanjak mungkin orang-orang Irian Barat akan ditempatkan pada kedudukan-kedudukan administratif dan teknis. Untuk- mengisi djabatan-djabatan jang diperlukan selebihnja. UNTEA akan berwenang mempekerdjakan pegawai-pegawai jang disediakan oleh Indonesia. Skala gadji jang telah dipakai di Irian Barat akan dipertahankan (diteruskan).

Pasal X

Segera setelah penjerahan pemerintahan kepada UNTEA. UNTEA akan mengumumkan dan akan menerangkan setjara luas ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini. dan akan memberitahukan kepada penduduk perihal penjerahan pemerintahan kepada Indonesia dan ketentuan-ketentuan bagi pelaksanaan penentuan nasib sendiri seperti tertera dalam Persetujuan sekarang ini.

Pasal XI

Sepandjang ada persesuaian dengan kata dan djiwa persetujuan sekarang ini. perundang-undangan jang telah ada akan tetap berlaku. UNTEA akan berkuasa mengeluarkan perundang-undangan baru atau mengubahnja dalam djiwa dan rangka persetujuan sekarang ini

Dewan-dewan Perwakilan akan dikonsultasi sebelum dikeluarkannya Undang-undang dan Peraturan-peraturan baru atau diubahnja Undang-undang dan Peraturan-peraturan jang telah ada.

Tahaf Kedua

Pasal XII

Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi kebidjaksanaan untuk menjerahkan pemerintahan seluruhnja atau sebagian kepada Indonesia setiap walku sesudah taraf pertama pemerintahan UNTEA. Kekuasaan UNTEA akan berakhir pada saat penjerahan kekuasaan pemerintahan sepenuhnya kepada Indonesia.

Pasal XIII

Pasukan-pasukan keamanan Perstrikatan Bangsa-Bangsa akan diganti dengan pasukan-pasukan keamanan Indonesia sesudah taraf pertama pemerintahan UNTEA. Semua pasukan keamanan Perstrikatan Bangsa-Bangsa ditarik mundur pada saat penjerahan pemerintahan kepada Indonesia.

Pemerintahan Iudenesia dan Penentuan Nasib Sendiri

Pasal XIV

Setelah penjerahan tanggung djawab pemerintahan sepenuhnya. kepada Indonesia. Undang-undang dan Peraturan-Peraturan Nasional Indonesia sebagai dasar akan berlaku diwilajah tersebut dengan pengertian bahwa Undang-undang dan

Peraturan-peraturan itu sesuai dengan djaminan hak-hak serta kebebasan-kebebasan bagi penduduk menurut ketentuan-ketentuan Perwudjuan sekarang ini.

Undang-undang dan peraturan-peraturan baru atau perolehan-perolehan pada Undang-undang dan Peraturan-peraturan jang telah ada dapat didjalankan menurut djiwa Persetujuan ini.

Dewan-dewan Perwakilan akan dikonsultasi seperlunja.

Pasal XV

Setelah penjerahan kekuasaan pemerintahan sepenuhnya kepada Indonesia, tugas utama Indonesia ialah mempergiat lebih lanjut, pendidikan rakjat, pemberantasan buta huruf, kemadjuan perkembangan sosial, kebudayaan dan ekonomi.

Sesuai dengan praktek-praktek di Indonesia dewasa ini akan dilakukan pula usaha-usaha untuk mempertjepat ikut sertanja Rakjat didalam pemerintahan daerah rnelalui pemilihan berkala. Tiap aspek jang bertujuan dengan perwudjudan kebebasan memilih akan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini.

Pasal XVI

Pada saat, penjerahan tanggung djawab pemerintahan sepenuhnya kepada Indonesia sedjumlah pegawai ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa, jang dianggap mentjukupi oleh Sekretaris Djenderal sesudah berkonsultasi dengan Indonesia, akan ditundjuk untuk tetap tinggal dimana sadia kewadajiban mereka memeritakannja. Sebelum kedatangan wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa jarg akan ikutserta pada saat jang wadjar dalam mengadakan usaha-usaha penentuan nasib sendiri, kewajiban mereka akan terbatas pada memberi nasihat dan membantu persiapan-persiapan untuk rnelaksanakan ketentuan-ketentuan bagi penentuan nasib sendiri, ketjuali bilamana Indonesia dan Sekretaris Djenderal dapat bersetudju bahwa mereka akan mendjalankan pekerdjaan ahli jang lainnja. Mereka akan bertanggung jawab pada Sekretaris Djenderal mengenai pelaksanaan kewadajiban-kewadajiban mereka.

Pasal XVII

Indonesia akan mempersilahkan Sekretaris Djenderal mengangkat seorang jang bersama dengan staf jang antara lain, terdiri dari pegawai-pegawai tertera dalam pasal XVI, akan melaksanakan kewadajiban Sekretaris Djenderal untuk memberi nasihat membantu dan ikut-serta dalam usaha-usaha untuk perwudjudan kebebasan memilih jung merupakan tanggung djawab Indonesia.

Sekretaris Djenderal pada waktu jang wadjar akan mengangkat seorang Wakil Perseikatan Bangsa-bangsa agar ia dengan Stafnja dapat mendjalankan kewadajiban-kewadajiban mereka satu tahun sebelum tanggal penentuan nasib sendiri. Penambahan staf jang sekiranja dipandang perlu oleh wakil PERserikatan BANGsa-bangsa akan ditentukan oleh Sekretaris Djenderal setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Indonesia.

Wakil Perserikatan Bangsa-bangsa dan stafnja akan menpunjai kebebasan bergerak jang sama seperti jang diberikan kepada pegawai-pegawai jang disebut dalam pasal XVI.

Pasal XVIII

Indonesia, dengan bantuan dan ikut sertanja wakil Perserikatan Bangsa-bangsa dan stafnja, akan mengadakan usaha-usaha untuk memberi kesempatan kepada rakjat wilayah tersebut untuk melaksanakan kebebasan mamilih. Usaha-usaha tersebut akan mentjakup :

- a. Konsultasi (Musjawarah) dengan dewan-dewan perwakilan mengenai prosedur dan tjara-tjara jang pantas dianut untuk mengetahui kebebasan pernjjataan kehendak rakjat.
- b. Penentuan tanggal jang pasti untuk pelaksanaan kebebasan memilih dalam djangka waktu jang ditetapkan oleh Persetudjuan sekarang ini.
- c. Perumusan pertanjaan-pertanjaan sedemikian rupa agar penduduk dapat menentukan (a) apakah mereka ingin tetap bergabung dengan Indonesia ; atau (b) apakah mereka ingin memutuskan hubungan mereka dengan Indonesia.
- d. Hak pilih semua orang dewasa, pria dan wanita, bukan warga-negara asing, jang merupakan penduduk pada waktu penanda tangan Persetudjuan dan pada waktu perwudjudan penentuan nasib sendiri, untuk ikut serta dalam perwudjudan penentuan nasib, sendiri jang akan dilaksanakan sesuai dengan praktek internasional, termasuk penduduk-penduduk jang pergi sesudah 1945 dan kembali kedaerah itu untuk bertempat tinggal lagi setelah berachirnja Pemerintahan Nederland.

Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa akan melaporkan kepada Sekretaris Djenderal tentang, usaha-usaha jang telah disiapkan untuk perwudjudan kebebasan memilih.

Pasal XX

Perwudjudan penentuan nasib sendiri akan dilaksanakan sebelum achir tahun 1969.

1. Setelah pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri, Indonesia dan Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menjampaiakan laporan-laporan terachir kepada Sekretaris Djenderal jang kemudian akan melaporkan kepada Madjelis Umum tentang pelaksanaan perwudjudan penentuan nasib sendiri serta hasil-hasilnja.
2. Pihak-pihak pada persetudjuan sekarang ini akan mengakui dan menaati hasil-hasil pemudjudan penentuan nasib sendiri itu.

Hak-hak Penduduk

Pasal XXII

1. UNTEA dan Indonesia akan mendjamin sepenuhnya hak-hak penduduk daerah tersebut, termasuk hak-hak bebas bitjara, bebas bergerak dan hak berkumpul dan bersidang. Hak-hak ini ukan mentjakup hak-hal- penduduk wilayah jang telah ada pada waktu penjerahan pemerintahan pada UNTEA.

2. UNTEA akan mengoper djangji-djangji Nederland jang telah ada mengenai konsensi-konsesi dan hak-hak milik.
3. Setelah Indonesia mengambil alih pemerintahan, Indonesia akan mengoper djangji-djangji tersebut jang tidak bertentangan dengan kepentingan dan perkembangan ekonomi rakjat wilayah tersebut. Suatu panitia bersama Indonesia Nederland akan dibentuk setelah penjerahan pemerintahan pada Indonesia, untuk mempelajari silat konsesi-konsesi dan hak-hak milik tersebut diatas.
4. Selama masa pemerintahan UNTEA akan ada kebebasan bergerak bagi orang-orang sipil jang berwarga-negeraan Indonesia dan Nederland keluar masuk wilayah itu.

Pasal XXIII

Lowogan-lowongan dalam dewan-dewan perwakilan disebabkan keberangkatan warganegara-warganegara Nederland, atau karena sebab-sebab lain akan diisi setjara wadjar dan sesuai dengan perundang-undangan jang ada dengan djalan pemilihan atau pengangkatan oleh UNTEA, dewan-dewan perwakilan akan dikonsultasikan sebelum pengangkatan wakil-wakil baru.

Soal-soal Keuagan

Pasal XXIV

1. Defisit-defisit dalam anggaran belandja dari wilayah selama pemerintahan UNTEA akan dibagi rata antara Indonesia dan Nederland. Indonesia dan Nederland akan dikonsultasi oleh Sekretaris Djenderal dalam mempersiapkan anggaran belandja UNTEA, dan hal-hal keuangan lainnja jang bersargkutan dengan kewadajiban-kewadajiban Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan persetujuan sekarang ini, namun Sekretaris Djenderal berwenang memberikan keputusan terachir.
2. Kedua belah pihak dari Persetujuan sekarang ini akan membajar kembali kepada Sekretaris Djenderal semua pengeluaran jang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Persetujuan ini dan akan menjediakan uang muka setjukupnja untuk pelaksanaan kewadajiban-kewadajiban Sekretaris Djenderal. Kedua, belah pihak dari Persetujuan ini akan membagi rata pembajaran kembali seperti tersebut diatas dan pengeluaran-pengeluaran uang muka tersebut.

Perdjandjian-perdjanjian dan Persetudjuan-Persetudjuan terdahulu Pasal XXV

Persetudjuan sekarang ini akan berlaku lebih kuat daripada setiar Perdjanjian terdahulu mengenai wilayah Irian Barat. Perdjanjian-djanjian dan persetujuan-persetudjuan terdahulu mengenai wilayah Irian Barat oleh karenanja dapat dibatalkan atau disesuaikan menurut keperluan untuk diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan sekarang ini.

Kelonggaran dan kekebalan Pasal XXVI

Untuk pelaksanaan Persetujuan sekarang ini, Indonesia dan Nederland akan menjalankan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Konvensi mengenai Kelonggaran dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap milik, uang modal dan para pegawai dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Teristimewa Penguasa Perserikatan Bangsa-bangsa yang diangkat menurut Pasal IV dan Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diangkat menurut Pasal XVII, akan mendapat kelonggaran dan kekebalan seperti yang ditjantumkan dalam pasal XIX dari Konvensi mengenai Kelonggaran dan Kekebalan Bangsa-Bangsa.

Ratifikasi Pasal XXVII

1. Persetujuan sekarang ini akan diratifikasikan menurut prosedur-prosedur konstitutionil daripada kedua belah pihak yang mengadakan Persetujuan.
2. Piagam-Piagam ratifikasi akan ditukar selekas mungkin di Markas Besar Perserikatan Bangsa-bangsa oleh wakil-wakil tetap dari kedua belah pihak di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Sekretaris Djenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa selandjutnja akan membuat berita atjara dari penukaran piagam ratifikasi dan akan menjampaikan turunan yang disjahkan kepada masing-masing pihak.

Waktu Mulai Berlakunja Persetujuan pasal XXVIII

1. Persetujuan sekarang ini mulai berlaku pada tanggal Madjelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima resolusi seperti yang tertera di Pasal I dari Persetujuan sekarang ini.
2. Pada saat berlakunja, Persetujuan sekarang ini akan ditjatat oleh Sekretaris Djenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut Pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Naskah Resmi Pasal XXIX

Naskah resmi Persetujuan sekarang ini telah disusun dalam bahasa Inggris. Ferdjemahannja dalam bahasa Indonesia dan Nederland akan dipertukarkan antara kedua belah pihak.

Demi untuk penjaksian segala itu, maka wakil-wakil berkuasa penuh yang bertanda-tangan dibawah ini dan yang diberi wewenang lengkap oleh masing-masing pemerintahnja menandatangani Persetujuan sekarang ini.

Dibuat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New, York, pada hari kelimabelas bulan Agustus 1962 dalam tiga ganda kembar, diantaranya satu ganda

disampaikan kepada Sekretaris Djenderal dan selebihnja disampaikan kepada Pemerintah masing.-masing pihak jang mengadakan persetudjuan ini.

(ttd.) Subandrio
Untuk Republik Indonesia

(ttd.) J. Herman van Roijen
Untuk Keradjaan Nederland

(ttd.) C.W.A. Schurmann
Untuk Keradjaan Nederland

15 Agustus 1962

LAMPIRAN A PADA PERSETUJUAN

Pedjabat-pedjabat tertinggi Belanda jang harus diganti setcepat mungkin oleh pedjabat-pedjabat bukan-Nederland dan bukan-Indonesia.

I.	Pernerintah	
	Kepala Biro Penerangan Pemerintah	1
	Kepala Dinas Pencerangan Rakjat	1
II.	Departemen Dalam Negeri	1
	Direktur	6
	Kepala ² Daerah („Residen ² “):	
	1. Hollandia	
	2. Biak	
	3. Manokwari	
	4. Fak Fak	
	5. Merauke	
	6. Dataran-tinggi Tengah	
	Kepala Administratip Polisi	
III.	Departemen Keuangan	
	Direktur	1
IV.	Departemen Urusan Sosial dan Kehakiman	
	Direktur	1
V.	Departemen Kesehatan	
	Direktur	1
VI.	Departemen Urusan Kebudayaan (termasuk Pendidikan)	
	Direktur	1
	Kepala Siaran	
VII.	Departemen Urusan Ekonomi	
	Direktur	1
VIII.	Departemen Pengangkutan dan Tenaga	
	Direktur	1
X.	Departemen Pekerdjaan Umum	
	Direktur	1

 Djumlah : 18

**SURAT DARI KEDUA BELAH PIHAK BERKENAAN DENGAN
MEMORANDUM PENGERTIAN MENGENAI
PERHENTIAN PERMUSUHAN**

15 Agustus 1962.

Tuan.

Atas nama Pemerintah kami masing-masing, pada kesempatan penanda tangan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland mengenai Irian Barat, kami dengan hormat mohon perhatian Tuan atas Memorandum Pengertian yang telah ditjapai antara Pemerintah-Pemerintah kami mengenai penghentian permusuhan di Irian Barat, yang naskah aslinja yang telah ditandatangani termuat dalam lampiran A pada surat ini.

Dalam memohon perhatian Tuan atas Memorandum Persetujuan yang dilampirkan itu kami dengan hormat mengajukan permohonan, atas nama Pemerintah kami masing-masing, agar Tuan menjatakan kesediaan Tuan selaku tindakan yang luar biasa untuk mendjalankan pakerdjaan yang diberikan kepada Sekretaris Djenderal dalam Memorandum itu dengan maksud melaksanakan penghentian permusuhan secepat mungkin, dengan tidak mengurangi hak Tuan untuk memberikan laporan kepada Madjelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada waktu yang Pemerintah kami masing-masing, dalam mengajukan permohonan ini, menginsafi keperluan yang mendesak akan bantuan Tuan dan bantuan petugas-petugas Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melaksanakan Persetujuan mengenai penghentian permusuhan.

Memorandum Pengertian tersebut mendjelaskan Persetujuan yang telah ditjapai antara Pemerintah kami masing-masing bahwa Pemerintah kami akan membagi rata segala beaja yang dikemukakan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban Tuan atas dasar Memorandum tersebut. Demi untuk keperluan itu Pemerintah-Pemerintah kami telah menjtetujui untuk menjediakan djumlah-djumlah uang muka yang Tuan anggap perlu.

Terimalah, Tuan. Pernyataan penghargaan kami yang setinggi-tingginja.

(ttd.) Subandrio

Wakil Indonesia

(ttd) J. Herman Van Roijen

Wakil Nederland

(ttd.) C.W.A. Schurmann

Wakil Nederland

**ANNEX PADA SURAT KEPADA U THANT
MEMORANDUM PENGERTIAN BERSAMA MENGENAI PENGHENTIAN
PERMUSUHAN JANG MERUPAKAN PERSETUJUAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN KERADJAAN NEDERLAND**

1. Penghentian permusuhan di Irian Barat jang selanjutnja disebut „wilayah“, akan dimulai pada djam 0001 GNT pada hari Sabtu 18 Agustus 1962. Mulai saat itu akan ditaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Penghentian tembak-menembak oelh kedua belah pihak.
- b. Indonesia dan Nederlands tidak akan memperkuat pasukan-pasukan militemja diwilayah Irian Barat, pun tidak akan memberikan perbekalan lagi kepada mereka dengan alat-alat perlengkapan militer.
- c. Sekretaris Djenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menugaskan petugas-petugas Perserikatan Bangsa-Bangsa (I) untuk mengawasi pelaksanaan persetudjuan ini dan (II) khususnya untuk mengambil tindakan jang diperlukan guna mentjegah tindakan-tindakan jang dapat mem
- d. Tiap insiden jang mungkin timbul akan segera dilaporkan oleh fihak jang bersangkutan kepada petugas-petugas Perserikatan Bangsa-Bangsa agar supaya mereka dapa mengambil tindakan-tindakan jang diperlukan untuk memulihkan keadaan atas dasar konsultasi dengan kedua belah pihak.

2. Penghentian permusuhan akan disampaikan kepada pasukan-pasukan bersendjata dari nederland dan dari Indonesia dengan djalan sebagai berikut :

- a. Berita-berita jang disiarkan melalui pemantjar-pemantjar radio Indonesia dan Nederland dan dengan tjara-tjara kounikasi jang lainnja.
- b. Dropping pamflet-pamflet didaerah-daerah jang bersangkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 3:

3. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan khusus dalam menjampaikan penghentian tembak-tembak kepada pasukan-pasukan Indonesia diwilayah Irian Barat, penerbangan-penerbangan jang telah diatur terlebih dahulu akan dilaksanakan oleh pesawat-pesawat Indonesia dengan maksud mengadakan dropping pamflet-pamflet jang ditjtitak dengan naskah jang terasing setjepat mungkin dan tidak akanlebih lama dari duam minggu sedjak pernghentikan permusuhan. Dalam penerbangan-penerbangan ini petugas-petugas Perserikatan Bangsa-Bangsa akan ikut untuk memberikan laporan, sebelum dan sesudah penerbangan, mengenai waktu dan route penerbangan dan daerah-daerah dimana diadakan dropping pamflet.

4. Untuk memudahkan pemberian perbekalan lagi kepada pasukan-pasukan Indonesia diwilayah Irian Barat dan agar supaya mereka berada dibawah kekuasaan dan diperuntukan bagi Sekretaris Djenderal pada waktu jang lajak, Indonesia akanmereka didaerah jang terpilih, dengan persetujuan Sekteraris djenderal. Sekretaris Djenderal akan bertindak dalam hal ini atas dasar konsultasi dengan pembesarpembesar Pemerintahan Nederland.

5. Pemberian perbekalan jang terdiri dari alat-alat perlengkapan non-militer kepada pasukan-pasukan bersenjata Indonesia di wilayah Irian Barat akan dilaksanakan oleh petugas-petugas. Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan bekerdja-sama dengan pembesar-pembesar Indonesia dan Nederland. Petugas-petugas Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mempergunakan satu atau dua kapal Indonesia disetujui oleh pembesar-pembesar Nederland. Pemberian perbekalan melalui udara akan dilaksanakan atas petunjuk-petunjuk dari petugas-petugas Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan memakai pesawat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

6. Dengan maksud melaksanakan persetujuan-persetudjuan tersebut dalam Pasal-Pasal 3.4 dan 5. satu penghubung Perserikatan Bangsa-Bangsa dan satu penghubung Indonesia masing-masing terdiri dari 3 perwira akan diadakan pada markas-besar angkutan perang Nederland di daerah Irian Barat. Perwira Perwira Penghubung militer akan ditempatkan di Peraturan-Peraturan Tetap pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dari Nederland dan Indonesia untuk menjalankan tugas penghubung dengan kantor Sekretaris Djenderal.

7. Selekas mungkin setelah penerimaan resolusi jang disebut dalam Pasal I dari Persetujuan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland mengenai Irian Barat oleh Madjelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan selambat-lambatnja tanggal 1 Oktober 1962. satu pasukan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk satu bataljon Infantri dengan perlengkapan bantuannja akan diperuntukkan bagi UNTEA oleh Sekretaris Djenderal di wilayah Irian Barat dengan maksud terutama untuk memperkuat polisi Irian Barat jang telah ada dalam tugasnja mendjaga ketertiban dan keamanan umum.

8. Nederland akan membuat persiapan-persiapan dengan melalui Sekretaris Djenderal untuk memulangkan tawanan-tawanan Indonesia selekas rnungkin setelah penandatanganan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland mengenai Irian Barat.

9. Indonesia dan Nederland akan bersama-sama mengajukan permintaan Kepada Sekretaris Djenderal agar beliau mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaan jang diberikan kepada beliau dalam Persetujuan ini.

10 Indonesia dan Nederland akan membagi rata segala beaja jang dikeluarkan oleh Sekretaris Djenderal atas dasar Persetujuan ini dan akan menjediakan sebelumnya djumlah uang muka jang dipandang perlu oleh beliau.

Dibuat pada hari tanggal 15 Agustus. 1962.

(ttt) Subandrio
Untuk Republik Indonesia

(ttt.) J.H. van Roijen
Untuk Keradjaan Nederland

(ttt.) C. W. A. Schurmann
Untuk Keradjaan Nederland

DJAWABAN DARI PEDJABAT SEKRETARIS DJENDRAL U THANT

1902

Tuan

Dengan hormat saja memberitahukan telah menerima surat tertanggal hari ini jang dialamatkan kepada saja oleh Wakil Republik Indonesia. dan wakil-wakil Keradjaan Nederland. mengenai penghentian di Iria Barat jang berbunji sebagai berikut :

..Atas nama Pemerintahan kami masing-masing pada Perseutjan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland Mengenai Irian Barat. kami dengan hormat mohon perhatian Tuan atas Memorandum Pengertian permusuhan dk Irian Barat Jang telah ditjapai antara Pemerintah-perintah kami mengenai penghentian permusuhan di Irian Barat. jang naskah aslinya jang telah ditandatangani termuat dalam Lampiran A pada surat ini.

Dalam memohon perhatian Tuan atas Memorandum Persestudjuan jang dilampirkan itu kami dengan hormat mengajukan permohonan. atas nama Pemerintahn kami masing-masing. agar Tuan menjatakan kesediaan Tuan selaku tindakan jang laur biasa untuk mendjalankan pekerdjaan jang diberikan kepada Sekretaris Djenderal dalam Memorandum itu dengan maksud melaksanakan penghentian permusuhan selekas mugnkin. dengan tidak mengurangi hak Tuan untuk memberikan laporan kepada Madjelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melaksanakan Persestudjuan mengenai penghentian permusuhan.

Memorandum Pengertian tersebut mendjelaskan Persestudjuan jang telah ditjapai antara Pemerintah kami masing-masing bahwa Pemerintah kami akan membagi rata segala beaja jang dikeluarkan dalam melaksanakan kewadajiban-kewadajiban Tuan atas dasar Memorandum tersebut. Demi untuk keperluan itu Pemerintah-pemerintah kami telah menjetudjui untuk menjediakan djmlah-djumlah uang muka jang Tuan anggap perlu".

Sebagai djawaban dengan hormat saja memberitahukan kepada Tuan bahwa atas nama ketentuan-ketentuan dan sjarat-sjarat dalam surat tersebut saja bersedia mendjalankan kewadajiban-kewadajiban tertera dalam surat tersebut dan lampirannja.

Terimalah. Tuan. pernajaan penghargaan saja setinggi-tingginja.

(ttt) U Thant

Pedjabat Sekretaris Djenderal

kepada

1. Wakil Republik Indonesia
2. Wakil Keradjaan Nederland

15 Agustus 1962

**MEMORANDUM PENGERTIAN
JANG BERSIFAT SUATU PERSETUDJUAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN KERADJAAN NEDERLAND
MENGENAI BEBERAPA SOAL KEUANGAN
SELAMA WAKTU PEMERINTAHAN DI IRIAN BARAT OLEH
BADAN PENGUASA PELAKSANA SEMENTARA
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (UNTEA)**

1. Untuk mempersiapkan anggaran belandja bagi masa pemerintahan dari wilayah Irian Barat oleh Badan Penguasa Pelaksana Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA) sesuai dengan Pasal XXIV dari Persetudjuan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland mengenai Irian Barat, akan dibentuk sebuah Panitia setcepat mungkin terdiri dari wakil-wakil dari Sekretaris Djenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Keradjaan Nederland dengan maksud mengumpulkan keterangan-keterangan jang diperlukan dan mengajukan usul-usul jang wajar kepada Sekretaris Djenderal mengenai djumlah uang jang akan diperuntukan bagi Penguasa Perserikatan Bangsa-bangsa oleh Pemerintah Nederland dan Pemerintah Indonesia pada permulaan masa UNTEA.

2. Dalam menentukan anggaran belandja bagi masa UNTEA, Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan membuat perhitungannya atas dasar nilai banding bagi New Guinea guilder sesuai dengan US \$ 1.00 sama dengan N.G. guilder 3.62.

DIBUAT pada hari tanggal lima belas Agustus, 1962 dalam rangkap tiga asli.

(ttd) Subandrio
Untuk Republik Indonesia

(ttd) J. H. van Boijen
Untuk Keradjaan Nederland

(ttd) C. W. A. Schurmann
Untuk Keradjaan Nederland

**SURAT DARI KEDUA PIHAK KEPADA PEDJABAT SEKRETARIS
DJENDERAL P.B.B. PERIHAL PERSETUDJUAN MENGENAI
SURAT-SURAT PERDJALANAN DAN BATUAN KONSULER
SERTA PERLINDUNGAN DILUAR NEGERI TERHADAP
ORANG-ORANG IRIAN BARAT**

15 Agustus 1962

Tuan.

Atas nama Pemerintah kami masing-masing, pada saat penandatanganan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland mengenai Irian Barat, dengan hormat kami minta perhatian Tuan tentang persetujuan berikut yang ditjapai antara Pemerintah kami dan dengan ini ditjatkan, mengenai pengeluaran paspor-paspor dan perlindungan konsuler selama masa pemerintah oleh Badan Penguasa Pelaksana Sementara Perserikatan Sementara Perserikatan Bangsa-bangsa (UNTEA) yang tersebut dalam Persetujuan diatas :

"2 UNTEA akan mempunyai kekuasaan sebagai kebidjaksanaannya untuk mengeluarkan surat-surat perdjalanan bagi orang-orang Irian Barat yang memintanya, dengan tidak menghilangkan hak mereka untuk sebaliknya meminta paspor Indonesia :

"2 Pemerintahan-pemerintah Indonesia dan Nederland atas permintaan Sekretaris Djenderal akan memberikan bantuan konsuler dan perlindungan diluar negeri kepada orang-orang Irian Barat yang membawa surat-surat perdjalanan (UNTEA) tersebut dalam pasal 1 diatas, terserah pada orang yang bersangkutan untuk menentukan pada kekuasaan konsul mana ia akan berhubungan."

Apabila yang tersebut diatas dapat Tuan setuju, kami dengan hormat mengusulkan selanjutnya bahwa nota ini dan djawaban Tuan yang menyetujui itu akan dianggap sebagai persetujuan yang tertjapai dalam saat ini serta tertjatat Persetujuan ini.

Terimulah, Tuan, pernyataan p.-enghargaan kami jung setinggi-tingginja.

(ttt) Subandrio

Wakil Indonesia

(ttt) J. H. Van Roijen

Wakil Nederland

(ttt) C.W.A. Schurmann

Wakil Nederland

Kepada
Pedjabat Sekretaris Djenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa

**SURAT JANG SAMA DARI PEDJABAT SEKRETARIS DJENDERAL
U THANT KEPADA WAKIL INDONESIA DAN WAKIL-WAKIL
NEDERLAND**

15 Agustus 1962

Tuan.

Saja memberitahukan dengan hormat penerimaan nota tertanggal hari ini jang ditudjukan kepada saja oleh wakil-wakil Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland. mengenai pengeluaran paspor-paspor dan perlindungan konsuler selama masa pemerintahan oleh Badan Penguasa Pelaksana Sementara Perserikatan (UNTEA) diwilayah Irian Barat. jang bunjinja sebagai berikut :

"Atas nama Pemerintahan kami masing-masing, pada saat penandatanganan Persetudjuan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland mengenai Irian Barat. dengan hormat kami perhatian Tuan tentang persetudjuan berikut pengeluaran paspor-paspor dan perlindungan konsuler selama masa pemerintahan oleh Badan Penguasa Pelaksana Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA) jang tersebut dalam Persetudjuan di atas :

"1. UNTEA. akan mempunjai kekuasaan sebagai kebidjaksanaannja untuk mengeluarkan surat-surat perdjalanana bagi orang-orang Irian Barat jang memintanja. dengan tidak menghilangkan hak mereka untuk sebaliknja meminta paspor Indonesia :

"2. Pemerintah-pemerintah Indonesia dan Nederland atas permintaan Sekretaris Djenderal akan memberikan bantuan konsuler dan perlindungan diluar negeri kepada orang-orang Irian Barat jang membawa surat-surat petdjalanana (UNTEA) tersebut dalam pasal I diatas. terserah pada orang jang bersangkutan untuk menentukan pada kekunsaan konsul mana ia akan berhubungan.

"Apabila jang tersebut diatas dapat Tuan setudjuj. kami dengan hormat mengusulkan selandjutnja bahwa nota ini dan djawaban Tuan jang menjetudjuj itu akan dianggap sebagai persetudjuan jang tertjapai dalam-soal ini surat tertjatatnja persetudjuan ini".

Sebagai djawaban saja memberitahukan dengan hormat. kepada Tuan bahwa saja bersedia memberi instruksi kepada UNTEA. djika ini telah terbentuk seperti jang tersebut dalam Persetudjuan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland mengenai Irian BARat. untuk melakukan tugas seperti jang dimaksudkan dalam nota Tuan. Saja ingin mempergunakan kesempatan ini untuk meminta Pemerintah Tuan untuk memberikan bantuan konsuler dan perlindungan diluar negeri kepada orang-orang Irian BARat seperti tersebut dalam pasal 2 dari nota Tuan.

Nota ini dan nota Tuan tersebut akan dianggap sebagai suatu persetudjuan jang tertjapai dalam soal ini dan tertjatatnja persetudjuan ini.

Terimalah. Tuan. pernnyataan penghargaan saja jang setinggi-tingginja.

(tt) U Thant

Pedjabat Sekretaris Djenderal

Djawatan Indonesia kepada Pedjabat Sekretaris Djenderal

15 Agustus 1962

Tuan,

Saja memberitahukan dengan hormat penerimaan nota Tuan tertanggal hari ini, menjebutkan kesediaan Tuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu berkenaan dengan pengeluaran paspor-paspor selama masa pemerintah oleh Badan Penguasa Pelaksana Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA) diwilajah Irian Barat dan menurut Pemerintah saja untuk memberikan bantuan konsuler dan perlindungan diluar negeri kepada orang-orang irian Barat jang minta bantuan dan perlindungan serupa selama pemerintahan UNTEA.

Saja memberitahukan dengan hormat kepada Tuan, bahwa Pemerintahan saja akan memberikan bantuan konsuler dan perlindungan itu.

Terimalah. Tuan pernjataan penghargaan saja jang setinggi-tingginja.

(ttd) Subandrio

Wakil Indonesia

Djawaban Nederland kepada Pedjabat Sekretaris Djenderal

15 Agustus 1962

Kami memberitahukan dengan hormat penerimaan nota Tuan tertanggal hari ini, menjebutkan kesediaan Tuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu berkenaan dengan pengeluaran paspor-pispor selama masa pemerintahan oleh Badan Penguasa Pelaksana Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA) diwilajah Irian BARat dan meminta Pemerintah kami untuk memberikan bantuan konsuler dan perlindungan diluar negeri kepada orang-orang Irian Barat jang minta bantuan dan perlindungan serupa selama masa pemerintahan UNTEA.

Kami memberitahkan dengan hormat kepad Tuan, bahwa Pemerintah kami akan memebrikan bantuan konsuler dan perlindungan itu.

Terimalah, Tuan, pernnyataan penghargaan kami jang setinggi-tingginja.

(ttt) J. H. van Roijen

Wakil Nederland

(ttt) C. W. A. Schurmann

Wakil Nederland

**PERTUKARAN SURAT MENGENAI PERMBUKAAN KEMBALI
HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA NEDERLAND DAN INDONESIA**

15 Agustus 1962

Tuan-tuan.

Atas nama Republik Indonesia, saya dengan hormat membenarkan pengertian, bahwa setelah penanda tangan Persetujuan akan diadakan pertukaran misi diplomatik antara Republik antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland.

Terima kasih. Tuan-tuan pernyataan penghargaan saja jang setinggi-tingginja.

(ttt) **Subandrio**

Wakil Republi Indonesia

Kepada
Wakil-wakil Keradjaan
Nederland

15 Agustus 1962

Tuan,

Kami memberitahukan dengan hormat penerimaan surat Tuan tertanggal hari ini, yang bunjinja sebagai berikut :

" Atas nama Republik Indonesia, saja dengan hormat membenarkan pengertian, bahwa setelah penanda tangan Persetujuan akan diadakan pertukaran misi diplomatik antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland."

Sebagai djawaban, kami dengan hormat membenarkan, bahwa apa yang tersebut diatas adalah pengertian dari Keradjaan Nederland pula.

Terimalah, Tuan pernyataan penghargaan kami yang setinggi-tingginja.

(ttt) **J. H. van Roijen**

Wakil Keradjaan Nederland

(ttt) **C.W.A. Schurmann**

Wakil Keradjaan Nederland

**AIDE MEMOIRE PEDJABAT SEKRETARIS DJENDERAL U THANT
KEPADA INDONESIA MENGENAI PENGIBARAN BENDERA DAN
PENJERAHAN KEKUASAAN**

31 Djuli 1962

AIDE MEMOIRE

Jang tersebut dibawah ini adalah pengertian saja mengenai tata-tjara dari pada penjerahan kekuasaan atas Irian Barat :

1. Kekuasaan Pemerintah Nederlan atas wilayah Irian BARat akan dihentikan ada saat Wakil Chusus Sekretaris Djenderal mulai memangku djabatanja. Pada hati itu djuga bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dikibarkan.

2. Sedjak hari tanggal itu djuga penarikan dan pemulangan pasukan-pesukan bersendjata Nederland akan dimulai pengawasan Wakil Chusus Sekretaris Djenderal dan akan diselesaikan setjepat mungkin. (Sambil menunggu pemulangannya pasukan-pasukan bersendjata itu tidak akan diprgunakan untuk operasi militer apapun).

3. Pada tanggal 2 Djanuari 1963 bendera Indonesia akan dikibarkan berdampingan dengan bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

4. Penjerahan kekuasaan kepada Indonesia akan dilaksanakan setjepat mungkin sesudah 1 Mei 963

(ttd) **U Thant**

Pedjabat Sekretaris Djenderal

15 Agustus 1962

AIDE MEMOIRE

Amandemen pada Aide Memoire tertanggal 31 Djuli 1962

Penggantian daripada ajat 3 sebagai berikut :

3. Pada tanggal 31 Desember 1962 bendera Nederland akan diturunkan, dan bendera Indonesia akan dikibarkan berdampingan dengan bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(ttd) **U Thant**

Pedjabat Sekretaris djenderal

**AIDE MEMOIRE PEDJABAT SEKRETARIS DJENDERAL U THANT
KEPADA NEDERLAND MENGENAI PENGIBARAN BENDERA DAN
PENJERAHAN KEKUASAAN**

15 Agustus 1962

AIDE MEMOIRE

Tata-tjara dibawah ini telah disetudjui oleh Indonesia dan Nederland mengenai kekuasaan atas irian barat :

1. Kekuasaan Pemeritahan Nederland atas wilayah Irian Barat akan dihentikan pada saat Wakil Chusus Sekretaris Djenderal mulai memangku djabatannja. PAdA hari itu dijuga bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dikibarkan.
2. Sedjak hari tanggal itu djuga penarikan dan pemulangan pasukan-pasukan bersendjata Nederland akan dimulai dibawah pengawasan Wakil Chusus Sekretaris djenderal dan akan diselesaikan setjepat mungkin.
3. Pada hari penjerahan kekuasaan Irian Barat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. bendera Nederland akan dikibarkan berdampingan dengan bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. dan akan berkibar sampai tanggal 31 Desember 1962.
4. Penjerahan kekuasaan kepada Indonesia akan dilaksanakan setjepat mungkin sesudah 1 Mei 1963

(ttD) U Thant

Pedjabat Sekretaris Djenderal

**PIDATO PEDJABAT SEKRETARIS DJENDERAL PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA U THANT PADA UPATJARA PENANDA
TANGANAN PERSETUDJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN KERADJAAN NEDERLAND**

15 Agustus 1962

Pada kedjadian jang penuh dengan makna penting ini, pada saat persetudjuan antara Republik Indonesia dan keradjaan Nederland mengenai hari depan Irian Barat akan ditandatangani, seja terlebih dahulu ingin mengutjapkan selamat kepada kedua pemerintah terhadap kesediaan mereka untuk menjelesaikan soal ini dengan djalan memungkinkan penjelesaian persetudjuan ini.

Saja yakin bahwa adalah benar djika saja mengatakan bahwa, sebagai hasilnja tidak sadja akan ada kerendaan ketegangan didaerah itu akan tetapi djuga bertambahnja perasaan saling pertjaja mempertjajai antara kedua pemerintah. Adalah suatu alamat baik bahwa dengan ditanda tanganinja, Persetudjuan ini, antara kedua negara akan dibuka kembali hubungan diplomatik, dan saja yakin bahwa hubungan mereka dikemudian hari akan didjiwai oleh persahabatan, pengertian dan keramahan jang telah terdapat selama perundingan ini.

Saja ingin djuga mengambil kesempatan ini untuk menegaskan pada umum terima kasih saja kepada Duta Besar Ellsworth Bunker jang telah bertindak atas nama saja selama perundingan-perundingan pendahulu antara kedua pemerintah dan jang kesabarannja, ketulusannja dan ketangkasan diplomatiknja telah memberikan sumbangan begitu besar untuk tertjapainja persetudjuan ini dengan sukses.

Persetudjuan ini mempunjai beberapa unsur-unsur jang unik.

Pertama ialah, bahwa apabila Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukungnja, Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pertama kali dalam sedjarahnja akan mempunyai kekuasaan eksekutip sementara (dibentuk oleh dan dibawah jurisdiksi Sekretaris Djenderal) atas sesuatu daerah jang sangat luas.

Jang lain ialah, bahwa seluruh beaja jang diperlukan atas dasar persetudjuan ini, akan dipikul oleh kedua pemerintah dan tidak akan memberi beban pada lain negara anggouta manapun.

Pada Sekretaris Dejnderal dan Sekretaris dan Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa akan diberi tugas-tugas eksekutip jang tidak ketjil, beberapa diantaranya sudah harus dilakukan, untuk kepentingan perdamaian dan keamanan sebelum dan sambil menunggu persetudjuan Madjelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa itu.

Saja dan kolega-kolega saja akan berusaha keras untuk memenuhi kedjiban-kewadajiban ini sekuat tenaga kami.

Djika kewadajiban-kewadajiban ini hendak dilaksanakan setjara memuaskan bagi semua pihak, maka saja memerlukan kesediaan kerdjasama dari kedua pemerintah, terutama selama masa peralihan.

Saja berhadap bahwa tugas saja akan dipermudah dengan akut serta jang setdjuan ini. tanpa demikian kewadajiban saja akan mendjadi sangat sukar. dan saja sungguh minta kepada kedua pemerintah untuk memberikan kerdjasama mereka jang sebesar-besarnja kepada kami.

Achirnja saja ingin sekali lagi selamat kepada wakil-wakil kedua peperintahan pada saat akan ditanda tanganinja persetudjuan jang bersedjarah ini jang sesuai dengan prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. telah menjelesaikan setjara damai suatu persoalan jang telah berlarut-larut. dengan menguntungkan semua pihak.

**PIDATO DP SUBANDRIO WAKIL INDONSEIA PADA UPATJARA
PENANDATANGAN PERSETUDJUAN ANTARA
NEDERLAND DAN INDONESIA**

Bagi rakjat Indonesia saat ini dipandang sebagai kedjadian nasional jang sangat penting karena dengan penanda tangan persetudjuan ini kesatuan Indonesia telah dipulihkan kembali dan karena itu telah diselesaikan dasar bagi perdjoangan kemerdekaan sebagai bagian daripada revolusi Indonesia.

Oleh karena itu kami merasa sangat puas. Tuan Sekretaris Dejnderal, bahwa Tuan sudah mengambil inisiatip dalam bulan Desember agar kedua belah pihak bertemu untuk memetjahkan masalah ini setjara damai.

Sembutan jang positif dari pihak Indonesia dan pihak Nederland terhadap adjakan-adjakan Tuan sungguh-sungguh itu berhasil dalam persetudjuan jang baru sadja kami tandatangani.

Bimbingan Tuan selama perundingan berdasarkan kedjudjuran, kebijaksanaan dan pengalaman telah memungkinkan kita untuk mengatasi dengan sukses segala seluk-beluk penjelesaikan melalui perundingan ini. Untuk itu, Pemerintah serta rakjat Indonesia akan sangat berterima kasih kepada Tuan.

Atas nama pemerintah dan rakjat Indonesia saja djuga ingin mengutjapkan terimakasih kami jang tulus ichlas, atas segala usaha jang tak kenal djemu dan kesabaran daripada Dutabesar Bunkers jang tidak pernah membatasi diri setjara fisik dan mental dalam mengatasi segala kesukaran dan rintangan jang tulus ichlas jang senantiasa ada pada mereka dalam menghadapi masalah-masalah jang harus kita petjahkan.

Dan akhirnya, Tuan Sekretaris Djenderal, penghargaan kami jang sebesar-besarnya terhadap kolega-kolega Tuan dalam Sekretaris jang dengan kebaktian dan bantuan jang tak kundjung putus telah mendjamin tertjapainja hasil ini.

Sukses daripada persetudjuan ini jang djuga merupakan sukses dari Perserikatan Bangsa-Bangsa saja harap akan menudju kearah hasil-hasil jang lain dalam mentjari penjelasan masalah-masalah jang dihadapi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sekarang setelah persetudjuan ini dintanda tangani sekarang pada waktu Kesatuan Indonesia sedang menudju penjempurnaan saja harap dengan sungguh-sungguh bahwa persahabatan lama antara Indonesia dan Nederland dapat dipulihkan.

Terima kasih.

**PERNJATAAN OLEH DR. J.H. VAN ROIJEN, WAKIL NERDERLAND
PADA UPATJARA PENANDATANGAN PERSETUDJUAN
ANTARA INDONESIA DAN NEDERLAND**

Kita sedang mengalami saat-saat yang jarang terjadi itu sepanjang waktu yang tertajat dimana arah daripada dua bangsa mungkin mengalami perubahan yang menentukan. Pada penandatanganan persetujuan yang terletak didepan kita ini sengketa antara Nederland dan Indonesia mengenai Irian Barat, satu sengketa yang sudah berdjalan terlalu lama, akan diselesaikan.

Sepanjang perundingan yang lama dan kadang-kadang sukar yang mendahului tertjapainja persesuaian fikiran antara kedua pemerintah kami, delegasi Nederland selalu menginsafi benar-benar kepentingan daripada masalah-masalah yang bersangkutan. Akan tetapi yang paling berat menjadi fikiran bagi kami adalah pertimbangan bahwa hasil daripada usaha kita itu setjara langsung akan mempengaruhi nasib daripada 700.000 rakyat Irian Barat.

Pemerintah Nederland dulu dan sekarang djuga sangat memperhatikan kesedjahteraan rakyat Irian Barat. Itulah sebabnja Nederland per-tama² mementingkan bahwa dalam persetujuan dimaksud ketentuan² yang mendjamin kemadjuan selandjutnja daripada wilayah Irian Barat dan penduduknja dalam lapangan politik, ekonomi, kebudayaan dan pendidikan dan mendjamin untuk rakyat Irian Barat, dibawah pengawasan yang aktif daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa, pelaksanaan kebebasan memilih mengenai hari kemudiannja yang sungguh-sungguh dan berbahagia.

Kami ingin mengutjapkan terima kasih, Tuan Sekretaris Djenderal, atas inisiatip Tuan untuk mempertemukan kedua belah pihak dan untuk peranan Tuan yang tidak terhingga dalam mentjapai penyelesaian daripada persoalan-persoalan kami. Kami harap kerelaan Tuan untuk meneruskan rasa terima kasih kami djuga kepada anggauta-anggauta Staf Tuan atas bantuan dan nasehat mereka yang sangat kami perlukan.

Kepada Duta Besar Ellswort Bunker saja ingin mengutjapkan penghargaan kami yang sungguh-sungguh atas usahanja yang penuh dengan kesabaran dan tidak djemu-djemu. Saja merasa berhutang budi atas tjara yang tidak berat sebelah pada waktu beliau mengetahui perundingan pendahuluan informil kami di Huntland Estate di Middleburg.

Telah ternjata sukar, dan barangkali, Tuan Sekretaris Djenderal, saja malahan harus menjatakan kadang-kadang lebih daripada sukar untuk mempertemukan delegasi-delegasi Nederland dan Indonesia. Akan tetapi setelah kita duduk sekitar mendja perundingan ternjata pada kami bahwa delegasi Indonesia dan kami sendiri dengan sungguh-sungguh telah sama-sama terikat untuk mentjapai penyelesaian setjara damai daripada sengketa kami.

Tuan Sekretaris Djenderal, kini kami telah menguraikan penyelesaian yang diperintji diatas kertas. Penilaian sedjarah atas apa yang telah kami tjapai pada achirnja

akan bergabung pada tjara-tjara bagaimana ketentuan-ketentuan daripada persetudjuan kami akan dilaksanakan dalam prakteknja. Seluruh dunia telah mengamati-kami dengan seksama : itu akan berangsur terus.

Kini telah ditatan dasar-dasar, itu harapan kami, untuk pengertian jang lebih baik dan pada achirnja hubungan jang lebih menjenangkan dan berfaedah antara kedua negara dan kedua bangsa. Untuk kemungkinan tertjapainja perwujudan harapan ini, jang merupakan ukuran adalah ketulus ichlasan jang timbal balik dan usaha jang terus menerus dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan persetudjuan ini.



